

Fi. 4
2004
2

**KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERKOTAAN
DI KOTA KARANGANYAR**

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Pada Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

CH. NINA ANGGRAHINI
NIM. L4D000117



**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, 29 Desember 2003



CH NINA ANGGRAHINI
NIM. L4D000117

**KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERKOTAAN
DI KOTA KARANGANYAR**

Tesis Diajukan Kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :
CH NINA ANGGRAHINI
NIM. L4D000117

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 29 Desember 2003

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 29 Desember 2003

Pembimbing Pendamping



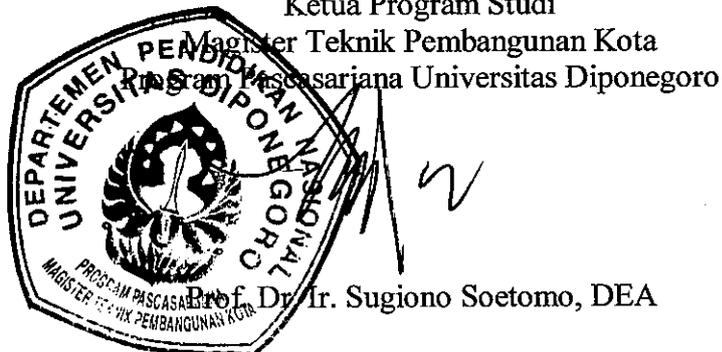
Ir. SUNARTI, MT.

Pembimbing Utama



Ir. NANY YULIASTUTI, MSP.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota



D O A

Aku mohon kekuatan
Dan Tuhan memberi kepadaku kesukaran
Kesukaran untuk membuatku kuat

Aku mohon kebijaksanaan
Dan Tuhan memberi kepadaku masalah,
masalah untuk dipecahkan.

Aku mohon kesejahteraan
Dan Tuhan memberi kepadaku
bahaya-bahaya untuk diatasinya.

Aku mohon kasih
Dan Tuhan memberi kepadaku
orang-orang di dalam kesulitan....
untuk ditolong.

Aku mohon kemurahan
Dan Tuhan memberi kepadaku kesempatan

Aku tidak menerima apa yang kuinginkan.
Aku telah menerima apa yang kubutuhkan.

Doaku telah dijawab.

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Alm. Papi Petrus Mulyadi MS dan Alm. Ibu Fransisca Sulastri dengan limpahan doa dan restunya sampai akhir hayatnya.
 - ❖ Putra-Putriku tersayang Yanu, Briyan dan Yona dengan patuh menunggui Mama belajar.
- ❖ Saudara-Saudariku dari Keluarga Besar Alm. Bapak Petrus Mulyadi MS dan Keluarga Besar Bapak Karso Suwiryono yang telah banyak membantuku.
 - ❖ Almamaterku Universitas Diponegoro

ABSTRACT

In striving for the society empowering, the local government of Karanganyar Regency in its policy for developing the region begins by directing the programs that are specially intended and directly will be benefit for the society. These programs planned and carried out by the society together with the social institution that is LKMD (Security Institution of Village Society.) The implementation of the social empowering programs directed among others to develop the city basic infrastructures which have been scheduled in the year of 2005 in accordance with the PJM (Middle Term Program) of the basic infrastructure of settlement of Karanganyar City in the fiscal year of 1997 – 1998 is that any Kampong within the area of Karanganyar City must be properly completed with basic infrastructures that are to guarantee the health condition and the improvement of the social life and economy of the society. Related to the duties and functions of the LKMDs which refer to the regulations found in the presidential decree of the Republic of Indonesia number 28 1980, the ministerial decree of the minister of internal affairs number 27 1984, The presidential decree number 49 2001, the local Regulations of Karanganyar Regency Number 11 2000 about the LKMD and the ministerial regulation of the minister of internal affairs number 9 1982 about The Arrangement Guidelines of Planning and Controlling Development in Local Areas (P5D), the LKMDs in Karanganyar Municipality are supposed to and must have good performance and the result is really the representation of The necessity of developing of the basic infrastructures of the urban areas so that it can help overcome the problems of the necessity of developing of the urban areas of the Karanganyar Municipality.

In this study, the analysis about the performance of the LKMDs in developing the basic infrastructures of the urban areas of Karanganyar City is carried out by (1) duties and functions identification of LKMDs by using descriptive – qualitative method (2) the identification of the performance of the LKMDs related to their duties and functions by using descriptive scoring analysis of the society's perception and factor analysis (3) The identification of the results of the development of the basic infrastructures of the urban areas and the funding by using scoring percentage analysis of the results of the development (4) formulating the connection of the duties and functions implementation of the LKMDs, their performances and also the result of the development of the basic infrastructures of the urban areas of Karanganyar Municipality by using descriptive – qualitative analysis and SWOT.

From the result of the research, it is understood that the implementations of the duties and functions of LKMDs in planning, realizing and controlling the development did not apply the prevailed regulations fully because they are influenced by the mechanism of the development of the basic infrastructures of the urban areas in Karanganyar Municipality, the mechanism in which the Top-Down process is dominant so far. The evaluation of the perception of the society toward the performance of LKMDs in carrying out their duties and functions in relation to responsiveness, responsibility and accountability is considered good enough, but still it need full attention to the responsive aspect in a sense that the board of the LKMD are less responsive To give serving to the activities and necessities of development suggested. It happens because the board are less experienced in planning and realizing the development program so that the development activities managed by LKMDs so far have not accommodated yet the necessity of service facilities of the basic infrastructures in the urban areas intended for the sake of the society; in a sense that the LKMDs' performance so far has not yet been able to help overcome the problem the basic infrastructures' necessities in the urban areas of Karanganyar municipality. This observed from the results of the basic infrastructure's development in and up to 2003. From the 7 targeted program of fulfilling the necessities of facilities of the basic infrastructures which included in the PJM (Middle Term Program) of The Basic Infrastructure of settlement of Karanganyar Municipality up to the year 2005, It is only 1 program really realized that is the environment street infrastructures, or In other words it is only 14 % fulfilled.

It recommended that the LKMDs to make use of the potency and opportunity given and for the local government to empower the LKMDs according to their duties and functions.

ABSTRAK

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Karanganyar, dalam kebijakan pembangunan daerahnya mulai mengarahkan program-program yang terutama diperuntukan dan langsung akan dinikmati oleh masyarakat untuk direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan lembaga kemasyarakatan yaitu LKMD. Implementasi dari program pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain ditujukan untuk pembangunan prasarana dasar perkotaan, yang mempunyai sasaran pada tahun 2005 sesuai dengan PJM Prasarana Dasar Pemukiman Kota Karanganyar TA 1997-1998, adalah bahwa semua kampung di wilayah Kota Karanganyar harus dilengkapi dengan prasarana dasar yang dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial perekonomian masyarakat. Dikaitkan dengan tugas dan fungsi LKMD selama ini yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tercantum dalam Keppres RI Nomor 28 tahun 1980, Kepmendagri Nomor 27 tahun 1984, Keppres Nomor 49 tahun 2001 dan Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 11 tahun 2000 tentang LKMD, serta Permendagri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D), diharapkan LKMD di Kota Karanganyar harus memiliki kinerja yang hasilnya betul-betul merupakan representasi kebutuhan pembangunan prasarana dasar perkotaan sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar. Melalui studi ini diharapkan dapat diketahui implementasi kinerja LKMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini, serta sejauh mana kinerja LKMD tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar.

Dalam studi ini analisis terhadap kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar dilakukan dengan (1) identifikasi tugas dan fungsi LKMD menggunakan analisis deskriptif kualitatif, (2) identifikasi kinerja LKMD dikaitkan tugas dan fungsinya menggunakan analisis deskriptif skoring persepsi masyarakat dan analisis faktor (3) identifikasi hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan dan pendanaannya menggunakan analisis skoring persentase hasil pembangunan, (4).merumuskan hubungan implementasi tugas dan fungsi LKMD, kinerja LKMD serta hasil pembangunan dan pendanaan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan SWOT.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi tugas dan fungsi LKMD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tidak seluruhnya menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku karena dipengaruhi oleh mekanisme pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar yang dominan top down selama ini. Dari penilaian persepsi masyarakat tentang kinerja LKMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditinjau dari responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas adalah cukup baik, tetapi masih memerlukan perhatian terhadap aspek responsivitasnya yaitu kurang tanggapnya pengurus LKMD dalam memberikan layanan atas usulan kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan disebabkan kurang pengalamannya pengurus LKMD dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sehingga kegiatan pembangunan yang dikelola oleh LKMD selama ini kurang menampung kebutuhan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan bagi kepentingan masyarakat dalam arti kinerja LKMD selama ini belum dapat membantu menyelesaikan masalah kebutuhan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan sampai dengan tahun 2003 ini, dari 7 sasaran program pemenuhan kebutuhan fasilitas prasarana dasar yang tercantum dalam PJM Prasarana Dasar Pemukiman Kota Karanganyar sampai dengan tahun 2005, hanya 1 sasaran program yang terpenuhi yaitu pemenuhan prasarana jalan lingkungan, atau dengan kata lain yang terpenuhi baru 14 %.

Direkomendasikan, bahwa LKMD perlu memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, dan untuk Pemerintah Daerah supaya LKMD diberdayakan sesuai tugas dan fungsinya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya yang melimpah kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini.

Tesis yang berjudul “**Kinerja LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan di Kota Karanganyar**” merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Magister Teknik (MT) pada Program Magister Teknik Pembangunan Kota (MTPK) Universitas Diponegoro Semarang.

Banyak pihak yang telah membantu penulis hingga berhasil menyelesaikan studi di MTPK UNDIP ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada:

1. **Bupati Karanganyar**, yang telah memberi ijin sekolah.
2. **Pengelola Program CBUIM Loan ADB No. 1572 INO**, yang telah membantu membiayai kegiatan studi penulis.
3. **Kepala BAPPEDA, Sekretaris dan Para Kepala Bidang serta Karyawan-Karyawati Kantor BAPPEDA Kabupaten Karanganyar**, khususnya Mba' Martini dan Bapak Widodo S. BSc.
4. **Ir. Nany Yuliasuti, MSP.** dan **Ir. Sunarti, MT.**, sebagai pembimbing dan co-pembimbing dalam penyusunan tesis ini. Dengan segala kesabaran telah memberikan bimbingan kepada penulis, semoga jerih payah dan jasa Ibu bisa menampakkan manfaat yang besar bagi pembangunan dan pengembangan ilmu.
5. **Samsul Ma'rif, SP, MT.** dan **Ir. Hadi Wahyono, MA.**, sebagai pembahas dan penguji yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan karya tesis ini.
6. **Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA.**, sebagai Direktur Program MTPK Undip dan sebagai dosen pengajar yang telah memotivasi dan memberikan banyak ilmu dan wawasannya kepada seluruh mahasiswa tentang bagaimana sebaiknya seorang ‘planer’ itu bertindak.
7. **Seluruh dosen MTPK Undip**, yang telah membagikan ilmunya kepada penulis dan mahasiswa lainnya. Semoga dapat bermanfaat.
8. **Teman-teman CBUIM angkatan IV**, atas segala bantuan dan dorongannya.
9. **Segenap Rekan di bagian administrasi Program Pasca Sarjana MTPK UNDIP, dan semua pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. atas segala bantuan dan dorongannya sampai selesainya studi penulis.

Semoga budi baik, bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Pada akhirnya tiada gading yang tak retak, maka penulis menyadari bahwa karya tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga perlu kritik, saran dan masukan untuk perbaikan. Penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, Desember 2003

Ch. Nina Anggrahini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Permasalahan	6
1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi	6
1.3.1. Tujuan	6
1.3.2. Sasaran	7
1.3.3. Manfaat	7
1.4. Ruang Lingkup	8
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah	8
1.4.2. Ruang Lingkup Materi	11
1.5. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Metodologi Penelitian.....	15
1.6.1. Pendekatan Studi.....	15
1.6.2. Metode Pelaksanaan Studi.....	18
1.7. Sistematika Penulisan	32
BAB II. KAJIAN PUSTAKA KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN	34
2.1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Kedudukan dan Perannya Dalam Pembangunan Kota	35
2.1.1. Tinjauan LKMD	35
2.1.2. Kedudukan LKMD dalam Pembangunan Perkotaan	40
2.1.3. Peranan LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan	42
2.2. Kinerja Organisasi LKMD	50
2.2.1. Tinjauan Kinerja Organisasi	50
2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi	55
2.3. Pengertian tentang Persepsi	57
2.4. Rangkuman	60

BAB III. GAMBARAN UMUM KOTA KARANGANYAR.....	66
3.1. Gambaran Umum Kota Karanganyar	66
3.2. Penggunaan Lahan dan Jumlah Penduduk	68
3.3. Kebijakan Pembangunan Kota Karanganyar	69
3.4. Proses Pembangunan Kota Karanganyar	72
3.5. Peranan LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan di Kota Karanganyar	77
3.6. Tinjauan LKMD di Kota Karanganyar	78
 BAB IV. ANALISIS KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN DI KOTA KARANGANYAR.....	 80
4.1. Identifikasi Tugas dan Fungsi LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan	80
4.1.1. Implementasi dalam Perencanaan Pembangunan.....	82
4.1.2. Implementasi dalam Pelaksanaan Pembangunan	83
4.1.3. Implementasi dalam Pengendalian Pembangunan	84
4.2. Analisis Persepsi Masyarakat tentang Kinerja LKMD Kota Karanganyar dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan di Kota Karanganyar	85
4.2.1. Kinerja LKMD Terhadap Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.....	86
4.2.2. Analisis Kinerja LKMD Kota Karanganyar.....	95
4.3. Analisis Hasil Pembangunan Fasilitas Pelayanan Prasarana Dasar Perkotaan di Kota Karanganyar dan Pendanaanya.....	101
4.4. Analisis Deskriptif Hubungan antara Implementasi Tugas dan Fungsi LKMD, Kinerja LKMD dan Hasil Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Didukung Potensi di Wilayah Kota Karanganyar	109
 BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	 118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Rekomendasi	119
5.2.1. Rekomendasi untuk LKMD	121
5.2.2. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah	121
5.2.3. Untuk Studi Lanjut.....	122
 DAFTAR PUSTAKA	 123
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Pendekatan Studi	17
Tabel I.2 Instrumen Pengumpulan Data	20
Tabel I.3 Jumlah Sampel Per Kelurahan/Desa di Kota Karanganyar	23
Tabel I.4 Pemberian Skor Pada Variabel Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja LKMD	26
Tabel I.5 Standar Pelayanan Prasarana Dasar Pemukiman Kota Karanganyar	28
Tabel I.6 Kriteria Penetapan Skoring	28
Tabel I.7 Metode Perhitungan Nilai Prosentase	29
Tabel I.8 Matriks Analisis SWOT	30
Tabel II.1 Kebutuhan Prasarana Dasar Kawasan Pemukiman di Perkotaan ...	45
Tabel II.2 Bentuk, Macam, Fungsi, Pembiayaan, Pembuat dan Cara Pembuatan dan Pemeliharaan dari Prasarana.....	49
Tabel II.3 Peraturan-peraturan dan Pendapat Beberapa Pakar tentang Kinerja Organisasi LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan	61
Tabel II.4 Definisi Operasional Penelitian	65
Tabel III.1 Luas Daerah dan Presentase Kelurahan / Desa yang Masuk Dalam Kota Karanganyar	67
Tabel III.2 Luas Daerah Menurut Pola Penggunaan Lahan Kota Karanganyar Tahun 2000	69
Tabel III.3 Jumlah, Persebaran, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Karanganyar Tahun 2003	69
Tabel III.4 Standar Pelayanan Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota PLPL/ KIP Kota Karanganyar.....	72
Tabel IV.1 Tugas dan Fungsi LKMD	81
Tabel IV.2 Tingkat Responsivitas Kinerja LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Menurut Persepsi Masyarakat di Kota Karanganyar	88
Tabel IV.3 Tingkat Responsibilitas Kinerja LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Menurut Persepsi Masyarakat di Kota Karanganyar	90
Tabel IV.4 Tingkat Akuntabilitas Kinerja LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Menurut Persepsi Masyarakat di Kota Karanganyar	94
Tabel IV.5 Tingkat Kinerja LKMD di Wilayah Kota Karanganyar Secara Keseluruhan	96

Tabel IV.6	Jawaban Rata-rata Responden Terhadap Kinerja LKMD di Masing-masing Kelurahan/Desa dalam Wilayah Kota Karanganyar	97
Tabel IV.7	Pengelompokan Faktor	98
Tabel IV.8	Penetapan Skoring Standar Pembangunan Fasilitas Pelayanan Prasarana Dasar Permukiman di Kota Karanganyar	101
Tabel IV.9	Swadaya Murni Masyarakat dalam Pembangunan di Lingkup Kecamatan dalam Wilayah Kota Karanganyar Tahun Anggaran 2000, 2001, dan 2002	104
Tabel IV.10	Daftar Proyek-proyek yang Terkait dengan Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan dalam Lingkup Kecamatan di Wilayah Kota Karanganyar	106
Tabel IV.11	Matriks SWOT Kinerja LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan	113

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 Wilayah Penelitian (Kawasan Kabupaten Karanganyar Dalam Wilayah Propinsi)	9
Gambar I.2 Peta Wilayah Penelitian (Wilayah Perkotaan Karanganyar)	10
Gambar I.3 Kerangka Pemikiran Kinerja LKMD Dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan di Kota Karanganyar	14
Gambar I.4 Kerangka Analisis Kinerja LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan di Kota Karanganyar.....	31
Gambar II.1 Struktur Organisasi LKMD	36
Gambar II.2 Perencanaan, Pemrograman dan Pengawasan Secara Botton Up untuk Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan Menurut Permendagri No.9 Tahun 1982	41
Gambar II.3 Proses Pembangunan di Perkotaan (Yang Mengkaitkan Rencana Tata Ruang Dengan Rencana Pembangunan Sektoral)	43
Gambar III.1 Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Karanganyar	74
Gambar IV.1 Forum Musyawarah LKMD/ LPMD dalam Proses Perencanaan Pembangunan	83
Gambar IV.2 Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan	84
Gambar IV.3 LKMD dan Pemerintah Melakukan Pengendalian Pembangunan Jalan Lingkungan dengan Bantuan Dana Pembangunan Kelurahan/ Desa	85

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik IV. 1 Tingkat Responsivitas Kinerja LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Menurut Persepsi Masyarakat di Kota Karanganyar	88
Grafik IV.2 Tingkat Responsibilitas Kinerja LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Menurut Persepsi Masyarakat di Kota Karanganyar	91
Grafik IV.3 Tingkat Akuntabilitas Kinerja LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Menurut Persepsi Masyarakat di Kota Karanganyar	94
Grafik IV.4 Tingkat Kinerja LKMD di Wilayah Kota Karanganyar Secara Keseluruhan.....	96
Grafik IV.5 Perbandingan Prosentase Standar Pembangunan Fasilitas Pelayanan Dasar Pemukiman dan Realisasinya di Kota Karanganyar	102
Grafik IV.6 Prosentase Penggunaan Dana Swadaya Murni Masyarakat dalam Pembangunan di Lingkup Kecamatan dalam Wilayah Kota Karanganyar pada Tahun 2000, 2001, dan 2002.....	105
Grafik IV.7 Perbandingan Jumlah Dana Swadaya Murni dan Anggaran Pemerintah dalam Pembangunan di Lingkup Kecamatan dalam Wilayah Kota Karanganyar pada Tahun 2000, 2001, dan 2002	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia pada saat ini telah berkembang menjadi semakin kompleks serta dituntut adanya efisiensi dan efektifitas di seluruh bidang pembangunan. Manajemen pembangunan daerah yang dilakukan sekarang ini adalah dengan memberikan peran serta yang lebih luas bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga aspirasi seluruh masyarakat dan potensi daerah dalam wilayah pembangunan tersebut dapat diakomodasikan dan direalisasikan.

Salah satu cara untuk melaksanakan fungsi manajemen pembangunan daerah tersebut adalah pengembangan mekanisme penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang melibatkan semua pihak (*Stakeholder*) pembangunan, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D).

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, menerangkan secara tegas mengenai kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah bagi kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Permendagri Nomor 9 tahun 1982 mengatur mekanisme perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Dalam Undang-Undang 22 tahun 1999 maupun Permendagri 9 tahun 1982 terdapat hal yang mendasar yaitu kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas daerah, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan fungsi DPRD.

Selanjutnya pada GBHN tahun 1999 mengamanatkan kebijakan bagi terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pertumbuhan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. GBHN ini dalam operasionalnya dijabarkan ke dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang secara khusus mempunyai tujuan untuk "Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat".

Implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Permendagri Nomor 9 tahun 1982 dan GBHN tahun 1999 mengenai pemberdayaan masyarakat tersebut juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, berupa program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan untuk pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar. Hal yang penting dipertimbangkan bahwa Kota Karanganyar sebagai Ibukota Kabupaten Karanganyar berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pelayanan sosial bagi wilayah *hinterlandnya*. Di sisi lain, wilayah Kota Karanganyar telah menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang

mengembangkan di sektor pemukiman. Kondisi kota yang demikian akan berkembang baik dengan didukung sarana dan prasarana kota yang memadai sehingga keberadaan ibukota kabupaten menjadi kawasan yang memiliki potensi besar bagi kemajuan perekonomian daerah dapat tercapai.

Sejalan dengan hal tersebut dalam upaya memberdayakan masyarakat pada pembangunan prasarana dasar perkotaan, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengacu kepada petunjuk teknis mengenai Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (Dirjen PMD Depdagri, 1996:39), dengan melaksanakan program-program bagi masyarakat dimana pelaksanaannya mengikutsertakan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Artinya program-program terutama diperuntukan dan langsung dinikmati masyarakat dimana rencana dan pelaksanaannya diharapkan dilakukan oleh masyarakat dengan lembaga kemasyarakatan yaitu LKMD.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan tetapi sudah menjadi subyek pembangunan. Peran masyarakat dan LKMD dalam pembangunan dipandang sebagai mitra Pemerintah yang diawali dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pemeliharaan. Apabila dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar maka pembangunan dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan LKMD.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menurut Keppres Nomor 28 Tahun 1980 dan diperbaharui dengan Keppres Nomor 49 Tahun 2001, adalah lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. Perjalanan negara Indonesia sebagai suatu bangsa telah membawa negara kita memasuki era reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. Paradigma pembangunan yang sebelumnya lebih sentralistik bergeser kepada pembangunan yang desentralistik dan demokratis seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, telah membawa konsekuensi perubahan pada organisasi LKMD di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2000 maka LKMD berubah menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan harapan bahwa lembaga tersebut dapat menjadi mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Melalui kebijakan pembangunan perkotaan yang tercantum dalam Program Jangka Menengah (PJM) Prasarana Dasar Pemukiman Kota

Karanganyar, telah ditentukan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam bidang pembangunan fasilitas pelayanan prasarana lingkungan kota sampai akhir tahun 2005. PJM yang akan dicapai oleh Kota Karanganyar pada tahun 2005 adalah bahwa semua kampung di perkotaan harus dilengkapi dengan prasarana dasar yang dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada program pembangunan prasarana dasar perkotaan melalui wadah LKMD, diharapkan secara bertahap dapat menyelesaikan masalah kebutuhan prasarana dasar perkotaan, melalui implementasi tugas pokok dan fungsi LKMD. Hal itu dapat dicapai apabila LKMD dapat mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dengan didukung oleh kemampuan kerja atau kinerja organisasi LKMD yang baik.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi LKMD, maka LKMD berperan sebagai motivator program pemberdayaan masyarakat di Kota Karanganyar. Kinerja LKMD tersebut merupakan representasi kebutuhan pembangunan prasarana dasar perkotaan, tanpa mengesampingkan aspek normatif yang berlaku dalam aturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas akan dijadikan sebagai landasan untuk meneliti kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar dengan memahami kinerja LKMD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan masalah kebutuhan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar.

1.2 Rumusan Permasalahan

Peran aktif masyarakat dan LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar yang diawali dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pemeliharaan, diharapkan secara bertahap dapat menyelesaikan masalah kebutuhan prasarana dasar perkotaan melalui implementasi tugas pokok dan fungsi LKMD, hal tersebut dapat dicapai apabila LKMD dapat mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dengan didukung oleh kemampuan kerja atau kinerja organisasi LKMD yang baik. Berawal dari rumusan permasalahan tersebut di atas, maka pertanyaan dalam penelitian (*question research*) ini adalah : ***“Bagaimana kinerja LKMD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang dikaitkan dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar selama ini, dan sejauh mana kinerja LKMD tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah kebutuhan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar ?”***

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja LKMD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan-peraturan tentang organisasi LKMD yang ada selama ini. Tugas pokok dan fungsi tersebut dikaitkan dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar sesuai dengan Program Jangka Menengah (PJM) Prasarana Dasar Pemukiman Kota Karanganyar.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah :

- a. Mengidentifikasi tugas dan fungsi LKMD yang terkait dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar.
- b. Mengidentifikasi kinerja LKMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dikaitkan dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar menurut persepsi masyarakat.
- c. Mengidentifikasi hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar dan pendanaannya.
- d. Menganalisis dan merumuskan hubungan tugas dan fungsi LKMD, kinerja LKMD dan hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan didukung potensi di wilayah Kota Karanganyar.

1.3.3 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja LKMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan-peraturan tentang organisasi LKMD yang ada selama ini, dalam membantu menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar sesuai dengan Program Jangka Menengah (PJM) Prasarana Dasar Pemukiman Kota Karanganyar. Selain itu diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih efektif dan efisien melalui konsep pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah.

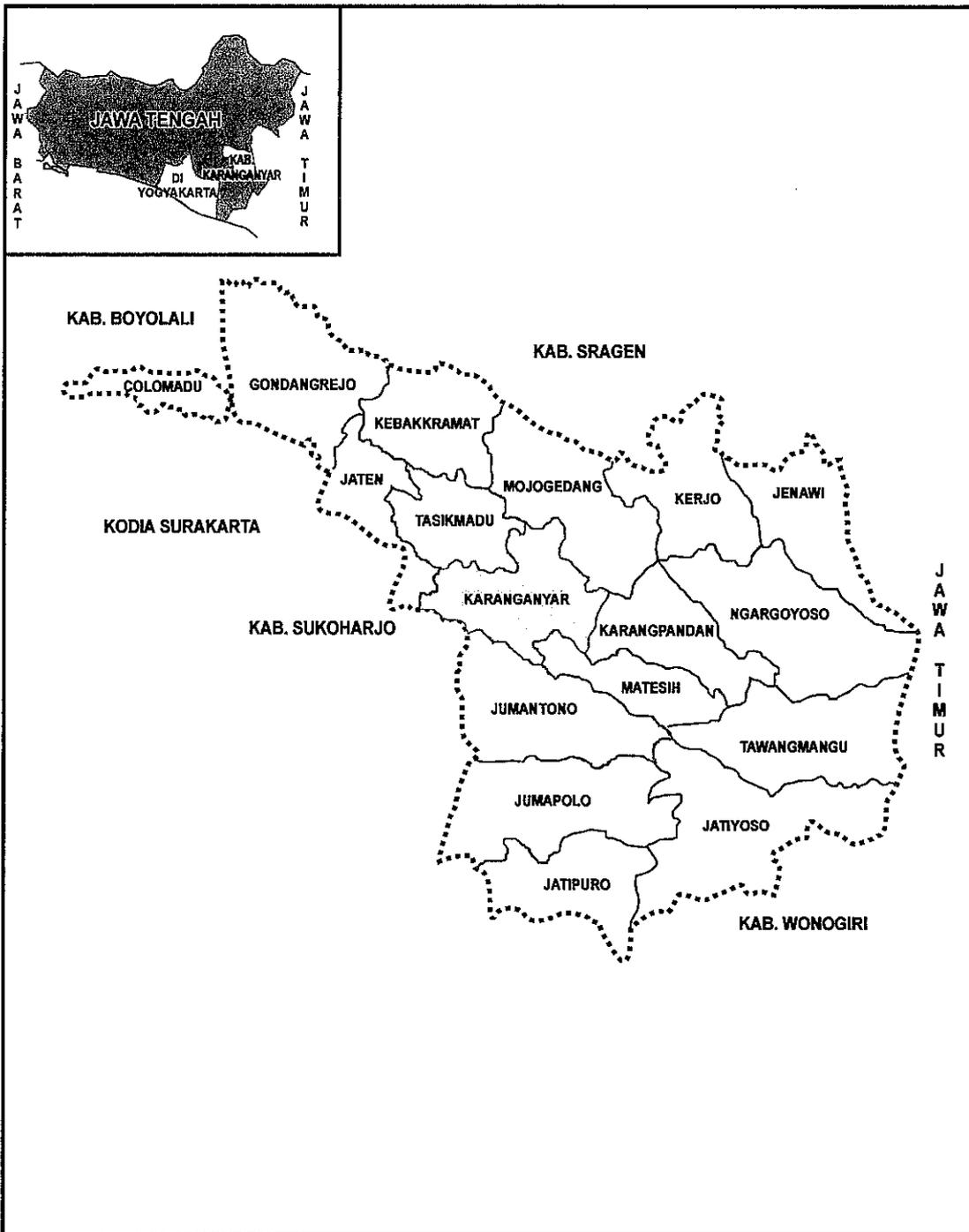
1.4. Ruang Lingkup

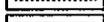
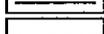
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

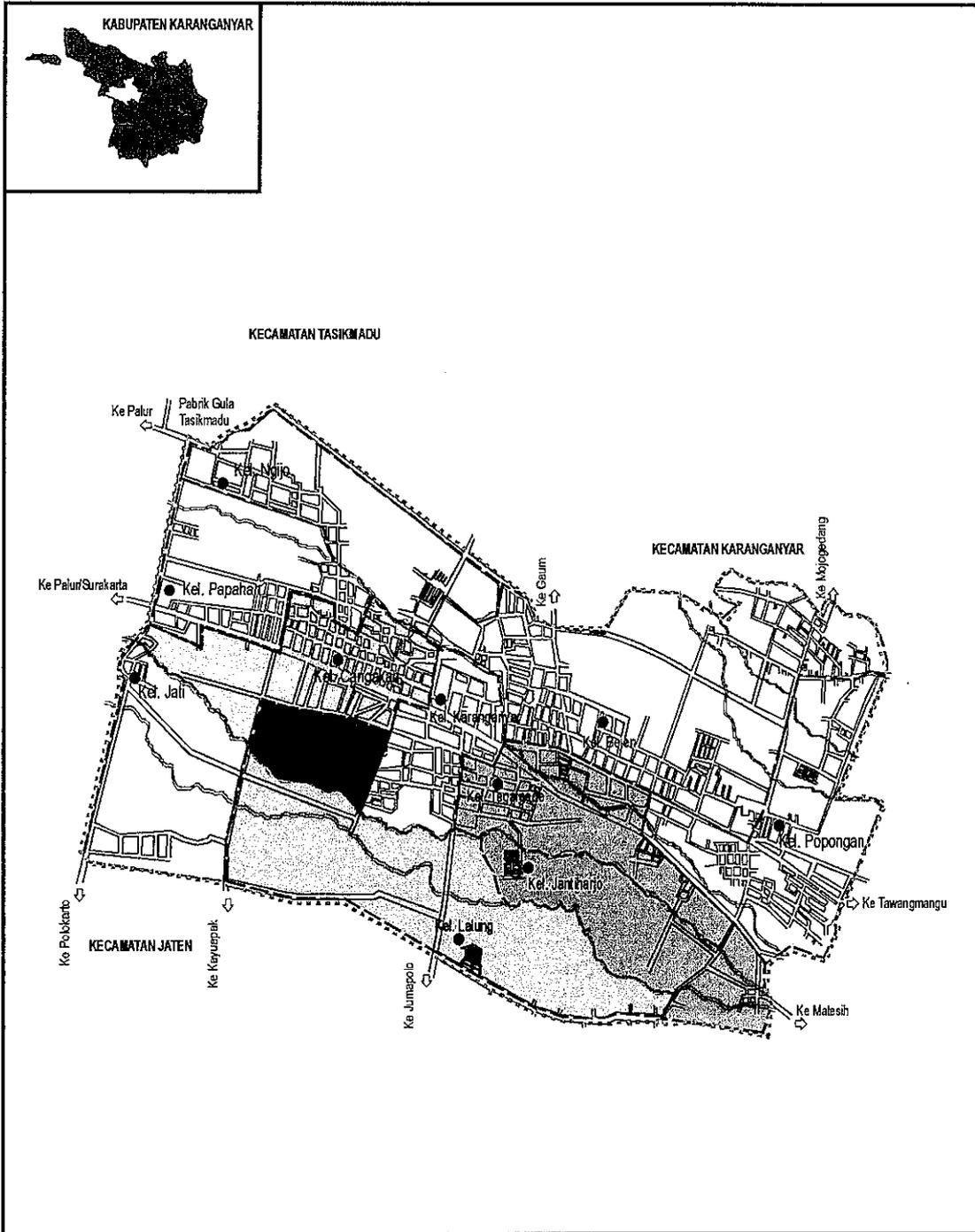
Ruang lingkup wilayah yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah, wilayah Kota Karanganyar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 22 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Karanganyar.

Ruang lingkup wilayah penelitian secara mikro adalah kelurahan/desa yang berada di wilayah Kota Karanganyar, yakni terdiri dari 11 kelurahan/desa di 3 kecamatan, meliputi: Kelurahan Lalung, Kelurahan Jantiharjo, Kelurahan Tegalgede, Kelurahan Jungke, Kelurahan Cangakan, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Bejen, Kelurahan Popongan yang berada di Kecamatan Karanganyar; Desa Papahan, Desa Ngijo yang berada di Kecamatan Tasikmadu; dan Desa Jati yang berada di Kecamatan Jaten, serta secara makro adalah Kota Karanganyar.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ruang lingkup wilayah penelitian seperti dijelaskan diatas dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan 1.2 dibawah ini:



 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO	PETA		NO. GAMBAR	UTARA 
	WILAYAH PENELITIAN (KAWASAN KABUPATEN KARANGANYAR DALAM WILAYAH PROPINSI)		1:1	
	LEGENDA :  : Batas Kabupaten  : Batas Kecamatan  : Wilayah Kota Karanganyar		SKALA	
			1 : 5.000	
TESIS			SUMBER	
KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN DI KOTA KARANGANYAR			BAPPEDA KABUPATEN KARANGANYAR	



 <p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p> <p>TESIS</p> <p>KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN DI KOTA KARANGANYAR</p>	PETA PETAK WILAYAH PENELITIAN (WILAYAH PERKOTAAN KARANGANYAR)		NO. GAMBAR 12	UTARA 
	LEGENDA : - - - - - : Batas Wilayah Kota Karanganyar ————— : Jalan ~~~~~ : Sungai ● : Kelurahan/Desa - - - - - : Batas Kelurahan/Desa		SKALA 1 : 1.000	
			SUMBER BAPPEDA KABUPATEN KARANGANYAR	

1.4.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identifikasi tugas dan fungsi LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan ini mengacu kepada: Keppres RI Nomor 28 tahun 1980, Kepmendagri Nomor 27 tahun 1984, Keppres Nomor 49 tahun 2001 dan Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 11 tahun 2000 tentang LKMD, serta Permendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D), dan dengan mempertimbangkan kebijaksanaan atau arahan pembangunan yang telah ada, serta rencana tata ruang yang berlaku.
- b. Mengkaji kinerja LKMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penilaian kinerja LKMD merupakan gambaran kemampuan kerja atau prestasi kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang. Kriteria yang akan dijadikan landasan penilaian sehingga dapat diketahui keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran menggunakan variabel yang sudah diketahui dari literatur. Penilaian kinerja LKMD menggunakan persepsi narasumber.
- c. Identifikasi hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan. Pengertian prasarana dasar perkotaan dibatasi menurut Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Pemukiman Kota, Departemen Pekerjaan

Umum (1987) adalah fasilitas pelayanan prasarana lingkungan perumahan kota yang meliputi komponen: jalan lingkungan, jalan setapak, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah/sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah rumah tangga, yang dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat.

1.5. Kerangka Pemikiran

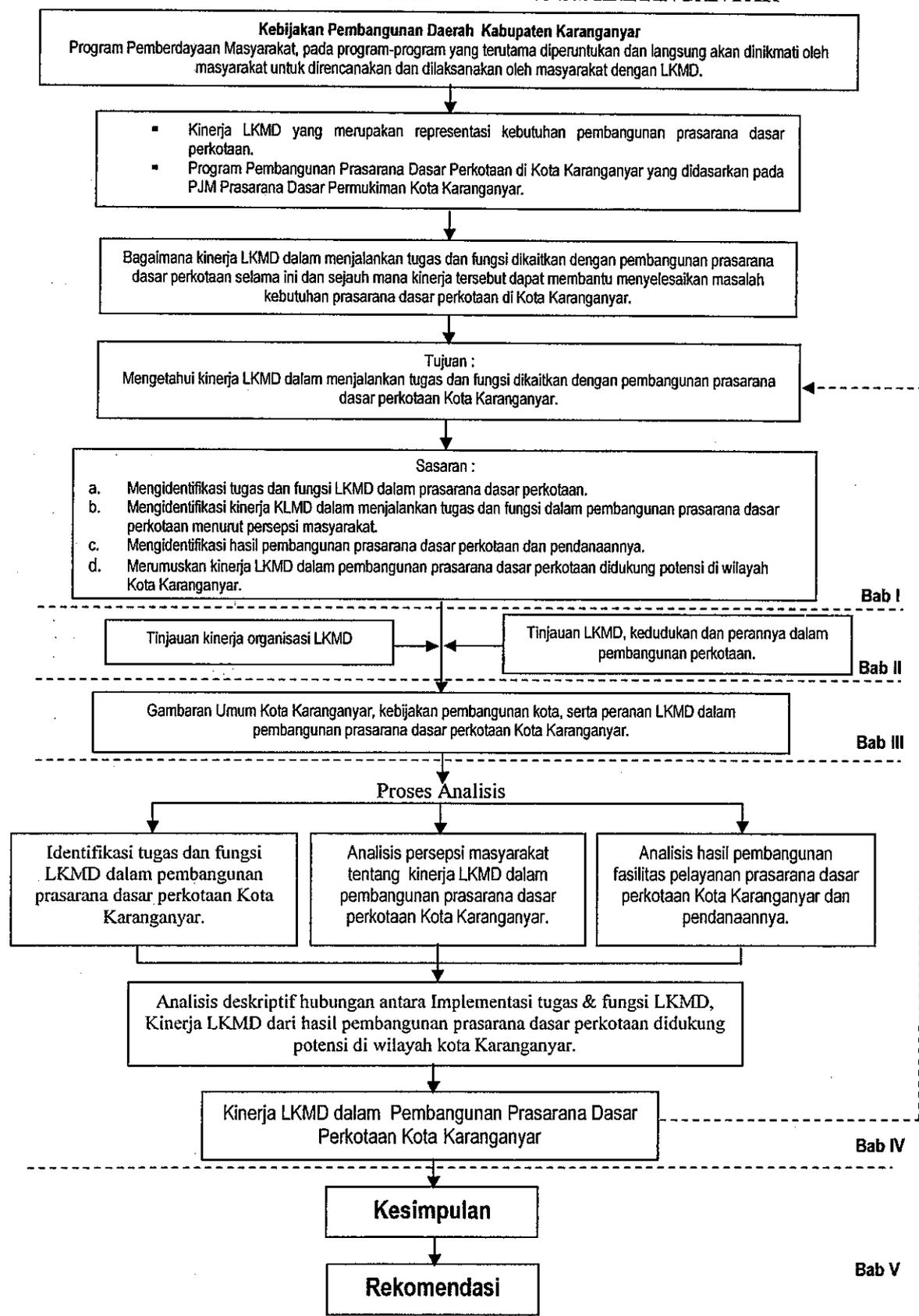
Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pemberdayaan masyarakat diarahkan dengan mengarahkan program-program yang terutama diperuntukan dan langsung akan dinikmati oleh masyarakat untuk direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan lembaga kemasyarakatan yaitu LKMD. Implementasi dari program pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain ditujukan untuk pembangunan prasarana dasar perkotaan. Berdasarkan PJM prasarana dasar pemukiman Kota Karanganyar tahun 1997/1998 maka sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2005 adalah bahwa semua kampung di wilayah Kota Karanganyar harus dilengkapi dengan prasarana dasar yang dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial perekonomian masyarakat.

Keterkaitannya dengan tugas dan fungsi LKMD yang mengacu kepada Peraturan-peraturan tentang LKMD dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar selama ini, diperlukan peran aktif masyarakat dan LKMD dalam pembangunan yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian pembangunannya diharapkan secara bertahap dapat

menyelesaikan masalah kebutuhan prasarana dasar perkotaan melalui implementasi tugas pokok dan fungsi LKMD, hal tersebut dapat dicapai apabila LKMD dapat mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dengan didukung oleh kemampuan kerja atau kinerja organisasi LKMD yang baik dan hasilnya betul-betul merupakan representasi kebutuhan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar. Melihat kondisi tersebut, maka perlu dilakukan kajian terhadap implementasi kinerja LKMD yang telah berlangsung selama ini dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar.

Identifikasi tugas dan fungsi LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan analisis kinerja LKMD dilakukan dengan menggunakan kajian literatur sehingga ditemukan variabel yang terbentuk dan indikator yang akan dikaji, kemudian dilakukan penilaian kinerja LKMD menurut persepsi masyarakat. Proses analisis kinerja ini kemudian diikuti oleh analisis terhadap hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan yang akan dijadikan tolok ukur kinerja LKMD dalam membantu menyelesaikan masalah kebutuhan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar selama ini. Dari ketiga analisis tersebut ditentukan dan dirumuskan kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar yang dapat memberikan arahan bagi kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih efektif dan efisien melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, maka penjabaran kerangka pemikiran tersebut di atas dapat dilihat dalam Gambar 1.3. berikut ini.

GAMBAR I. 3
KERANGKA PEMIKIRAN KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DASAR PERKOTAAN KOTA KARANGANYAR



1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Pendekatan Studi

Studi tentang kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dikaitkan dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar. Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan studi adalah menggunakan metode deskriptif eksploratif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid.

Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menguraikan gambaran kinerja LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang dikaitkan dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan selama ini, dan sejauh mana kinerja LKMD tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar melalui pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang ditentukan.

Pendekatan dengan metode eksploratif dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dari masyarakat terhadap kinerja LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dikaitkan dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar berdasarkan pengalaman dan wawasan dari masyarakat yang mengetahui kondisi LKMD.

Berdasarkan pendekatan diatas, pencapaian tujuan studi ditempuh dengan:

- a. Melakukan kajian pustaka tentang kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan, sehingga dapat diketahui variabel-variabel yang terbentuk dan indikator yang akan dikaji untuk mengetahui kinerja LKMD.
- b. Melakukan identifikasi terhadap implementasi tugas dan fungsi LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dengan mengacu kepada: Keppres RI Nomor 28 tahun 1980, Kepmendagri Nomor 27 tahun 1984, Keppres Nomor 49 tahun 2001 dan Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 11 tahun 2000 tentang LKMD, serta Permendagri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) yang terkait dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan.
- c. Melakukan penilaian terhadap kinerja LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dikaitkan dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan di tingkat kelurahan/desa dengan menggunakan analisis persepsi masyarakat.
- d. Melakukan observasi lapangan terhadap hasil pembangunan/kondisi eksisting prasarana dasar perkotaan di tingkat kelurahan/desa, dari data tersebut di total untuk menggambarkan hasil pembangunan prasarana dasar di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan, sehingga dapat diketahui kebutuhan prasarana dasar perkotaan sudah terpenuhi atau tidak dibandingkan dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan perhitungan nilai persentase, hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan ini dijadikan

tolok ukur kinerja LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam membantu menyelesaikan masalah kebutuhan prasarana dasar perkotaan selama ini.

- e. Merumuskan hubungan antara implementasi tugas dan fungsi LKMD dan kinerja LKMD terhadap hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar didukung potensi di wilayah Kota Karanganyar, sehingga dapat memberikan arahan bagi kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih efektif dan efisien melalui konsep pemberdayaan masyarakat.

Seluruh tahapan tersebut di atas dapat dirangkum dalam suatu tabel pendekatan studi seperti terlihat dalam Tabel I.1.

TABEL I.1.
PENDEKATAN STUDI

Tahapan	Metode Pendekatan	Kegunaan	Hasil
Melakukan kajian pustaka tentang kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan.	Kajian Literatur	Menetapkan variabel yang terbentuk dan indikator yang dikaji untuk mengetahui kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan	Variabel yang terbentuk dan indikator yang dikaji untuk mengetahui kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan
Identifikasi implementasi tugas dan fungsi LKMD	Analisis Deskriptif Kualitatif	Mengetahui implementasi tugas dan fungsi LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar	Gambaran implementasi tugas dan fungsi LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar
Melakukan analisis terhadap kinerja LKMD yang dikaitkan dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar	Analisis deskriptif Persepsi masyarakat metode skoring dan analisis faktor	Mengetahui kinerja yang dimiliki LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan menurut persepsi masyarakat	Deskripsi Kinerja LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan

Tahapan	Metode Pendekatan	Kegunaan	Hasil
Melakukan observasi terhadap hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar dan pendanaannya	Kuantitatif : Analisis Perhitungan Nilai Persentase	Menggambarkan kondisi eksisting fasilitas prasarana dasar perkotaan	Gambaran kondisi eksisting fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan terpenuhi atau tidak dan sumber pendanaannya sebagai tolok ukur kinerja LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan
Merumuskan hubungan tugas dan fungsi LKMD, kinerja LKMD dan hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan di dukung potensi di wilayah Kota Karanganyar.	Analisis Deskriptif Kualitatif dan analisis SWOT	Mengetahui kinerja LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di dukung potensi di wilayah Kota Karanganyar.	Gambaran kinerja LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar.

Sumber: *Proses Pemikiran Studi, 2003..*

1.6.2. Metode Pelaksanaan Studi

Metode pelaksanaan studi didefinisikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu ataupun praktis. Dengan kata lain, metode pelaksanaan studi merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan penelitian, atau merupakan acuan pelaksanaan studi yang meliputi kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data dan teknik analisis yang digunakan.

1.6.2.1. Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan penyebaran

kuesioner, data sekunder diperoleh dari dokumentasi terhadap informasi yang telah tersedia sebelumnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam upaya memperoleh data-data tersebut diatas adalah melalui:

- a. Observasi lapangan, dilakukan untuk mengetahui secara langsung fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan di masing-masing desa/kelurahan dalam wilayah Kota Karanganyar.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau dokumen, laporan kegiatan, monografi atau daftar tabel statistik dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti untuk bahan menganalisa permasalahan.
- c. Kuesioner, yaitu teknik penyebaran pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini kepada responden yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan penelitian.

Secara rinci instrumen pengumpulan data dan cara perolehannya, sebagai berikut (Tabel I.2):

TABEL I.2.
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Variabel	Indikator Yang Dikaji	Data			
		Jenis Survei			Sumber Data
		O	K	I	
Tugas dan fungsi LKMD	1) Implementasi dalam perencanaan pembangunan 2) Implementasi dalam pelaksanaan pembangunan 3) Implementasi dalam pengendalian pembangunan		X		Ka.Bappeda, Ka.KPM, Ka.PU &LLAJ Camat./ Kalur.
Persepsi masyarakat tentang kinerja LKMD	1) Terhadap Responsivitas LKMD dalam: a. Mengenali kebutuhan masyarakat b. Penyusunan Rencana Kerja c. Penampungan wadah aspirasi masyarakat 2) Terhadap Responsibilitas LKMD dalam: a. Mekanisme pelaksanaan program kerja b. Membina Kerjasama antar lembaga c. Sarana komunikasi 3) Terhadap Akuntabilitas LKMD dalam: a. Pertanggung jawaban secara internal: 1. Kemampuan dedikasi pengurus 2. Adanya arah program kerja yang jelas 3. Berorientasi pada pencapaian tujuan (komitmen pengurus) 4. Mekanisme pencapaian tujuan (jadwal kerja & pemanfaatan sumber daya) b. Pertanggung jawaban secara eksternal: 1. Keterpenuhinya kebutuhan masyarakat (efektivitas &efisiensi) hasil pembangunan 2. Keterlibatan masyarakat		X		Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Hasil Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan dan pendanaannya	a. Jalan Lingkungan ($\geq 3,5$ meter) b. Jalan Setapak (1 – 3,5 meter) c. Kran Umum/Air Bersih Umum d. Sumur Gali Umum e. Drainase Tersier f. MCK Umum g. Tempat Penampungan Sementara (TPS) Persampahan	X		X	BAPPEDA, Dinas PU dan LLAJ

Sumber : Proses Pemikiran Studi, 2003

Keterangan : O = Observasi Lapangan; K = Koesioner; I = Instansi Terkait

1.6.2.2. Jumlah Sampel dan Cara Pengambilan Sampel

Di dalam menetapkan jumlah sampel dari kuisioner pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat secara mutlak berapa jumlah sampel tersebut harus diambil dari suatu populasi (Kartono, 1996:45). Hal ini juga dikuatkan oleh adanya pendapat bahwa tidak ada batasan yang jelas apa yang dimaksud dengan sampel yang besar dan yang kecil. Dalam studi ini terdapat 2 macam sampel yaitu untuk identifikasi tugas dan fungsi LKMD serta untuk analisis persepsi masyarakat tentang kinerja LKMD, dengan penentuan sampel sebagai berikut:

1. Penentuan sampel untuk identifikasi tugas dan fungsi LKMD dilakukan dengan narasumber yang sudah dipilih, yaitu dari instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang terkait dengan organisasi LKMD, meliputi:
 - Implementasi tugas dan fungsi LKMD dalam perencanaan pembangunan, instansi yang terkait adalah BAPPEDA, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan serta Kelurahan;
 - Implementasi tugas dan fungsi LKMD dalam pelaksanaan pembangunan, instansi yang terkait adalah Dinas PU dan LLAJ, Kecamatan serta Kelurahan;
 - Implementasi tugas dan fungsi LKMD dalam pengendalian pembangunan, instansi yang terkait adalah BAPPEDA. Kecamatan serta Kelurahan.
2. Jumlah sampel untuk analisis persepsi masyarakat tentang kinerja LKMD di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan, ditentukan dengan rumus (Jalaludin Rakmat, 1983:113):

$$n = \frac{N}{N + (d^2 + 1)}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = derajat kecermatan (*level of significance*)

Dalam studi ini, nilai derajat kecermatan yang diambil adalah sebesar 10 % (tingkat kepercayaan studi adalah sebesar 90 %). Hal ini didasari alasan keterbatasan sumber daya yang tersedia (waktu dan tenaga survei), karena semakin besar nilai derajat kecermatan yang diambil, akan semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan.

Dalam studi ini yang menjadi populasi adalah jumlah penduduk Kota Karanganyar yang berjumlah 38.429 jiwa (RDTRK Karanganyar, 2000), dengan alasan bahwa pembangunan prasarana dasar perkotaan adalah **pembangunan yang terpadu** dalam sasaran yang ingin dicapai yaitu dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat di Kota Karanganyar, maka penilaian kinerja LKMD adalah penilaian di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan. Jadi jumlah sampel yang diambil adalah:

$$n = \frac{38.429}{38.429 + (10 \%^2 + 1)}$$

$$n = 99 \approx 100$$

Dari perhitungan tersebut maka jumlah sampel yang diambil adalah sebesar 100 orang.

Jumlah sampel yang telah didapatkan akan dibagi secara proposional per kelurahan/desa sesuai dengan jumlah penduduknya, sehingga survei yang dilakukan dapat mencakup seluruh lapisan hunian tempat tinggal di tiap kelurahan/desa yang diamati, seperti tampak pada Tabel I.3.

TABEL I.3.
JUMLAH SAMPEL PER KELURAHAN/DESA DI KOTA
KARANGANYAR

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sampel (Orang)
1	Karanganyar	4.924	13
2	Bejen	8.014	21
3	Cangkalan	4.792	13
4	Tegalgede	4.731	12
5	Jungke	4.343	11
6	Popongan	1.147	3
7	Jantiharjo	1.672	4
8	Lalung	2.069	5
9	Jati	872	3
10	Papahan	2.272	6
11	Ngijo	3.593	9
	Jumlah	38.429	100

Sumber: Hasil analisis, 2003.

Responden dalam studi ini terdiri dari warga masyarakat yang ada di wilayah Kota Karanganyar, yang selama ini mengetahui organisasi LKMD atau terlibat dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar, dimana narasumber tersebut bukan pengurus LKMD/LPMD, atau pihak-pihak yang terkait dengan LKMD/LPMD seperti Camat, Kepala Kelurahan/Desa, Istri Kepala Kelurahan/Desa, serta Ketua Lingkungan, Ketua RW/RT dan Tokoh Masyarakat yang ditunjuk menjadi pengurus LKMD/LPMD. Metode yang digunakan untuk menetapkan responden adalah menggunakan *purposive sampling* dimana responden dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau obyek studi, yang selektif dan yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik.

Hal tersebut juga disesuaikan dengan tujuan studi yaitu untuk menggali informasi seakurat dan selengkap mungkin. Untuk itu dipilih responden yang

betul-betul mengetahui organisasi LKMD dan peran sertanya dalam proses pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar.

Narasumber yang akan dijadikan sumber data untuk analisis persepsi masyarakat tentang kinerja LKMD di Kota Karanganyar adalah:

1. Tokoh Masyarakat
2. Ketua Lingkungan Kelurahan (Kaling)
3. Kepala Dusun (Kadus)
4. Ketua Rukun Warga (RW)
5. Ketua Rukun Tetangga (RT)
6. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
7. Pegawai Negeri di Lingkungan Pemda yang berdomisili di Kota Karanganyar

1.6.2.3. Analisis Data

1. Identifikasi tugas dan fungsi LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar

Identifikasi implementasi tugas dan fungsi LKMD mengacu kepada: Keppres RI Nomor 28 tahun 1980, Kepmendagri Nomor 27 tahun 1984, Keppres Nomor 49 tahun 2001 dan Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 11 tahun 2000 tentang LKMD, serta Permendagri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber yang sudah dipilih, kemudian hasil wawancara tersebut dideskripsikan secara kualitatif. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner dapat dilihat pada Lampiran A.

2. Analisis Persepsi Masyarakat

Analisis persepsi masyarakat menggunakan metode skoring/pembobotan, untuk menilai hasil persepsi dalam suatu tingkatan dengan bentuk bobot nilai

1,2,3,4 dan seterusnya. Penetapan nilai yang digunakan menggunakan skala *Likert* karena dianggap mampu mengukur penilaian terhadap evaluasi.

Menurut Ngurah Agung (1992:41), skala *Likert* dipakai untuk mengukur tingkat kesepakatan seseorang terhadap himpunan pernyataan berkaitan dengan suatu konsep tertentu. Pernyataan-pernyataan yang dipakai dapat dibedakan dalam **pernyataan positif** dan **pernyataan negatif**, selanjutnya untuk pernyataan positif bobot nilai 5 diberikan untuk kategori **sangat setuju**, sedangkan untuk pernyataan negatif bobot nilai 5 diberikan untuk kategori **sangat tidak setuju**. Jumlah bobot nilai untuk semua pernyataan dinyatakan sebagai skor konsep, selanjutnya dilakukan analisis item, yaitu untuk memilih item atau pernyataan yang memenuhi persyaratan terbaik dengan memakai korelasi produk-momen dari Person.

Adapun jumlah pertanyaan untuk masing-masing indikator tersebut dan pemberian bobot nilai untuk masing-masing pertanyaan pada variabel kinerja LKMD dijelaskan pada tabel berikut (Tabel I.4) sedangkan bentuk pertanyaan dalam kuesioner dapat dilihat pada Lampiran B.

Untuk selanjutnya penilaian persepsi masyarakat pada masing-masing indikator yang dikaji yaitu terhadap responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas di analisis per item pertanyaan dalam kuesioner.

Adapun data untuk mengukur kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan diperoleh dari total pembobotan/penilaian semua item pertanyaan dalam kuesioner yang membentuk tingkat kinerja LKMD, data setiap pertanyaan tersebut merupakan data ordinal (kategori berjenjang), yang kemudian total nilainya dijadikan kategori sebagai data nominal untuk tingkat kinerja LKMD di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan.

TABEL I.4.
PEMBERIAN SKOR PADA VARIABEL
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KINERJA LKMD

Indikator Yang Dikaji	Jumlah Pertanyaan Dalam Kuesioner	Kategori Jawaban	Skor
1) Terhadap responsivitas dalam: a. Mengenali kebutuhan masyarakat b. Penyusunan Rencana Kerja c. Penampungan wadah aspirasi masyarakat	6	A = Sangat baik B = Baik C = Cukup baik D = Kurang Baik E = Buruk	5 4 3 2 1
2) Terhadap resposibilitas dalam: a. Mekanisme pelaksanaan program kerja b. Membina Kerjasama antar lembaga c. Sarana komunikasi	4	A = Sangat baik B = Baik C = Cukup baik D = Kurang Baik E = Buruk	5 4 3 2 1
3) Terhadap akuntabilitas dalam: a. Pertanggung jawaban secara internal: 1. Kualitas pengurus 2. Adanya arah program kerja yang jelas 3. Berorientasi pada pencapaian tujuan (komitmen pengurus) 4. Mekanisme pencapaian tujuan (jadwal kerja & pemanfaatan sumber daya) b. Pertanggung jawaban secara Eksternal: 1. Keterpenuhinya kebutuhan masyarakat (efektivitas & efisiensi) hasil pembangunan 2. Keterlibatan masyarakat	8	A = Sangat baik B = Baik C = Cukup baik D = Kurang Baik E = Buruk	5 4 3 2 1
Jumlah Total Pertanyaan Dalam Kuesioner	18		

Sumber: Hasil Analisis, 2003.

Perhitungan kinerja LKMD dilakukan dengan penentuan interval masing-masing nilai atau skor dari jawaban responden di mana terlebih dahulu ditentukan nilai interval kelas dengan rumus :

$$i = \frac{R}{N}$$

Keterangan :

i = lebar interval kelas
 R = rentang (jumlah skor tertinggi – skor terendah)
 N = jumlah kelas/kategori
 (sumber : Sudjana, 1996:47).

Untuk mengelompokan penilaian persepsi masyarakat kedalam persamaan persepsi pada semua item pertanyaan dilakukan dengan analisis faktor, analisis faktor pada prinsipnya digunakan untuk mereduksi data, yaitu proses untuk meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai faktor, proses analisis dapat dilihat pada Lampiran G.

3. Analisis Skoring Metode Perhitungan Nilai Persentase

Analisis skoring perhitungan nilai persentase digunakan untuk menganalisis hasil pembangunan yang teridentifikasi melalui observasi terhadap prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar, pemberian nilai persentase dalam studi ini mengacu pada standar pelayanan Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota (PLPK) atau Kampung Improvement Program (KIP), PJM Prasarana Dasar Pemukiman Kota Karanganyar Tahun Anggaran 1997-1998 (Renstra DPU dan LLAJ Kabupaten Karanganyar Tahun 2000) sebagai berikut (Tabel I.5):

TABEL I.5.

**STANDAR PELAYANAN PRASARANA DASAR PEMUKIMAN KOTA
KARANGANYAR**

No.	Indikator yang dikaji	Standar Pelayanan
1.	Fasilitas Jalan Lingkungan ($\geq 3,5$ meter)	50 meter per hektar luas wilayah terbangun
2.	Fasilitas Jalan Setapak (1-3,5 meter)	150 meter per hektar luas wilayah terbangun
3.	Kran Umum/Air Bersih Umum	1 unit per 10 hektar luas wilayah terbangun
4.	Sumur Gali Umum	1 unit per 10 hektar luas wilayah terbangun
5.	Drainase Tersier	300 meter per hektar luas wilayah terbangun
6.	MCK Umum	1 unit per 5 hektar luas wilayah terbangun
7.	TPS Persampahan	1 unit per 5 hektar luas wilayah terbangun

Sumber: *PJM Prasarana Dasar Pemukiman Kota Karanganyar TA 1997-1998.*

Kriteria penetapan skoring untuk masing-masing komponen prasarana dasar perkotaan dijelaskan pada tabel berikut (Tabel I.6), sedangkan metode perhitungan persentase dapat dilihat pada tabel (Tabel I.7.) berikut:

TABEL I.6.

KRITERIA PENETAPAN SKORING

No.	Indikator yang dikaji	Metode Perhitungan	Kriteria
1.	Fasilitas Jalan Lingkungan ($\geq 3,5$ meter)	Persentase	1 = Pelayanan < 100 % 2 = Pelayanan > 100%
2.	Fasilitas Jalan Setapak (1-3,5 meter)	Persentase	1 = Pelayanan < 100 % 2 = Pelayanan > 100%
3.	Kran Umum/Air Bersih Umum	Persentase	1 = Pelayanan < 100 % 2 = Pelayanan > 100%
4.	Sumur Gali Umum	Persentase	1 = Pelayanan < 100 % 2 = Pelayanan > 100%
5.	Drainase Tersier	Persentase	1 = Pelayanan < 100 % 2 = Pelayanan > 100%
6.	MCK Umum	Persentase	1 = Pelayanan < 100 % 2 = Pelayanan > 100%
7.	TPS Persampahan	Persentase	1 = Pelayanan < 100 % 2 = Pelayanan > 100%

Sumber: *Hasil Analisis, 2003*

Keterangan: Nilai skor = 1, berarti fasilitas pelayanan kurang terpenuhi
 Nilai skor = 2, berarti fasilitas pelayanan terpenuhi

TABEL I.7.
METODE PERHITUNGAN NILAI PERSENTASE

No.	Indikator yang dikaji	Rumus/Cara Perhitungan
1.	Pesentase pelayanan Fasilitas Jalan lingkungan ($\geq 3,5$ meter)	Panjang jalan lingkungan (1-3 meter) dibagi standar dikalikan 100
2.	Pesentase pelayanan Fasilitas jalan setapak (1-3,5 meter)	Panjang jalan setapak (1-1,2 meter) dibagi standar dikalikan 100
3.	Pesentase pelayanan Kran Umum/Air Bersih umum	Jumlah Kran Umum/Air Bersih dibagi standar dikalikan 100
4.	Pesentase pelayanan Sumur Gali Umum	Jumlah Sumur Gali dibagi standar dikalikan 100
5.	Pesentase pelayanan fasilitas Drainase Tersier	Panjang Drainase Tersier dibagi standar dikalikan 100
6.	Pesentase pelayanan fasilitas MCK Umum	Jumlah MCK Gali dibagi standar dikalikan 100
7.	Pesentase pelayanan fasilitas TPS Persampahan	Jumlah TPS Persampahan dibagi standar dikalikan 100

Sumber: Hasil Analisis, 2003.

4. Analisis Deskriptif Kualitatif

Dari hasil identifikasi implementasi tugas dan fungsi LKMD, analisis persepsi masyarakat tentang kinerja LKMD serta analisis hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan kemudian dideskriptifkan.

Analisis deskriptif diperlukan untuk menjelaskan data yang bersifat kualitatif, melalui analisis deskriptif dalam studi ini dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada kinerja LKMD/LPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dikaitkan dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan, dari analisis deskriptif kualitatif tersebut kemudian dirangkum kedalam analisis SWOT.

Analisis SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunity, and Threat*) merupakan analisis kualitatif deskriptif yang mampu menjabarkan potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan /ancaman yang dimiliki oleh organisasi (Soesilo I Nining, 2000:11-11).

Dalam organisasi LKMD, potensi merupakan keunggulan sumberdaya, keterampilan, kemampuan, atau aspek internal lainnya yang dimiliki oleh organisasi LKMD. Permasalahan adalah kelemahan atau keterbatasan atau ketidakefisienan dalam sumberdaya, keterampilan, kemampuan, atau aspek internal lainnya yang menghalangi daya guna efektif. Peluang merupakan situasi yang paling diinginkan dari organisasi LKMD. Sebaliknya, tantangan/ancaman merupakan situasi yang paling tidak diinginkan dari organisasi LKMD.

TABEL I.8.
MATRIK ANALISIS SWOT

	Potensi (<i>Strength</i>)	Permasalahan (<i>Weakness</i>)
Peluang (<i>Opportunity</i>)	SO	WO
Tantangan/Ancaman (<i>Threat</i>)	ST	WT

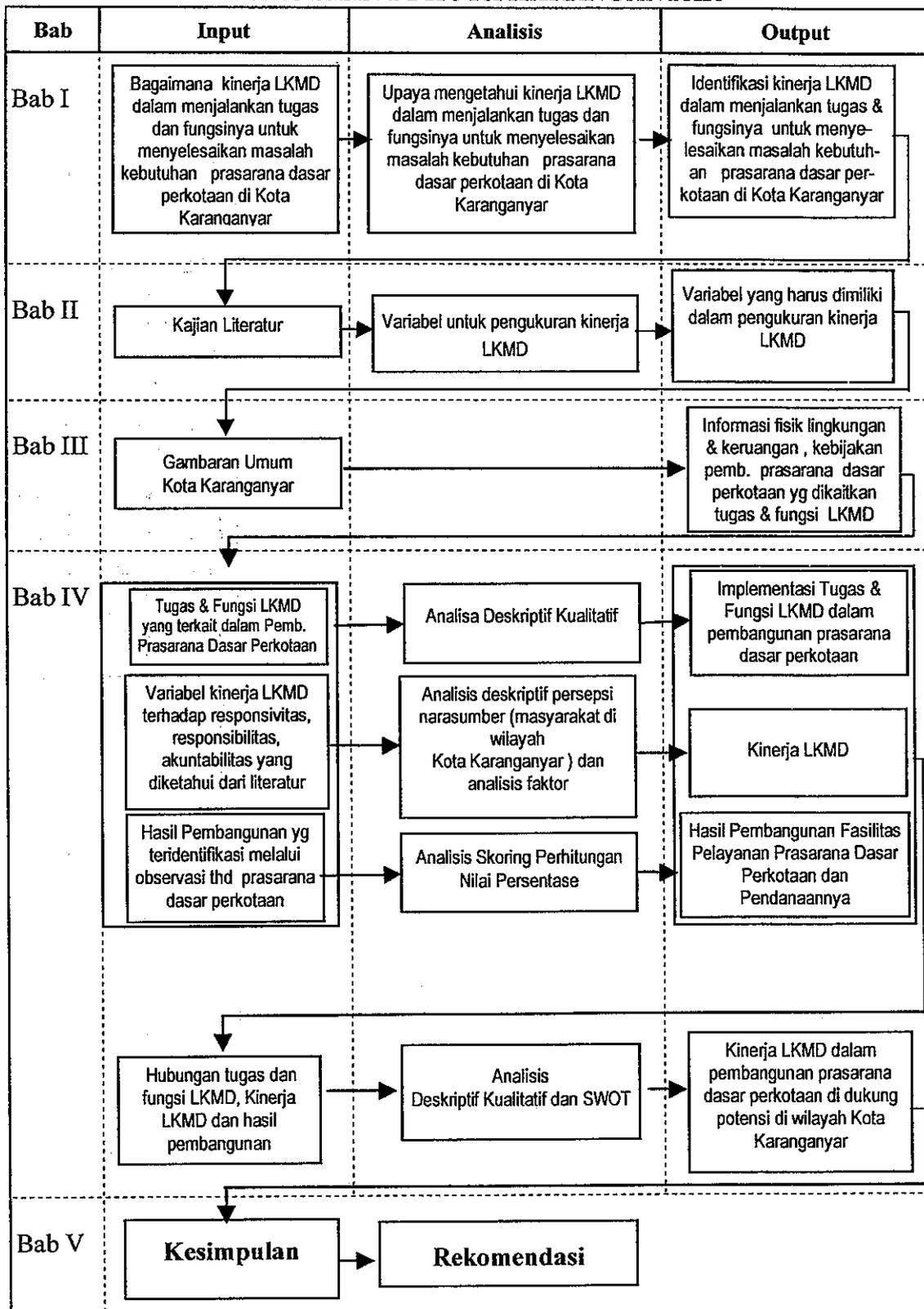
Sumber: Soesilo I Nining, 2000.

Analisis SWOT dilakukan dengan tujuan adalah dalam upaya melakukan manajemen strategik, karena terlihat tugas dan fungsi LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar sedemikian kompleks, sehingga harus ada upaya membuat sasaran yang lebih dapat dilakukan yaitu dengan memilih prioritas yang paling mungkin dilakukan untuk perbaikan atau peningkatan kemampuan kerja atau kinerja LKMD di masa yang akan datang.

1.6.2.4. Kerangka Analisis

Kerangka analisis memuat tahapan analisis secara sistematis mengenai masukan data (*input*), proses analisis (metode analisis yang digunakan), serta hasil keluarannya (*output*), seperti terlihat pada tabel berikut (Gambar I.4.):

GAMBAR 1.4.
KERANGKA ANALISIS
KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR
PERKOTAAN DI KOTA KARANGANYAR



Sumber : Proses Pemikiran Studi, 2003

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum laporan tesis ini, maka akan diuraikan secara ringkas sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan penelitian ini, mengapa persoalan yang diangkat dalam penelitian ini menarik untuk diteliti, apa tujuan, sasaran, dan manfaat dari penelitian ini, serta bagaimana metode penelitiannya.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN

Bab ini merupakan kajian pustaka yang difokuskan pada kajian mengenai kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan. Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mencari jawab secara teoritis terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, dan dari kajian pustaka inilah tolok ukur atau standar untuk mengevaluasi fenomena yang terjadi dilapangan didapat.

BAB III. GAMBARAN UMUM KOTA KARANGANYAR

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum wilayah studi yaitu kota Karanganyar. Uraian dan ilustrasi mengenai kebijakan pembangunan kota serta peranan kelembagaan dalam pembangunan kota di wilayah studi yaitu Kota Karanganyar. Dalam bab ini diharapkan memperkuat deskripsi persoalan mengenai kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar.

BAB IV. KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN DI KOTA KARANGANYAR

Bab ini merupakan inti dari laporan tesis ini. Secara sistematis data-data hasil survai lapangan diorganisir atau dikemas untuk menampilkan deskripsi tentang kasus penelitian ini, dan selanjutnya secara kritis akan di analisis sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang sangat terkait dan khas mengenai kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar.

BAB V. PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk memberi jawaban terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun rekomendasi adalah merupakan bahan masukan bagi persoalan sejenis di wilayah lain, sehingga diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan pembangunan perkotaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN

Pembangunan adalah suatu proses yang didalamnya anggota masyarakat bisa meningkatkan kemampuan pribadi dan kelembagaan mereka, untuk mengerahkan dan mengelola sumber-sumber yang tersedia, demi menciptakan perbaikan-perbaikan mutu kehidupan mereka secara sinambung dan adil, yang sesuai dengan aspirasi-aspirasi mereka sendiri (Korten, 1998 dalam Abdullah, 1997:15). Di dalam pembangunan terdapat aspek masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas, aspek kelembagaan, aspek sumber-sumber daya pembangunan, aspek mutu atau kualitas kehidupan masyarakat, dan aspek aspirasi masyarakat yang harus tersalurkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berbagai pengalaman dinyatakan bahwa, aspek kelembagaan atau institusi berperan besar dalam keberhasilan banyak program pembangunan. Bank Dunia menyadari akan hal ini sehingga berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa apabila suatu lembaga melupakan peranannya dalam proses pembangunan akan merugikan banyak pihak (Uphoff, 1986:31). Kepentingan, aspirasi, harapan-harapan berbagai pihak hanya bisa efektif disalurkan lewat wadah dan peranan lembaga karena salah satu fungsi lembaga adalah menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Pengertian lembaga berkaitan dengan organisasi dan sering digunakan secara bersama-sama sehingga membingungkan. Untuk itu Uphoff (1986:40) membuat tiga kategori, yaitu (1) organisasi yang tidak merupakan lembaga, contohnya lembaga baru pembelaan hukum, pelepasan uang dan sebagainya, (2) lembaga yang bukan merupakan organisasi, misalnya hukum, aturan dan sebagainya, (3) organisasi yang merupakan lembaga, misalnya Kantor pengadilan, lembaga-lembaga pemerintah lainnya, juga lembaga-lembaga swasta bersifat sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Kategori ketiga ini yang dipergunakan untuk pembahasan studi ini.

2.1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan Kota

2.1. 1. Tinjauan LKMD

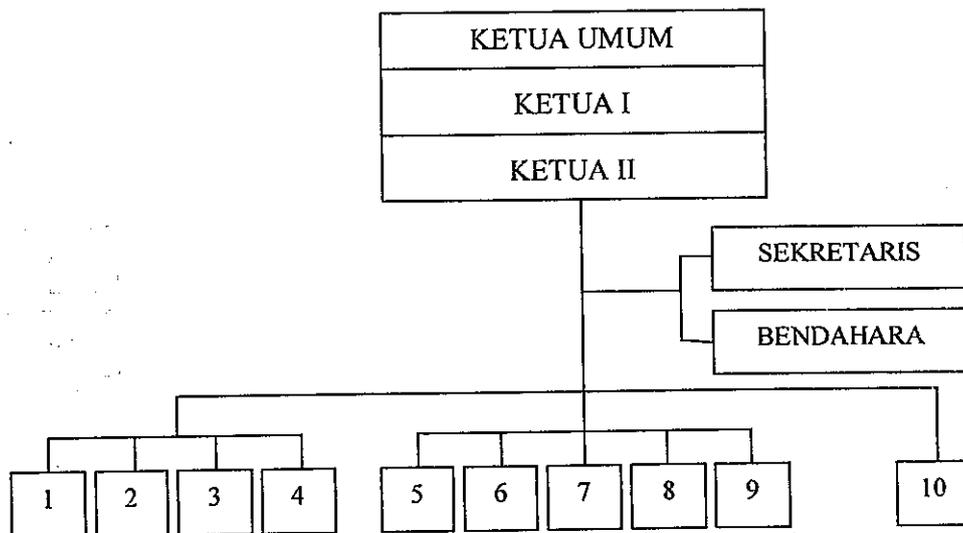
LKMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yaitu lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat LKMD merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

Dasar hukum yang melandasi berdirinya LKMD adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 1984 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Gambar II.1.

STRUKTUR ORGANISASI LKMD



Sumber : Keputusan Mendagri No.27 tahun 1984.

Keterangan susunan organisasi:

Ketua Umum, yang dijabat oleh Kepala Desa / Kelurahan

Ketua I, yang dijabat oleh tokoh masyarakat

Ketua II, yang dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan

Sekretaris

Bendahara; dan

Seksi-seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Agama
2. Seksi Pembudayaan P4
3. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Pendidikan dan Penerangan
5. Seksi Lingkungan Hidup
6. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi
7. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB
8. Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian
9. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
10. Seksi PKK

LKMD bertujuan untuk membantu Pemerintah desa/kelurahan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan. LKMD berkedudukan di desa/kelurahan dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri. Dengan struktur organisasi dan susunan organisasi terlihat pada Gambar II.1.

Seksi satu sampai seksi kesembilan berada di bawah Ketua I, dan seksi terakhir berada di bawah Ketua II. Anggota pengurus LKMD terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat termasuk pemuda dan wanita, dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa/kelurahan setempat. Pengurus dipilih dan ditentukan oleh masyarakat, dari kalangan masyarakat, dan karena jabatannya serta berdasarkan hasil pemilihan masyarakat itu sendiri maka Kepala Desa/Kelurahan menjabat Ketua Umum LKMD.

Tugas pokok LKMD adalah membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk memadukannya dengan berbagai kegiatan Pemerintah ataupun swadaya gotong-royong masyarakat serta menumbuhkan kondisi masyarakat yang dinamis untuk mengembangkan ketahanan di desa/kelurahan. Adapun fungsi LKMD adalah :

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

2. Menanamkan pengertian dan kesadaran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
3. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.
4. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.
5. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat
6. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
7. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
8. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa/kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah membawa serta konsekuensi pada organisasi LKMD. Dalam Pasal 6 Undang-undang Tahun 1999 mengatakan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001, tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain, menegaskan bahwa keberadaan LKMD tetap dipertahankan dengan melakukan modifikasi secara mendasar terutama mengenai kedudukan dan struktur kepengurusannya. Dalam Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1980 dikatakan LKMD adalah membantu pemerintah desa/kelurahan, diubah menjadi mitra pemerintah desa/kelurahan. Selain itu jabatan Ketua Umum

LKMD dan Ketua Tim Penggerak PKK yang selama ini dijabat oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Istri dipercayakan kepada tokoh masyarakat. Adapun perubahan terhadap tugas dan fungsi LKMD menurut Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

LKMD atau sebutan lain mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Sedangkan fungsi LKMD adalah sebagai berikut :

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan;
2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
3. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
4. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
5. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan.

Dalam gerak pelaksanaannya, LKMD memperoleh pembiayaan yang bersumber dari :

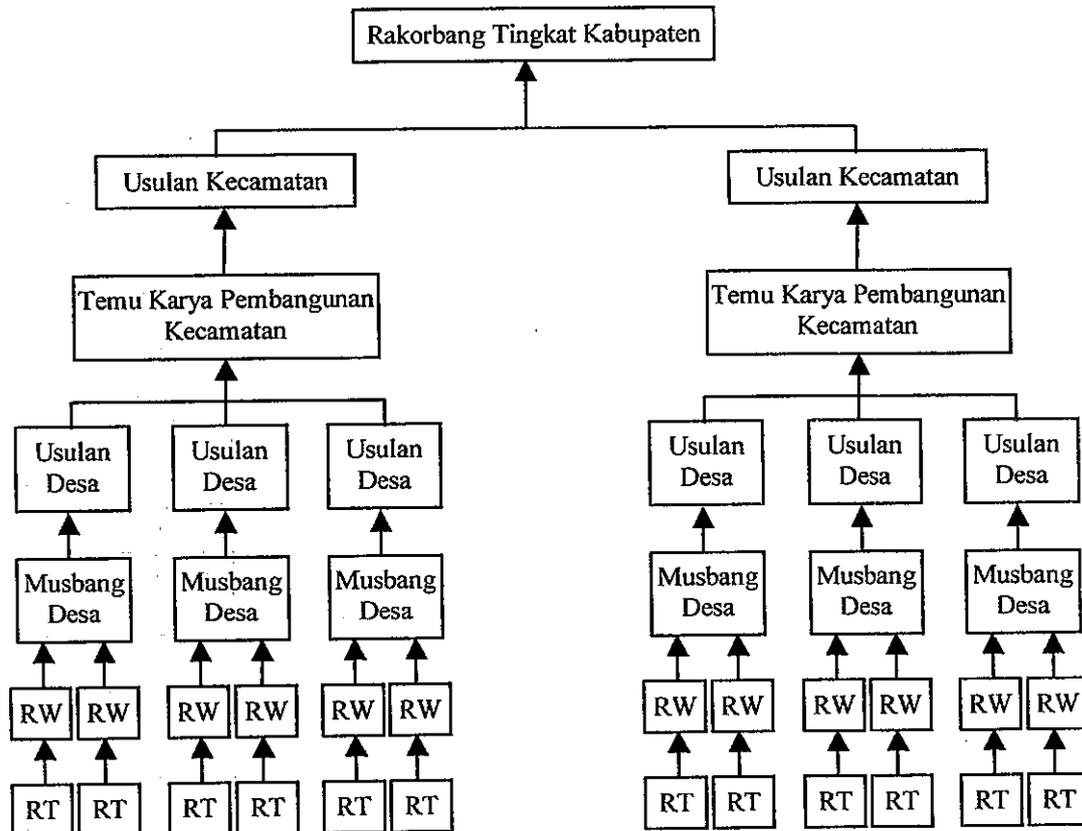
- a. Swadaya masyarakat
- b. Bantuan pemerintah dan
- c. Bantuan-bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat

2.1.2 Kedudukan LKMD Dalam Pembangunan Perkotaan

Dalam upaya memberdayakan masyarakat maka pemerintah mulai mengarahkan program-program masyarakat untuk dapat dikelola oleh masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD. Program-program yang terutama diperuntukkan dan langsung akan dinikmati masyarakat, rencana dan pelaksanaannya diharapkan dilakukan oleh masyarakat dengan lembaga kemasyarakatan yaitu LKMD (Dirjen PMD Depdagri, 1996:39).

Proses perencanaan pembangunan di daerah mengacu pada Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah (P5D). Dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan implementasi dari kebijakan umum dan kebijakan sektoral daerah masih dilaksanakan dalam bentuk forum-forum koordinasi perencanaan pembangunan dengan pendekatan yang lebih besar kepada konsultatif intensif dan bukan pada pengarah. Selain itu dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah masih akan memadukan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*), dan dari atas ke bawah (*top down*), dalam nuansa yang mengarah kepada pelaksanaan desentralisasi yang demokratis dan otonomi daerah yang lebih luas dan utuh. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut; (Gambar II.2.)

Gambar II.2
PERENCANAAN, PEMOGRAMAN DAN PENGAWASAN SECARA
BOTTOM UP UNTUK TINGKAT KECAMATAN DAN
TINGKAT DESA/KELURAHAN
MENURUT PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 1982



Sumber : Rukmana (1993) *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*.

Pendekatan *bottom up* dan *top down planning* ini untuk menampung aspirasi dari daerah dan proses penyusunan perencanaan dari bawah ini dibahas secara berjenjang melalui beberapa tahapan penyusunan di semua level pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan regional serta dilakukan oleh lembaga-lembaga perencanaan, yaitu LKMD di tingkat Desa, UDKP di tingkat Kecamatan, Rakorbang tingkat daerah Kabupaten/Kota dan Rakorbang tingkat Propinsi. Proses pembangunan perkotaan di Indonesia menurut

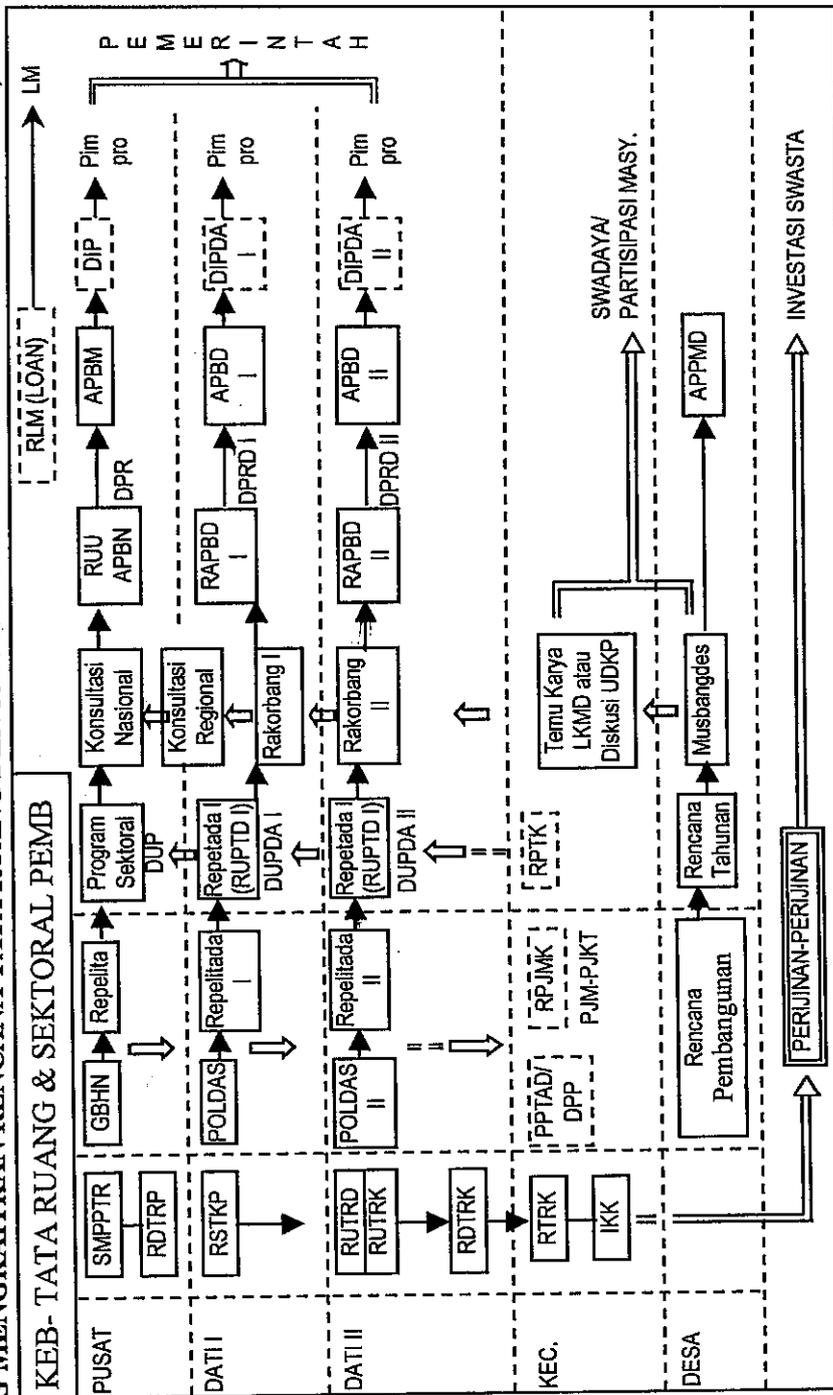
Rukmana (1993:19), dimulai dari arahan pembangunan, tahapan perencanaan, tahapan koordinasi pembangunan sampai penentuan anggaran pembangunan dan pelaksanaannya. Proses perencanaan meliputi rencana lima tahunan dan rencana tahunan, yang disusun dengan mempertimbangkan kebijaksanaan atau arahan pembangunan yang telah ada, dan rencana tata ruang yang berlaku.

Adapun pembagian pekerjaan (proyek pembangunan) dibedakan untuk setiap tingkat pemerintahan (skala proyek) dimana proses pembangunan perkotaan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar II.3. Berdasarkan gambar tersebut dikatakan bahwa kedudukan LKMD sangat penting dalam pembangunan perkotaan sebagai lembaga perencana di tingkat desa/kelurahan, yang bertugas membawa aspirasi masyarakat merepresentasikannya dalam bentuk program pembangunan dan mengusulkan serta mengupayakan agar program tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah serta pemerintah daerah dapat melaksanakannya.

2.1.3. Peranan LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan

Pembangunan prasarana dasar perkotaan merupakan bagian dari pembangunan perkotaan. Beragamnya dinamika dan kegiatan masyarakat di perkotaan, menurut Rukmana (1993:7) membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar tercipta suatu lingkungan yang mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakatnya dalam menjalani kegiatan hidupnya. Lebih jauh lagi dukungan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang lebih rumit atau berubahnya suatu fungsi lingkungan yang tidak diharapkan.

GAMBAR II.3.
PROSES PEMBANGUNAN DI PERKOTAAN
(YANG MENGAIKAITKAN RENCANA TATA RUANG DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN SEKTORAL)



KETERANGAN :

- SMPPTR : Strategi Nasional Pola Pengembangan Tata Ruang
- PPTAD : Pusat Pengembangan Terpadu Antar Desa (versi BANGDA)
- DPP : Desa Pusat Pertumbuhan (versi CIPTA KARYA)
- RPJMK : Rencana PJM Ibu Kota Kecamatan (PJM-P3KI)
- RPTK : Rencana/Program-program Pembangunan Tingkat Kecamatan (PKI, PPWKL, KPS, dll)
- APPKD : Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Keuangan Desa
- Repetada : Rencana Pembangunan Tabanan Daerah (penjabaran dari REPELITADA)
- RUPTD : Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah
- KUPTD : Kebijakan Umum Pembangunan Tahunan Daerah

Sumber : Rukmana, (1993) Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan

Di sisi yang lain sejalan dengan prioritas pembangunan nasional lebih menitikberatkan di bidang ekonomi, maka pembangunan prasarana dan sarana di perkotaan juga ditujukan untuk lebih memberikan akselerasi pada pencapaian laju perekonomian yang mantap, dengan menekankan aspek efektifitas, efisiensi serta pemerataan. Tercapainya pembangunan prasarana perkotaan yang efektif, efisien dan merata memerlukan perencanaan yang baik dalam arti terjaganya keserasian, keselarasan dan keterpaduan antar sektoral.

Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak didukung oleh prasarana atau *infrastruktur* yang memadai. Jadi prasarana dapat dianggap sebagai faktor potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah perkotaan dan pedesaan (Johara, 1994:31). **Pengertian prasarana dasar perkotaan** menurut Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Pemukiman Kota, Departemen Pekerjaan Umum (1987) adalah fasilitas prasarana pelayanan lingkungan perumahan kota yang meliputi komponen: jalan lingkungan, jalan setapak, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah/sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah rumah tangga yang dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat, dalam arti kondisi prasarana lingkungan tertata dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan serta dapat berfungsi secara optimal. Sesuai dengan kondisi tersebut, sejauh ini patokan yang digunakan oleh Dirjen Cipta Karya adalah sebagai berikut (Tabel II.1):

TABEL II.1
KEBUTUHAN PRASARANA DASAR KAWASAN PEMUKIMAN DI
PERKOTAAN

No	Komponen	Parameter
1	Jalan lingkungan	100m/Ha
2	Jalan setapak	175m/Ha
3	Kran umum	1 unit/10Ha
4	Sumur gali	1 unit/10Ha
5	Drainase tersier	350 m/Ha
6	MCK	1 unit/5Ha
7	TPS	1 unit/5Ha
8	Gerobak sampah	1 unit/5Ha

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, (1987), Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Pemukiman Kota

Ada dua macam pembangunan perkotaan, (Rukmana 1993:16) yaitu :

- a. Pembangunan perkotaan skala kotamadia atau kota kabupaten dan
- b. Pembangunan perkotaan skala kecamatan dan kelurahan

Adapun pelaku pembangunan perkotaan dalam dua macam skala pembangunan perkotaan tersebut adalah Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.

Dilihat dari pelaku pembangunan perkotaan di atas maka peranan LKMD banyak terlihat dalam pembangunan skala desa/kelurahan. Dalam setiap program pembangunan desa/kelurahan, dimaksudkan untuk membantu dan memacu masyarakat desa/kelurahan untuk membangun desa/kelurahan sendiri, yang pada akhirnya masyarakat desa mempunyai kemampuan memilih dan memberi respon terhadap perubahan yang semakin cepat sehingga ia berkuasa mengendalikan masa depannya.

Minaret Bryant & White (1982:14) karakteristik masyarakat seperti tersebut di atas adalah masyarakat yang mempunyai (1) kemampuan (*capacity*),

(2) kebersamaan dan pemerataan (*equity*), (3) pemberdayaan kekuasaan (*empowerment*), (4) kemandirian (*sustainability*), dan (5) kesaling tergantungan (*interdependency*). Sedangkan menurut Batten (1960:1), menyatakan bahwa pada dasarnya pembangunan masyarakat (pembangunan pedesaan/kelurahan) adalah suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya.

Mengingat pentingnya tugas LKMD sebagai lembaga penggerak roda pembangunan di desa/kelurahan, maka menurut Karyono (1985:115) LKMD perlu didukung oleh anggota yang mampu memahami segala permasalahan yang ada di desa/kelurahan, sehingga LKMD merupakan saluran aspirasi masyarakat desa/kelurahan yang efektif. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan strategis dalam melaksanakan pembangunan, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk dapat melaksanakan urusan-urusan administrasi pembangunan di desa/kelurahan. Selain itu perlu adanya suatu pemahaman dan peninjauan kembali terhadap semua lembaga-lembaga yang ada di desa dimana salah satunya LKMD. Lembaga tersebut akan berfungsi sesuai dengan tujuannya yaitu menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.

Menurut Taliziduhu (1987:63), partisipasi masyarakat yang diwadahi LKMD adalah merepresentasikannya dalam bentuk program pembangunan dan mengusulkan serta mengupayakan agar program tersebut tercantum dalam

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah serta pemerintah daerah dapat melaksanakannya. Peranan ini terakomodasikan dalam tugas pokok dan fungsi LKMD.

Partisipasi masyarakat yang dibahas dalam kajian pustaka ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana kota. Dalam berbagai resolusi PBB secara jelas ditunjukkan bahwa di sana ada tiga cara memandang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pertama adalah pembagian massal dari hasil-hasil pembangunan. Kedua, sumbangan massal terhadap jerih payah pembangunan. Ketiga adalah pembuatan keputusan di dalam pembangunan (Slamet, 1992:46).

Definisi partisipasi masyarakat menurut PBB di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan penyusunan rencana (tahapan perencanaan) pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam penataan ruang, sebagai salah satu wujud pembangunan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 12 Ayat 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang juga telah ditentukan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1996. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dikemukakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam kegiatan penataan ruang, maupun pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 2 dan

Pasal 6). Adapun bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, untuk tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten, yang sebagian besar mengemukakan peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian informasi, masukan, pendapat, saran, pemikiran, serta pertimbangan bagi Pemerintah. Pada beberapa bagian juga dikemukakan peran serta masyarakat dalam bentuk kerjasama, bantuan tenaga, bantuan teknik, penyelenggaraan kegiatan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta pengawasan ruang.

Dalam studi ini, lokasi penelitian adalah kota, untuk mengetahui partisipasi masyarakat kota dalam pembangunan, faktor karakteristik masyarakat kota dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pembangunan. Menurut Asy'ari (1993:59) mengatakan bahwa kesibukan masing-masing warga kota dalam tempo yang cukup tinggi dapat mengurangi perhatian mereka kepada sesamanya, termasuk anggota keluarganya sendiri. Jika hal seperti ini berlebihan maka mereka akan mempunyai sifat acuh atau kurang mempunyai sifat solidaritas sosial kelompok. Selanjutnya Asy'ari (1993:61) menambahkan bahwa hubungan sosial warga kota bersifat sangat luas, tapi terbatas, tidak intim, hubungan karena ada kepentingan dan bercorak pribadi (individu) sehingga bentuk-bentuk kegotongroyongan murni seperti yang ada di desa-desa tidak tampak.

Menurut Johara, (1994:35) partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan prasarana, terlihat didalam penyediaan prasarana berbentuk jaringan, yaitu prasarana transportasi, utilitas umum, irigasi dan pengurusan. Partisipasi masyarakatnya terlihat yaitu pada pembiayaan, pembuatan dan pemeliharaan, hal ini dapat dilihat pada Tabel II.2 mengenai bentuk, macam dan fungsi prasarana.

TABEL II.2.
BENTUK, MACAM, FUNGSI, PEMBIAYAAN, PEMBUAT DAN CARA PEMBUATAN
DAN PEMELIHARAAN DARI PRASARANA

Bentuk:	Prasarana Berbentuk jaringan	Prasarana berbentuk ruang/bangunan
Macam :	Utilitas umum (utility)	Pelayanan umum (fasilitas pelayanan)
Fungsi :	Transportasi	Perindungan
Pembiayaan :	Umum Irigasi dan pengurusan	Komunikasi
Pembuat dan pemeliharaan:		
Cara pembuatan:		

1. Sosial	1. Sosial	1. Sosial	1. Sosial
2. Ekonomi	2. Ekonomi	2. Ekonomi	2. Ekonomi
1. Masyarakat	1. Masyarakat	1. Masyarakat	1. Masyarakat
2. Badan hukum	2. Badan hukum	2. Badan hukum	2. Badan hukum
3. Pemerintah	3. Pemerintah	3. Pemerintah	3. Pemerintah
1. Masyarakat	1. Masyarakat	1. Masyarakat	1. Masyarakat
2. Badan Hukum	2. Badan hukum	2. Badan hukum	2. Badan hukum
3. Pemerintah	3. Pemerintah	3. Pemerintah	3. Pemerintah
1. Teknologi primitif.	1. Teknologi primitif.	1. Teknologi primitif.	1. Teknologi primitif.
2. Teknologi madya	2. Teknologi madya	2. Teknologi madya	2. Teknologi madya
3. Teknologi modern	3. Teknologi modern	3. Teknologi modern	3. Teknologi modern

Sumber : Johara, Jayadinata T., (1994)Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah.

2.2. Kinerja Organisasi LKMD

2.2.1. Tinjauan Kinerja Organisasi

Secara harafiah kinerja berarti daya guna, prestasi, kemampuan atau hasil (Echols & Shadily, 1988:425). Secara terminologis, kinerja merupakan terjemahan dari *performance*. Kata kinerja tersusun dari dua kata yaitu kinetika yang berarti kemampuan atau prestasi dan kerja. Oleh karena itu kinerja yang dapat diartikan dengan kemampuan kerja atau prestasi kerja (Webster Dictionary). Selain itu kinerja dapat diartikan pula sebagai suatu penampilan dari sesuatu dengan persyaratan sehingga memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan atau menyelesaikan sesuatu sesuai yang diharapkan.

Bryant dan White (1989:54), menyatakan bahwa organisasi dapat digambarkan sebagai kelompok manusia yang berhimpun bersama untuk mencapai tujuan-tujuan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya Chester A. Bernard (Thoha, 1993:144), menjelaskan bahwa organisasi sebagai suatu sistem aktivitas-aktivitas organisasi terorganisasikan secara sadar atas ketentuan-ketentuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (1986:59) menjelaskan bahwa suatu organisasi terwujud apabila ada sekelompok orang yang sepakat untuk melakukan usaha bersama demi kepentingan bersama pula. Selanjutnya organisasi dapat dipandang sebagai suatu wadah dimana berbagai kegiatan organisasional berlangsung, dan kedua sebagai suatu proses kerja sama antara kelompok orang demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Dari pendapat tersebut diatas, pengertian organisasi adalah himpunan orang-orang yang berinteraksi untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu dengan dukungan sumber-sumber daya serta berhadapan dengan kendala-kendala dalam lingkungan maupun dari luar lingkungan guna mencapai tujuan bersama, dengan demikian pengertian organisasi mengandung unsur tujuan, sumber daya, kendala dan lingkungan dalam arti bahwa terkandung unsur internal organisasi dan eksternal organisasi.

Kinerja suatu organisasi merupakan suatu gambaran hasil atau prestasi dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain bahwa untuk mengetahui keberhasilan atau prestasi suatu organisasi maka perlu diketahui dahulu kinerjanya. Untuk dapat mengukur kinerja suatu organisasi maka perlu diketahui dahulu kriterianya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dikemukakan oleh MacDonald dan Lawton dalam Keban (1995:16), bahwa penilaian kinerja organisasi dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang, dan melihat efektivitas suatu organisasi dapat dilihat dari aspek pencapaian tujuannya. Keberhasilan organisasi harus pula mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi, tetapi juga mekanisme dalam mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Tolok ukur yang sebenarnya untuk manajemen yang baik adalah kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif.

Siagian (1998:54) mengemukakan bahwa pada dasarnya suatu organisasi yang berhasil apabila mampu menampilkan kinerja tinggi dengan tingkat

efektivitas dan produktivitasnya semakin lama semakin tinggi. Adapun ciri utama organisasi berkinerja tinggi adalah :

- Mempunyai arah yang jelas untuk dicapai
- Manajemen yang berhasil menjadikan tersedia tenaga-tenaga berpengetahuan dan berketrampilan tinggi, disertai dengan semangat wirausaha.
- Para manajernya membuat komitmen kuat pada suatu rencana strategik yang diharapkan dapat membawa hasil yang menguntungkan.
- Orientasi suatu organisasi kinerja tinggi adalah hasil yang menguntungkan.
- Orientasi organisasi kinerja tinggi adalah berhasil menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya efektivitas dan produktivitas yang selalu meningkat.
- Salah satu sifat penting yang dimiliki oleh para manajer yang berhasil adalah kesediaan membuat komitmen yang mendalam pada strategi yang telah ditentukan bersama seluruh komponen organisasi.

Dalam menilai kinerja organisasi publik diperlukan kriteria yang akan menjadi landasan penilaian sehingga dapat diketahui keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Lenvine dkk (1990:246) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) konsep untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu :

1. **Responsivitas** (*Responsiveness*), yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. *Responsiveness* menunjukkan adanya keselarasan antara program-program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. *Responsiveness* dimasukkan sebagai

salah satu ukuran kinerja karena hal tersebut secara langsung menggambarkan kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya.

2. **Responsibilitas** (*Responsibility*), hal ini menyangkut tentang tanggung jawab pelaksanaan, apakah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan pedoman dan kebijakan, baik secara implisit maupun eksplisit. Peningkatan responsibilitas sering berbenturan dengan responsivitas apabila kebijakan dan prosedur administrasi dalam organisasi tidak memadai untuk menjawab dinamika yang terjadi di masyarakat.
3. **Akuntabilitas** (*Accountability*), hal ini menyangkut tentang seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari sisi internal organisasi seperti pencapaian target, tetapi juga diukur dari sisi eksternal, seperti nilai-nilai dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Menurut Ginanjar (1997:62) pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau dan dievaluasi terus menerus untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilakukan dan bagaimana hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang diinginkan. Sebagaimana organisasi pada umumnya, maka organisasi yang dibentuk pemerintah daerah sangat diharapkan mampu berperan sebagai agen pemerintah di bidangnya untuk menjalankan sebagian peranan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Tolok ukur keberhasilan dari organisasi yang dibentuk tersebut adalah dilihat dari sisi kinerjanya.

Dalam rangka menyongsong era otonomi daerah, yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, maka diperlukan adanya reformasi terhadap sistem pelayanan pemerintah daerah melalui transformasi jiwa *entreprenuership* ke dalam birokrasi pemerintahan. Menurut Osborn & Gaebler (1992), kualitas pelayanan pemerintah daerah harus direformasi dan direinventasi dengan prinsip bahwa kualitas pelayanan pemerintah daerah harus berorientasi kepada publik, dalam arti wajib memenuhi kebutuhan publik bukan kebutuhan birokrasi itu sendiri.

Menurut Cohen dalam Zaini (2000:6) faktor-faktor krisis yang dinilai untuk menentukan kualitas pelayanan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. *Tangibles* atau bukti langsung

Dengan melihat bukti langsung dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti; representatifnya fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai/staf dan sarana komunikasi yang tersedia untuk melayani kepentingan publik, maka publik dapat menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

2. *Reliability* atau keandalan

Merupakan faktor yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan secara tepat, akurat dan memuaskan.

3. *Responsiveness* atau daya tanggap

Merupakan faktor yang menggambarkan adanya keinginan dari para staf pemerintah daerah untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada publik dengan tanggap.

4. *Assurance* atau jaminan

Assurance atau jaminan yang diberikan oleh pemerintah daerah bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar didukung oleh staf yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang memadai, memiliki kesopanan dan sifat dapat dipercaya.

5. *Emphaty*

Emphaty yang mencerminkan pelayanan pemerintah daerah yang mudah dan tidak berbelit-belit, baik dalam melakukan hubungan dan berkomunikasi dengan staf yang melayani maupun perhatian pribadi dari staf pemerintah daerah dalam memahami kebutuhan publik.

2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Dalam mencapai tujuan organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan secara keseluruhan yang mencakup segi internal dan eksternal organisasi yang oleh Steers (1985) dikatakan bahwa pengaruh lingkungan internal yaitu menciptakan Millieu kultur dan sosial tempat berlangsungnya kearah tujuan atau iklim organisasi, dan gambaran perubahan yang terjadi pada internal organisasi misalnya perubahan tujuan organisasi tersebut atau dengan kata lain merupakan faktor di dalam organisai yang mempengaruhi mekanisme organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya pengaruh lingkungan eksternal yaitu perubahan kondisi ekonomi, situasi politik atau semakin besarnya tuntutan yang ditujukan pada organisasi dari masyarakat, lembaga atau instansi lain diluar organisasi tersebut, atau dengan kata lain merupakan kekuatan-kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi tetapi mempengaruhi keputusan dan tindakan organisasi.

Dikaitkan dengan faktor eksternal, Haryanto (1992:45), menyatakan bahwa suatu unit tidak mungkin dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa dibantu oleh unit lainnya, oleh karena itu setiap unit mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan dari fungsi unit lainnya apabila organisasi tersebut ingin dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sedangkan dikaitkan dengan faktor internal, Steers (1985) juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan akhir suatu organisasi tidak lepas dari karakteristik organisasi, lingkungan, pekerja, serta kebijakan dan praktek manajemen. Sedangkan dikaitkan dengan karakteristik pekerja yang tidak lepas dari unsur kemampuan yang merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengalaman. Dengan demikian kemampuan tergantung pada ketrampilan dan pengetahuan yang merupakan determinan yang dapat diperoleh pendidikan formal, non formal yang dapat menunjang kecakapan seseorang.

George Homans (Arief, 1985:87), menyatakan bahwa organisasi terdiri dari sistem lingkungan luar (*Eksternal Environment*) dan sistem lingkungan dalam (*Internal Environment*), yang melingkupi organisasi dimaksud dalam menciptakan hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian faktor eksternal dan faktor internal mempunyai keterkaitan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Tingkat keterdugaan keadaan lingkungan
- Ketepatan persepsi terhadap keadaan lingkungan
- Pengertian rasionalitas dan tindakan organisasi

Dari pernyataan tersebut bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi keadaan lingkungan sangat erat hubungan dengan kemampuan sejauh mana organisasi menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya dalam mencapai keberhasilan. Dalam hal ini semakin besar kepastian organisasi akan keberadaan dalam lingkungannya akan semakin besar pula peluang organisasi melakukan kesesuaian atau keterdugaan keadaan lingkungan dan juga makin besar pula potensi organisasi untuk memberikan tanggapan yang tepat.

Sehubungan dengan faktor internal dan faktor eksternal dalam arti pengaruh lingkungan terhadap kegiatan seperti organisasi, Bryant and White (1989:65) mengemukakan dua alasan yang menyebabkan lingkungan menjadi penting untuk sebuah organisasi karena pertama, lingkungan dapat menyediakan sumber-sumber daya dan kedua lingkungan menawarkan batas dan kendala. Dengan demikian suatu organisasi perlu menghimpun sebanyak mungkin sumber daya serta perlu melindungi diri terhadap tindakan-tindakan serta ancaman pihak lain. selain itu organisasi semaksimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan bagaimana secara efektif mengatasi kendala-kendala baik dari dalam lingkungan maupun diluar organisasi.

2.3. Pengertian tentang Persepsi

Persepsi menurut Frandsen yang dikutip oleh Bimo Walgito (1975:78) menyatakan bahwa proses persepsi individu memberi arti atau interpretasi. Jalaluddin Rahmad juga mengutip pendapat Desiderato tentang persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa dan hubungan yang diperoleh dengan

mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan (Jalaluddin Rahmad, 1988:57).

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah hasil pengolahan dari data yang diperoleh dari pengalaman dan pengamatan.

Hal ini berarti sifatnya selektif, karena tergantung pada kepentingan individu. Persepsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) persepsi merupakan hasil pengamatan, dan (2) persepsi merupakan hasil pemikiran dan hasil pengolahan akal terhadap data inderawi atau sensor stimuli yang diperoleh dari pengamatan. Dengan demikian persepsi individu berbeda, perbedaan persepsi ini dipengaruhi, ketajaman daripada alat indera dan akal dalam mengolah data serta faktor-faktor lain yang berasal dari individu itu sendiri maupun dari luar lingkungan.

Akan tetapi persepsi selain tergantung pada sifat-sifat rangsangan fisis, juga tergantung pada hubungan rangsangan dengan medan sekelilingnya dan kondisi dalam individu. Proses munculnya persepsi yang beda terhadap satu rangsang yang sama ada tiga tahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

1. Penerimaan rangsangan secara selektif. (*Selective exposure*)

Mustahil seseorang akan menerima semua rangsangan yang diterima, rangsangan tersebut tentunya akan diseleksi. Dominasi seleksi dilakukan pada rangsangan yang mereka harapkan atau rangsangan menawarkan sesuatu yang lebih baik/unggul dengan cara yang menarik.

2. Perubahan makna secara selektif (*Selective Distortion*)

Perubahan makna dari rangsangan yang diperhatikan konsumen, akan diselaraskan dengan keadaan mental pada saat itu. Karena perubahan makna secara selektif menggambarkan kecenderungan orang untuk mengartikan rangsangan sesuai dengan pengertiannya, maka kecenderungan tersebut mendukung konsepsi yang sebelumnya telah ada daripada membantahnya.

3. Mengingat kembali secara selektif (*Selective Retention*)

Sikap dan kepercayaan konsumen terhadap suatu rangsangan yang bersifat selektif, akan memudahkan pemasar dalam pengingatannya kembali. Maksudnya adalah mereka cenderung mengingat kembali informasi yang mendukung sikap dan kepercayaannya tersebut. Tahapan-tahapan dalam persepsi di atas memberikan gambaran kepada para pelamar untuk bekerja keras dalam penyampaian pesan. Sebab kondisi persaingan hidup yang semakin kompetitif dan perkembangan teknologi informasi yang canggih serta perubahan lingkungan yang semakin dinamis, merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga penyampaian informasi tentang pembangunan dengan menonjolkan pemenuhan kebutuhan manusia bisa diterima sebagai sikap dan kepercayaan masyarakat.

Sikap dan kepercayaan merupakan faktor yang mempengaruhi pandangan dan perilaku seseorang. Sikap itu sendiri mempengaruhi kepercayaan dan juga mempengaruhi sikap. Menurut David Krech, Richard S dan Egerton L. B. tentang sikap yang dikutip Jalaludin Rakhmat (1988:203), adalah :

Sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun tidak, perasaan-perasaan emosional, dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa obyek atau gagasan.

Sikap yang didasarkan pada kepercayaan tertentu, dimana kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu akan menempatkan seseorang dalam suatu kerangka berfikir, menyukai atau tidak menyukai suatu obyek, menghampiri atau menjauhi, mendukung atau menentangnya.

2.4. Rangkuman

Menilai Kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan harus dilihat :

1. Implementasi tugas dan fungsi LKMD yang terkait dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/evaluasi pembangunan.
2. Persepsi masyarakat mengenai kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan terhadap responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.
3. Hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan yang diukur dengan besarnya fasilitas pelayanan kebutuhan prasarana dasar kawasan pemukiman di perkotaan.

Dari hasil kajian pustaka dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

(Tabel II.3).

TABEL II.3.
PERATURAN-PERATURAN DAN PENDAPAT BEBERAPA PAKAR TENTANG KINERJA ORGANISASI LKMD
DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN

No.	Peraturan/ Pakar	Variabel yang Dipeertimbangkan	Variabel yang Terbetuk	Indikator yang Dikaji
1	Keppres RI No. 28 Th. 1980 tentang Penyempurnaan Fungsi LSD menjadi LKMD, Keppmendagri No. 27 Th 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD	<p>Tugas dan fungsi LKMD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wadah aspirasi masyarakat. 2. Menggali dan memanfaatkan potensi gotong royong. 3. Menanamkan kesadaran P4. 4. Sarana komunikasi. 5. Peningkatan pengetahuan dan keampilan. 6. Membina potensi muda. 7. Meningkatkan peranan wanita. 8. Membina kerja sama antar lembaga. 9. Membantu pemerintah desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan fungsi LKMD 2. Persepsi masyarakat tentang kinerja LKMD 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi dalam perencanaan pembangunan. 2) Implementasi dalam pelaksanaan pembangunan. 3) Implementasi dalam pengendalian pembangunan. 1) Terhadap Responsivitas LKMD dalam : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengenali kebutuhan masyarakat. b. Penyusunan rencana kerja. c. Penampungan wadah aspirasi masyarakat. 2) Terhadap Responsibilitas LKMD dalam : <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme pelaksanaan program kerja. b. Membina kerjasama antar lembaga. c. Sarana komunikasi. 3) Terhadap Akuntabilitas LKMD dalam : <ol style="list-style-type: none"> a. Pertanggungjawaban secara internal : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pengurus. 2. Adanya arah program kerja yang jelas. 3. Berorientasi pada pencapaian tujuan (komitmen pengurus). 4. Mekanisme pencapaian tujuan (jadwal kerja dan pemanfaatan sumber daya) b. Pertanggungjawaban secara eksternal : <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterpenuhinya kebutuhan masyarakat (efektivitas dan efisiensi) hasil pembangunan. 2. Keterlibatan masyarakat.
2	Keppres No. 49 Th 2001 Pasal 3 tentang Tugas dan Fungsi LKMD	<p>Tugas dan fungsi LKMD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. 3. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan. 4. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu. 5. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan. 		
3	Permendagri No. 9 Th. 1982 tentang PSD	<p>Perencanaan pembangunan daerah memadukan perencanaan <i>bottom up</i> dan <i>top down</i> mulai dari LKMD di tingkat desa/ kelurahan.</p>		
4	Keban	<p>Efektivitas organisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian tujuan. • Mekanisme pencapai tujuan. • Memanfaatkan sumber daya. 		

No.	Peraturan/ Pakar	Variabel yang Dipertimbangkan	Variabel yang Terbenruk	Indikator yang Dikaji
5	Siagian	<p>Organisasi berkinerja tinggi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punya arah jelas. • Ada SDM kualitas tinggi. • Komitmen kuat pada perencanaan strategis. • Berorientasi pada tujuan. • Tumbuhnya efektivitas dan produktivitas. 	3. Hasil Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan	1) Jalan Lingkungan ($\geq 3,5$ meter) 2) Jalan Setapak (1 – 3,5 meter) 3) Kran Umum/Air Bersih Umum 4) Sumur Gali Umum 5) Drainase Tersier 6) MCK Umum 7) Tempat Penampungan Sementara (TPS) Persampahan
6	Levine	<p>Pengukuran kinerja organisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsivitas. • Responsibilitas. • Akuntabilitas. 		
7	Karyono	<ul style="list-style-type: none"> • LKMD merupakan saluran aspirasi masyarakat desa yang efektif. • Kualitas pendidikan LKMD merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam perencanaan dan pelaksanaan. • Tercapainya tujuan pembangunan di desa sangat tergantung pada tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 		
8	Louise G. White	<p>Karakteristik masyarakat yang mempunyai respon terhadap perubahan yang semakin cepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan. • Kebersamaan • Kemerataan. • Pemberdayaan kekuasaan. • Kemandirian dan • Saling ketergantungan. 		
9	Batten	<p>Pembangunan masyarakat adalah proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana tersebut.</p>		
10	Taliziduhu Ndraha	<p>Indikator keberhasilan pembangunan desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan partisipasi masyarakat. • Kemampuan masyarakat berkembang mandiri. 		
11	Osborn dan Gaebler	<p>Pelayanan pemerintah di daerah wajib memenuhi kebutuhan publik.</p>		

No.	Peraturan/ Pakar	Variabel yang Dipertimbangkan	Variabel yang Terbentuk	Indikator yang Dikaji
12	Cohen	Faktor-faktor yang menentukan kualitas pelayanan adalah bukti langsung <i>reability</i> , <i>responsiveness</i> , <i>assurance</i> , dan <i>emphaty</i>		
13	Jallaluddin Rahmat	Tahap-tahap persepsi : <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan rangsangan secara selektif. • Perubahan makna secara selektif. • Mengingat kembali secara selektif. 		
14	Taliziduhu Ndraha	Indikator keberhasilan pembangunan desa: Tingkat keberhasilan perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat.		
15	Cohen	Bukti kualitas layanan publik adalah dengan melihat bukti langsung (<i>angibles</i>) layanan yang diberikan, representasi fasilitas fisik.		
16	Zaeni	Ukuran kinerja dapat berupa faktor kesuksesan organisasi saat ini dan masa yang akan datang.		
17	Johara	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana (<i>infrastructure</i>) adalah alat (mungkin tempat) yang paling utama, dalam kegiatan ekonomi. • Prasarana dapat dianggap sebagai faktor potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah perkotaan dan pedesaan. • Terdapat partisipasi masyarakat pada pembiayaan, pembuatan dan pemeliharaan dalam penyediaan prasarana yang berbentuk jaringan: Macam: - Transportasi - Utilitas umum. - Irigasi/ pengurusan 		

No.	Peraturan/ Pakar	Variabel yang Dipertimbangkan	Variabel yang Terbentuk	Indikator yang Dikaji
18	Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Pemukiman Kota, Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1987.	Variabel yang Dipertimbangkan Prasarana dasar perkotaan adalah fasilitas pelayanan prasarana lingkungan perumahan kota yang dibangun untuk menjamin kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat, meliputi komponen : 1. Jalan lingkungan. 2. Jalan setapak. 3. Kran umum/ air bersih. 4. Sumur gali. 5. Drainase tersier. 6. MCK. 7. Tempat Penampungan Sementara (TPS) Persampahan		
19	Steers	Organisasi dipengaruhi oleh lingkungan eksternal : instansi lain, kondisi sosial ekonomi.		

2.5. Definisi Operasional Penelitian

Seringkali tanggapan umum mengenai suatu istilah berlainan sekali dengan arti yang diberikan dalam ilmu-ilmu sosial. Untuk menegaskan atau menyamakan pendapat beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, peneliti mendefinisikan istilah-istilah sesuai dengan pemakaiannya. Adapun beberapa istilah tersebut antara lain dapat dilihat dalam Tabel II.4.

TABEL II.4
DEFINISI OPERASIONAL PENELITIAN

Istilah	Definisi Operasional
Kinerja LKMD	Gambaran kemampuan kerja LKMD dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk perbaikan atau peningkatan kemampuan kerja organisasi dimasa yang akan datang.
Kinerja LKMD terhadap Responsivitas	Kemampuan kerja organisasi LKMD untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
Kinerja LKMD terhadap Responsibilitas	Kemampuan kerja organisasi LKMD yang menyangkut tentang tanggung jawab pelaksanaan, apakah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, baik secara implisit maupun eksplisit.
Kinerja LKMD terhadap Akuntabilitas	Kemampuan kerja organisasi LKMD yang menyangkut tentang seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari sisi internal organisasi seperti pencapaian target, tetapi juga diukur dari sisi eksternal seperti nilai-nilai dan kebutuhan yang ada di masyarakat.
Prasarana Dasar Perkotaan	Fasilitas pelayanan prasarana lingkungan perumahan kota yang meliputi komponen: jalan lingkungan, jalan setapak, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah/sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah rumah tangga, yang dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA KARANGANYAR

3.1. Gambaran Umum Kota Karanganyar

Kota Karanganyar terletak di wilayah Jawa Tengah bagian timur, tepatnya berada di dalam wilayah Kabupaten Karanganyar, berjarak 15 km kearah timur Kotamadya Surakarta. Secara geografis, Kota Karanganyar terletak pada garis lintang antara 110°07' – 110°10' BT dan 7°34' – 7°37' LS di kaki Gunung Lawu, ketinggian rata-rata Kota Karanganyar adalah 350 m di atas permukaan air laut.

Secara administratif wilayah Kabupaten Karanganyar terbagi atas 17 Kecamatan dan 177 Desa/Kelurahan. Untuk arahan penetapan pengembangan Wilayah Kota Karanganyar berdasarkan Penyusunan Rencana Induk Kota Karanganyar (Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1993) terdiri dari 8 Kelurahan di Kecamatan Karanganyar dan 3 desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Jaten dan Kecamatan Tasikmadu, dengan luas wilayah 1.650,10 Ha. Adapun kelurahan/desa itu antara lain:

Wilayah Kecamatan Karanganyar, meliputi :

- Kelurahan Karanganyar
- Kelurahan Bejen
- Kelurahan Jungke
- Kelurahan Tegalgede
- Kelurahan Cangkanan
- Kelurahan Jantiharjo
- Kelurahan Lalung
- Kelurahan Popongan

Wilayah Kecamatan Jaten, meliputi:

- Desa Jati

Wilayah Kecamatan Tasikmadu, meliputi:

- Desa Papahan
- Desa Ngijo

Batas-batas Kota Karanganyar yaitu :

Sebelah Barat : Desa Jati dan Desa Papahan

Sebelah Timur : Desa Tegalgede dan Desa Popongan

Sebelah Selatan : Kelurahan Lalung dan Kelurahan Jantiharjo

Sebelah Utara : Desa Pandean, Desa Suruh, Desa Gaum dan Desa Gedong

Rincian luas dan persentase masing-masing kelurahan/desa yang masuk dalam

Kota Karanganyar dapat dilihat pada tabel (Tabel III.1) sebagai berikut:

TABEL III.1.

**LUAS DAERAH DAN PERSENTASE KELURAHAN/DESA
YANG MASUK DALAM KOTA KARANGANYAR**

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas Kelurahan/ Desa yang Masuk Wilayah Kota (Ha)	Luas Administratif Kelurahan/Desa (Ha)	Persentase (%)
1	Karanganyar	Karanganyar	52,15	52,15	100,00
2	Karanganyar	Bejen	385,49	385,49	100,00
3	Karanganyar	Jungke	187,68	187,68	100,00
4	Karanganyar	Tegalgede (sebagian)	238,10	385,63	61,74
5	Karanganyar	Cangkalan	148,70	148,70	100,00
6	Karanganyar	Jantiharjo (sebagian)	100,75	325,00	31,00
7	Karanganyar	Lalung (sebagian)	130,88	403,19	32,46
8	Karanganyar	Popongan (sebagian)	71,16	348,16	20,43
9	Jaten	Jati (sebagian)	82,67	265,47	31,14
10	Tasikmadu	Papahan (sebagian)	92,86	229,37	40,48
11	Tasikmadu	Ngijo (sebagian)	159,64	234,76	68,00
		Luas Total	1.650,10	2.965,60	55,64

Sumber : RDTRK Kota Karanganyar 1994/1995 - 2004/2005

3.2. Penggunaan Lahan dan Jumlah Penduduk

Luas wilayah Kota Karanganyar secara menyeluruh adalah seluas 1.650,10 Ha. Menurut data penggunaan lahan dari BPN tahun 2002, penggunaan tanah sawah seluas 804,16 Ha atau 48,73% sedangkan penggunaan tanah kering berupa pekarangan, kolam, perkebunan, dan penggunaan tanah untuk lain-lain seluas 845,93 Ha atau 51,27% dari seluruh luas wilayah Kota Karanganyar.

Permukiman terkonsentrasi di Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Jungke, sebagian Kelurahan Bejen, Kelurahan Cangakan dan di sepanjang jalan Lawu dengan kerapatan bangunan sedang. Pada Kelurahan Tegalgede, Jati, Lalung, Papahan dan Ngijo sebagian besar merupakan campuran antara permukiman dan pertanian.

Berdasarkan data tahun 2002, jumlah penduduk Kota Karanganyar sebanyak 39.137 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir rata-rata 0,92 %, secara administratif kepadatan penduduk rata-rata sebesar 56 jiwa/Ha. Jumlah penduduk Kota Karanganyar dan persebaran di masing-masing kelurahan/desa serta pertumbuhan penduduk lima tahun terakhir dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada Tabel III.3.

TABEL III.2.
LUAS DAERAH MENURUT POLA PENGGUNAAN LAHAN
KOTA KARANGANYAR

No	Kelurahan	Tanah Sawah				Tanah Kering					Luas (Ha)
		Teknis (Ha)	½ Teknis (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Jumlah (Ha)	Pekarangan (Ha)	Kebun (Ha)	Kolam (Ha)	Lainnya (Ha)	Jumlah (Ha)	
1	Karanganyar	-	-	-	-	44,99	-	-	7,16	52,15	52,15
2	Bejen	130,18	-	13,19	143,37	212,21	17,30	-	12,61	242,12	385,49
3	Cangkalan	69,85	-	-	69,85	61,88	-	-	16,97	78,85	148,70
4	Tegalgede	-	96,22	-	96,22	131,12	4,35	-	6,41	141,88	238,10
5	Jungke	126,03	-	0,25	126,28	55,16	-	-	6,24	61,40	187,68
6	Popongan	15,00	26	-	41,00	25,15	-	-	5,01	30,16	71,16
7	Jantiharjo	-	66	-	66,00	17,00	9,00	-	8,75	34,75	100,75
8	Lalung	95,54	-	-	95,54	30,34	-	-	5,00	35,34	130,88
9	Jati	62,73	-	-	62,73	11,69	0,69	-	7,57	19,94	82,67
10	Papahan	45,47	-	-	45,47	43,28	-	0,20	3,93	47,41	92,87
11	Ngijo	99,48	-	-	99,48	55,24	-	0,10	4,82	60,16	159,64
	Jumlah	644,27	188,22	13,44	804,16	688,06	31,34	0,31	84,46	845,93	1650,10
	Prosentase (%)	39,04	11,41	0,81	48,73	41,70	1,90	0,02	5,12	51,27	100,00

Sumber : BPN tahun 2002.

TABEL III.3.
JUMLAH, PERSEBARAN, PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN
PENDUDUK DI KOTA KARANGANYAR TAHUN 2003

No	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)	Luas Pemukiman (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Karanganyar	52,15	44,99	4.962	0,39	109
2	Bejen	385,49	212,21	8.238	1,40	38
3	Cangkalan	148,70	61,88	4.875	0,87	77
4	Tegalgede	238,10	131,12	4.844	1,20	36
5	Jungke	187,68	55,16	4.421	0,90	79
6	Popongan	71,18	25,15	1.171	1,05	46
7	Jantiharjo	100,75	17,00	1.694	0,67	98
8	Lalung	130,88	30,34	2.144	1,82	68
9	Jati	82,67	11,69	889	1,00	75
10	Papahan	92,87	43,28	2.293	0,47	52
11	Ngijo	157,64	55,24	3.641	0,67	65

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Karanganyar, 2002.

3.3. Kebijakan Pembangunan Kota Karanganyar

Dalam meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan wilayah Kota Karanganyar, mengacu kepada Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 21

tahun 1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, kebijakan pemerintah daerah yang ditempuh dalam pembangunan kota meliputi pengembangan dan pematapan sistem perkotaan dan produktivitas kota, peningkatan pembangunan perkotaan secara terencana dan terpadu, peningkatan kualitas lingkungan fisik dan sosial ekonomi serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.

Program-program yang dilaksanakan untuk implimentasi kebijakan antara lain:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana kota.
- b. Peningkatan sistem administrasi pertanahan dan penataan ruangan.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian.
- d. Peningkatan pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pematapan kelembagaan pemerintah.

Pembangunan Kota juga mencakup aspek pembangunan perumahan dan pemukiman di wilayah Kota Karanganyar, kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan pemukiman terdiri atas Program Perumahan Rakyat, Program Penyehatan Lingkungan dan Program Penyediaan Air Bersih. Selain itu dilaksanakan kegiatan penunjang antara lain pengembangan sistem pembiayaan, pengembangan teknologi perumahan dan pemukiman yang memberikan dukungan operasional dalam rangka pembangunan fisik perumahan dan pemukiman, pematapan dan peningkatan kelembagaan serta penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Prioritas program kegiatan yang dilaksanakan pada kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman ini meliputi:

- a. Peningkatan jumlah dan mutu perumahan yang layak huni dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Peningkatan sistem pembuangan limbah dan drainase.
- c. Peningkatan pengelolaan limbah padat rumah tangga dan penyuluhan tentang perilaku hidup sehat.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perumahan dan pemukiman sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah
- e. Pemantapan sistem kelembagaan dan pola pengelolaan pembangunan perumahan dan pemukiman secara terpadu.

Sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam bidang pembangunan perkotaan sampai akhir tahun 2005 (PJM-Prasarana Dasar Pemukiman Kota Karanganyar TA.1997-1998) adalah bahwa semua kampung di perkotaan harus dilengkapi dengan prasarana dasar yang dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat.

Implementasi dari kebijakan pembangunan perkotaan yang sudah dilaksanakan untuk pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar adalah dengan adanya proyek P3KT, KIP, P2P, PSDPU serta proyek swadaya masyarakat yang ditujukan untuk pemenuhan prasarana dasar perkotaan.

Untuk mencapai sasaran pemenuhan fasilitas prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar telah ditetapkan standar untuk pelayanan fasilitas prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar yang mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Pemukiman Kota, Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1997 untuk Kota Karanganyar (Rencana Strategis DPU dan LLAJ Kabupaten Karanganyar) sebagai berikut (lihat Tabel III.3).

TABEL III.4.

**STANDAR PELAYANAN PERBAIKAN LINGKUNGAN PERUMAHAN
KOTA, PLPK/KIP KOTA KARANGANYAR**

No	Komponen	Parameter
1.	Jalan Lingkungan	50 m/Ha
2.	Jalan Setapak	150 m/Ha
3.	Kran Umum/Air Bersih Umum	1 Unit/10 Ha
4.	Sumur Gali Umum	1 Unit/10Ha
5.	Drainase Tersier	300 m/Ha
6.	MCK Umum	1 Unit/5 Ha
7.	Tempat Penampungan Sementara (TPS) Persampahan	1 Unit/5 Ha

*Sumber : PJM Prasarana Dasar Pemukiman Kota Karanganyar
TA 1997-1998.*

3.4. Proses Pembangunan Kota Karanganyar

Proses pembangunan kota Karanganyar, dimulai dari kebijakan pembangunan, tahapan perencanaan, tahapan koordinasi pembangunan sampai penentuan anggaran pembangunan dan pelaksanaannya, baik pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan Kota Karanganyar meliputi rencana lima tahunan dan rencana tahunan, yang disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang telah ada, dan rencana tata ruang yang berlaku.

Mekanisme perencanaan pembangunan mengacu pada Permendagri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) hingga saat ini masih relevan dan sesuai dengan jiwa dan semangat pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 1999 (lihat Gambar III.1).

Adapun tahap-tahap dalam mekanisme perencanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Musyawarah Pembangunan (Musbang) LKMD/LPMD Tingkat Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari-Februari

2. Tahap Kedua

Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan /Diskusi UDKP, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Pebruari-Maret

3. Tahap Ketiga

Rapat Koordinasi Pembangunan Kabupaten Karanganyar, kegiatan dilaksanakan pada bulan Maret-Juli

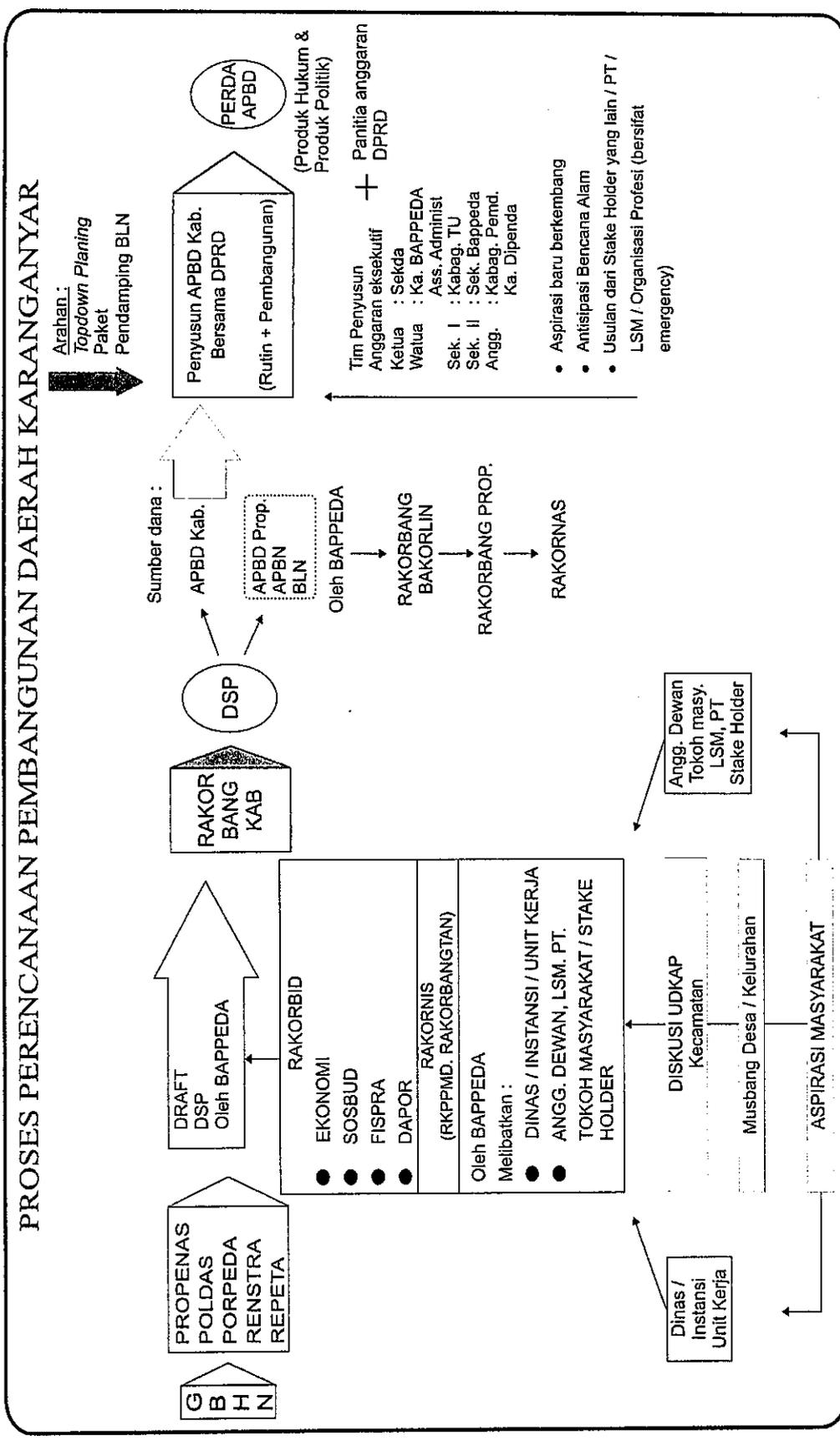
4. Tahap Keempat

Konsultasi intern BAPPEDA Propinsi /Rapat Koordinasi Pembangunan Propinsi dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus.

5. Tahap Kelima

Konsultasi Nasional BAPPEDA diselenggarakan pada bulan Oktober-Nopember.

GAMBAR III.1



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Karanganyar, 2003

Dalam mencapai sasaran setiap program pembangunan khususnya pada pembangunan prasarana dasar perkotaan tersebut, pada setiap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Bupati Karanganyar kepada DPRD Kabupaten Karanganyar; dilaporkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar menyadari bahwa pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar membutuhkan peran serta masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan. keharusan adanya pelibatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yaitu:

- Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan dan urusan sangat terbatas, dengan peran serta masyarakat, maka beban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan akan lebih ringan..
- Dengan melibatkan masyarakat maka setiap program yang berkaitan langsung dengan masyarakat dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.
- Potensi dan sumber daya masyarakat secara optimal dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Dengan peran serta masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat melahirkan sikap "*Roso Handarbeni*", rasa memiliki dan tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga karya yang dihasilkan.

Menyadari akan arti dan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kota Karanganyar tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara terus menerus mendorong dan memotivasi masyarakat untuk secara

intensif dan berkesinambungan meningkatkan peran serta masyarakat dengan program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kota Karanganyar.

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam pembangunan Kota Karanganyar adalah sebagai berikut: (Sumber BAPPEDA Kabupaten Karanganyar, 2003)

1. Pemerintah, untuk proyek-proyek pembangunan perkotaan yang dibiayai oleh APBD dan masuk dalam DIPDA, setelah sebelumnya dikoordinasikan dalam Rakorbang Tingkat kabupaten. Untuk proyek pembangunan perkotaan melalui RPTK (Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan) yang sudah diajukan, ke tingkat yang lebih tinggi (Daerah Tingkat Kabupaten) dalam DUPDA dan proyek-proyek kecamatan tersebut jika diterima nantinya akan dikoordinasikan dahulu pada Rakorbang Tingkat Kabupaten. Serta untuk proyek pembangunan perkotaan melalui hasil temu karya LKMD atau diskusi UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) yang diadakan di tingkat kecamatan yang diusulkan dalam Rakorbang Tingkat Kabupaten.
2. Masyarakat bersama-sama dengan LKMD, yang melaksanakan pembangunan secara swadaya masyarakat, yaitu pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan yang dibiayai oleh masyarakat sendiri/swadaya masyarakat.. Pembangunan yang dilakukan secara swadaya ini adalah proyek-proyek pembangunan yang telah dibicarakan dalam Rembug Desa dan dalam Temu Karya LKMD atau diskusi UDKP. Dalam pembangunan swadaya masyarakat, terutama untuk pembangunan skala kelurahan/desa, dikenal adanya APPKD, yaitu Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Keuangan Desa.

3. Swasta, yang menanamkan investasi untuk pembangunan daerah pada proyek-proyek yang strategis, dan biasanya yang membutuhkan bantuan teknologi yang lebih maju. Penanaman investasi swasta dalam pembangunan daerah harus melewati perjinan-perijinan ataupun rencana-rencana pembangunan dari tingkat nasional (pusat) sampai ke tingkat terendah proyek itu dilaksanakan.

3.5. Peranan LKMD Dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan di Kota Karanganyar.

Dilihat dari pelaku pembangunan Kota Karanganyar tersebut diatas peranan LKMD dalam pembangunan Kota Karanganyar banyak terlihat dalam pembangunan skala kelurahan/desa saja, terutama di tingkat lingkungan RW/RT.

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan di pusat kota biasanya ditangani langsung oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar tanpa banyak melibatkan masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun dalam pengelolaan, dengan alasan bahwa pusat kota merupakan cermin wajah kota, karena itu perlu direncanakan dan ditata sebaik-baiknya, sehingga perencanaan serta penataan pusat Kota Karanganyar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, dalam arti mekanisme *top down* lebih dominan.

Selain itu peranan LKMD dalam pembangunan Kota Karanganyar daerah diwujudkan dalam bentuk mengkoordinir swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat ada dua jenis, yaitu: swadaya murni yang berupa pungutan resmi kepada masyarakat yang disepakati bersama yang dituangkan dalam APPKD, sedangkan jenis yang kedua berupa swadaya murni masyarakat yang digunakan

untuk membiayai kegiatan atau proyek yang direncanakan sendiri oleh masyarakat setempat yang dikoordinir oleh LKMD.

Pembangunan prasarana dasar perkotaan dengan melibatkan LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan merupakan indikator kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya warga masyarakat di wilayah Kota Karanganyar.

3.6. Tinjauan LKMD di Kota Karanganyar

LKMD di Kota Karanganyar dibentuk sejak diberlakukannya:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 1984 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah membawa serta konsekuensi pada organisasi LKMD. Dalam Pasal 6 Undang-undang Tahun 1999 mengatakan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Pasal 45 menyatakan : (1) dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai

dengan kebutuhan seperti LKMD, dan PKK atau dengan sebutan lain, (2) lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa atas prakarsa masyarakat desa yang bersangkutan.

Mengacu pada landasan yuridis tersebut di atas terdapat perubahan pada LKMD Kota Karanganyar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan. Nama LKMD diubah menjadi LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dengan kedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Lembaga ini mempunyai tugas:

1. Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut LPMD mempunyai fungsi:

1. Menampung aspirasi masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

ANALISIS KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN DI KOTA KARANGANYAR

4.1. Identifikasi tugas dan fungsi LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar

Sebelum dilakukan identifikasi terhadap implementasi tugas dan fungsi LKMD yang terkait dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai tugas dan fungsi LKMD yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada selama ini (Tabel IV.1).

Dari tabel IV.1. terlihat bahwa tugas dan fungsi LKMD yang terkait dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Dalam perencanaan pembangunan adalah:
 - Manampung aspirasi masyarakat.
 - Menyusun perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
 - Membantu Pemerintah Kelurahan/Desa dalam perencanaan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah.
- b. Dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
 - Meningkatkan peran serta masyarakat/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
 - Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- Membantu Pemerintah Kelurahan/Desa dalam menggerakkan dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat untuk memadukannya dengan berbagai kegiatan Pemerintah ataupun swadaya gotong royong masyarakat.

c. Dalam pengendalian pembangunan adalah :

- Mengendalikan pembangunan

**TABEL IV.1.
TUGAS DAN FUNGSI LKMD**

No.	Dasar Peraturan	Tugas dan Fungsi LKMD
1	Kepmendagri No.27 Th. 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD	<p>Tugas LKMD : Membantu Pemerintah desa/kelurahan dalam merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk memadukannya dengan berbagai kegiatan Pemerintah ataupun swadaya gotong royong masyarakat serta menumbuhkan kondisi masyarakat yang dinamis untuk mengembangkan ketahanan di desa/kelurahan.</p>
		<p>Fungsi LKMD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wadah aspirasi masyarakat. - Menggali dan memanfaatkan potensi gotong royong - Menanamkan kesadaran P4. - Sarana komunikasi. - Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. - Membina potensi muda. - Meningkatkan peranan wanita. - Membina kerja sama antar lembaga. - Membantu pemerintah desa.
2	Keppres No. 49 Th. 2001 tentang Tugas dan Fungsi LKMD	<p>Tugas LKMD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif. - Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. - Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. <p>Fungsi LKMD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan. - Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. - Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan. - Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu. - Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan.

No.	Dasar Peraturan	Tugas dan Fungsi LKMD
3	Perda Kabupaten Karanganyar No. 11 Th. 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.	<p>Tugas LPMD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. - Melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat. <p>Fungsi LPMD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menampung aspirasi masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. - Melaksanakan koordinasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. - Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Sumber: *Proses Pemikiran Studi, 2002.*

4.1.1. Implementasi dalam perencanaan pembangunan

Dari hasil wawancara dapat dirangkum beberapa pendapat dari narasumber mengenai gambaran kualitatif implementasi tugas dan fungsi LKMD yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar selama ini adalah menampung aspirasi masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat perwakilan dari lingkungan RT – RW, PKK dan LPP kemudian dibahas dan disusun perencanaan pembangunan prasarana dasar perkotaan dalam Forum Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan. Perencanaan yang mampu dibiayai sendiri (swadaya masyarakat murni) langsung dapat dilaksanakan, sedangkan yang tidak mampu (tidak terjangkau) diajukan ke pemerintah kabupaten melalui Kepala Kelurahan secara hirarkhis. Dalam Forum Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan juga dibicarakan tentang rencana penggunaan bantuan stimulan dari pemerintah yang berupa bantuan dana pembangunan kelurahan/desa, atau berupa bantuan material aspal/ semen.

Pada garis besarnya implementasi tugas dan fungsi LKMD dalam perencanaan pembangunan adalah menampung aspirasi masyarakat untuk dikoordinasikan perencanaan pembangunannya, kemudian mengkaji kemampuan pembiayaan dari masyarakat, jika kemampuan pembiayaan memenuhi akan dilakukan secara swadaya, jika tidak diusulkan ke pemerintah kabupaten melalui Forum Diskusi UDKP ditingkat kecamatan, kegiatan pengkoordinasian perencanaan pembangunan ini dilakukan dalam forum musyawarah LKMD/LPMD. Kegiatan musyawarah LKMD/LPMD dalam era otonomi dilaksanakan pada bulan Januari – Pebruari.

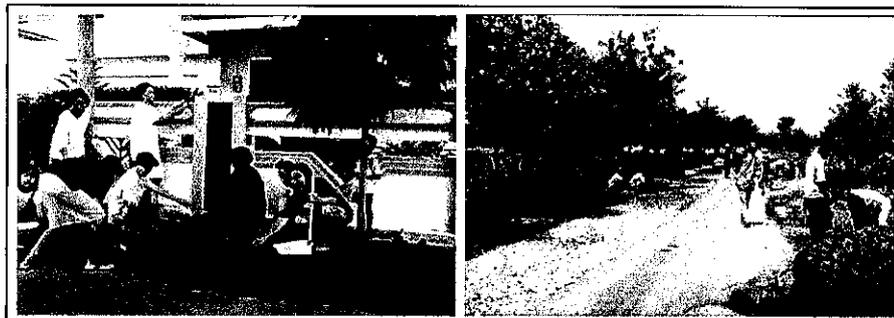


Gambar 4.1. : Forum Musyawarah LKMD/LPMD Dalam Proses Perencanaan Pembangunan (Dokumentasi Musbangkel LPMD Kelurahan Bejen dan LPMD Kelurahan Cangahan tahun 2000)

4.1.2. Implementasi dalam pelaksanaan pembangunan

Implementasi tugas dan fungsi LKMD dalam pelaksanaan pembangunan di sini adalah berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar. Dari hasil wawancara, gambaran kualitatif mengenai implementasi pelaksanaan tersebut adalah bahwa pengurus LKMD/LPMD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dana yang sudah tersedia baik dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah dibelikan material sesuai kebutuhan, sedang tenaga menggerakkan

gotong royong dan tenaga/kader teknis di kelurahan/desa. Selain itu kegiatan sebagai penggerak swadaya gotong-royong masyarakat kelurahan/desa juga dalam bentuk kerja bakti dalam rangka memperbaiki atau membersihkan fasilitas prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar. Untuk pembangunan prasarana dasar perkotaan yang menggunakan anggaran pemerintah, LKMD/LPMD tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunannya, kecuali dalam bentuk bantuan stimulan berupa bantuan dana pembangunan kelurahan/desa atau berupa bantuan bahan material aspal atau semen LKMD/LPMD baru dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan.



Gambar 4.2. : Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan (Dokumentasi LPMD Kelurahan Karanganyar dan LPMD Kelurahan Bejen tahun 2000)

4.1.3. Implementasi dalam pengendalian pembangunan

Implementasi tugas dan fungsi LKMD dalam pengendalian pembangunan di sini adalah berkaitan dengan pengendalian pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar. Dari hasil wawancara, gambaran kualitatif mengenai implementasi pengendalian dari LKMD selama ini hanya terbatas untuk program yang dilaksanakan secara swadaya dan pengelolaan bantuan dana

pembangunan kelurahan/desa, pengendalian/pengawasan pembangunan dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh LKMD/LPMD sendiri.



Gambar 4.3. : LKMD dan Pemerintah Melakukan Pengendalian Pembangunan Jalan Lingkungan dengan Bantuan Dana Pembangunan Kelurahan/Desa (Dokumentasi LPMD kelurahan Bejen 2000)

4.2. Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja LKMD Kota Karanganyar dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan di Kota Karanganyar.

Kinerja LKMD dimaksud di sini adalah merupakan gambaran kemampuan kerja LKMD ditingkat Kota Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan atau peningkatan kemampuan kerja organisasi di masa yang akan datang. Dalam penilaian kinerja LKMD tersebut indikator yang akan dikaji yaitu kinerja LKMD terhadap responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang tersebar pada 11 (sebelas) kelurahan/desa yang berada di wilayah obyek penelitian ini..

Adapun penilaian responden terhadap masing-masing item pertanyaan dalam kuesioner kinerja LKMD Kota Karanganyar berupa jawaban yang didasarkan pada Daftar Hasil Rekapitulasi Kuesioner seperti tercantum dalam

Lampiran F, maka analisis jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut.

4.2.1. Kinerja LKMD Terhadap Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas

a. Kinerja LKMD Terhadap Responsivitas

1. Sebanyak 81 % responden berpendapat bahwa ± 75 % pengurus LKMD mengetahui kebutuhan pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan yang seharusnya dilaksanakan di kelurahan/desa. Artinya bahwa sebagian besar pengurus LKMD telah mengetahui dengan baik tentang kebutuhan pembangunan dan prioritasnya.
2. Sebanyak 27 % responden berpendapat bahwa ± 75 % pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikelola LKMD telah menampung kebutuhan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan bagi kepentingan masyarakat kelurahan/desa. Artinya bahwa baru sebagian kecil kegiatan pembangunan oleh LKMD (kurang dari 75 %) yang telah menampung kebutuhan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan warga masyarakat.
3. Sebanyak 67 % responden berpendapat bahwa $\pm 75\%$ kegiatan pembangunan yang dikelola LKMD di kelurahan/desa telah menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan. Artinya bahwa sebagian besar kegiatan telah menampung aspirasi masyarakat.
4. Sebanyak 30 % responden berpendapat bahwa $\pm 75\%$ pengurus LKMD yang benar-benar tanggap dalam memberikan layanan atas usulan kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan fasilitas pelayanan prasarana perkotaan

sedangkan 70 % responden berpendapat baru sebagian kecil \pm 50% yang benar-benar tanggap dalam memberikan layanan atas usulan kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan fasilitas pelayanan prasarana perkotaan. Artinya kemampuan pengurus LKMD dalam memberikan layanan atas usulan kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan belum maksimal.

5. Sebanyak 74 % responden berpendapat bahwa LKMD di kelurahan/desa ini telah mempunyai rencana kerja yang tersusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan dan disosialisasikan kepada warga. Artinya terdapat rencana kerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada beberapa tokoh masyarakat.
6. Sebanyak 78 % responden berpendapat bahwa LKMD kelurahan/desa ini mempunyai rencana kerja berdasarkan prioritas kebutuhan yang paling diperlukan oleh seluruh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah, khususnya pada pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan. Artinya bahwa terdapat rencana kerja yang disusun berdasarkan skala prioritas sesuai hasil musyawarah desa tetapi masih terbatas pada beberapa tokoh dalam warga masyarakat.

Dari penilaian responden terhadap masing-masing pertanyaan responsivitas kinerja LKMD (Lampiran D) tersebut kemudian ditentukan interval

kelas dari setiap jawaban untuk menentukan tingkat responsivitas kinerja LKMD menurut persepsi masyarakat di Kota Karanganyar sebagai berikut:

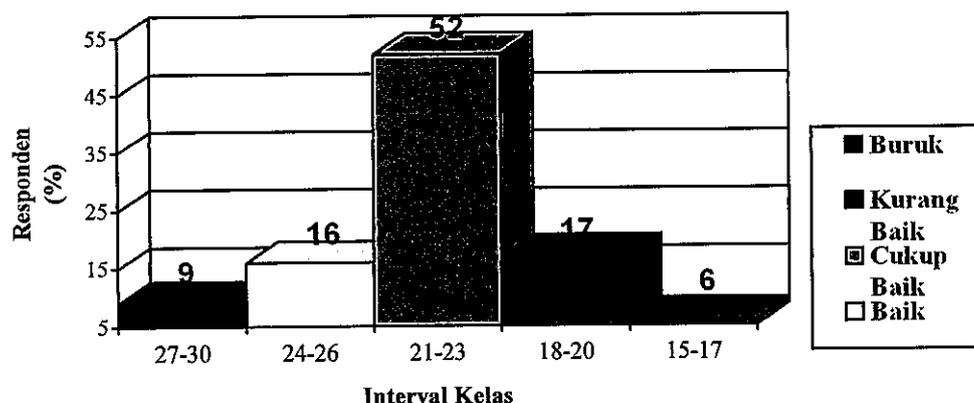
TABEL IV.2.

TINGKAT RESPONSIVITAS KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DI KOTA KARANGANYAR

Interval Kelas	Kategori Jawaban	Responden (%)
27 – 30	- Sangat baik	9
24 - 26	- Baik	16
21 - 23	- Cukup baik	52
18 - 20	- Kurang baik	17
15 - 17	- Buruk	6

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Grafik IV.1. Tingkat Responsivitas Kinerja LKMD dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Menurut Persepsi Masyarakat di Kota Karanganyar



Sumber : Hasil Analisis, 2003

Berdasarkan Tabel IV.2 dan Grafik IV.1 diatas menunjukkan bahwa 52 % responden menyatakan bahwa responsivitas LKMD terhadap pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya kemampuan kerja organisasi

LKMD/LPMD untuk mengenali kebutuhan masyarakat dan sebagai penampung aspirasi masyarakat telah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tetapi dalam hal menanggapi layanan atas usulan kegiatan dan kebutuhan pembangunan serta bekal pengalaman pengurus dalam program pembangunan prasarana dasar perkotaan perlu mendapat perhatian.

b. Kinerja LKMD Terhadap Responsibilitas

7. Sebanyak 67 % berpendapat bahwa rencana kerja yang disusun berdasarkan usulan dari tiap RT – RW dalam lingkup kelurahan/desa kemudian telah dilakukan daftar skala prioritas kegiatan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kelurahan/desa. Artinya bahwa masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan prasarana dasar perkotaan yang dibutuhkan masyarakat.
8. Sebanyak 61 % responden berpendapat bahwa $\pm 75\%$ kegiatan LKMD di kelurahan/desa dalam melaksanakan pembangunan fasilitas pelayanan dasar perkotaan melakukan koordinasi dengan instansi terkait artinya bahwa sebagian besar kegiatan LKMD bekerjasama dengan instansi terkait.
9. Sebanyak 64 % responden berpendapat bahwa $\pm 75\%$ kegiatan LKMD di kelurahan/desa ini dalam melaksanakan pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan bekerjasama dengan PKK kelurahan/desa khususnya dalam pemeliharaan pembangunan dan pengelolaan persampahan/kebersihan artinya bahwa sebagian besar kegiatan LKMD melibatkan PKK dalam lingkup kelurahan/desa.

10. Sebanyak 63 % responden berpendapat bahwa LKMD di kelurahan/desa ini memberikan penjelasan tentang program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan atau program-program pemerintah lainnya. Dari ke 63 % berpendapat tersebut maka 53 % berpendapat memberikan jawaban bahwa LKMD hanya kadang-kadang memberikan penjelasan tentang program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan atau program-program pemerintah lainnya. Artinya LKMD belum secara maksimal memberikan penjelasan tentang program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan atau program-program pemerintah lainnya.

Dari penilaian responden terhadap masing-masing pertanyaan tanggung jawab kinerja LKMD (Lampiran D) tersebut kemudian ditentukan interval kelas dari setiap jawaban untuk menentukan tingkat tanggung jawab kinerja LKMD menurut persepsi masyarakat di Kota Karanganyar sebagai berikut:

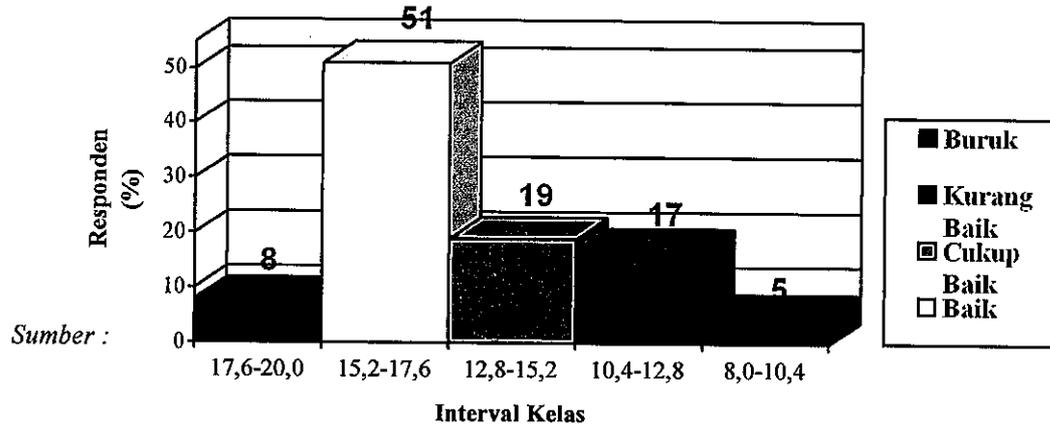
TABEL IV.3.

**TINGKAT TANGGUNG JAWAB KINERJA LKMD DALAM
PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN MENURUT
PERSEPSI MASYARAKAT DI KOTA KARANGANYAR**

Interval Kelas	Kategori Jawaban	Responden (%)
17,6 – 20,0	- Sangat baik	8
15,2 – 17,6	- Baik	51
12,8 – 15,2	- Cukup baik	19
10,4 – 12,8	- Kurang baik	17
8,0 - 10.4	- Buruk	5

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Grafik IV.2. Tingkat Responsibilitas Kinerja LKMD Dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Menurut Persepsi Masyarakat Di Kota Karanganyar



Hasil Analisis, 2003

Berdasarkan Tabel IV.3 dan Grafik IV.2 diatas maka secara umum responsibilitas LKMD terhadap pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar telah berjalan dengan baik. Artinya kemampuan kerja organisasi LKMD yang menyangkut tentang tanggung jawab pelaksanaan, apakah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, baik secara implisit maupun eksplisit. Dengan kata lain kinerja organisasi LKMD sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga tim yang terbentuk sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan bahwa 51 % masyarakat menyatakan bahwa responsibilitas LKMD terhadap pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar sudah berjalan dengan baik.

c. Kinerja LKMD Terhadap Akuntabilitas

11. Sebanyak 76 % responden berpendapat bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki para pengurus LKMD ($\pm 75\%$) mampu menunjang tugasnya sebagai pengurus LKMD artinya sebagian besar pengurus mempunyai tingkat pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas sebagai pengurus LKMD.
12. Sebanyak 23 % responden berpendapat bahwa $\pm 75\%$ pengurus mempunyai pengalaman yang tepat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus LKMD khususnya pengalaman dalam program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan sedangkan 77 % berpendapat baru sebagian kecil pengurus (kurang dari 75%) yang memiliki pengalaman yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. Artinya pengalaman pengurus LKMD dalam melaksanakan tugasnya harus selalu ditingkatkan dengan melibatkannya secara aktif dalam program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan.
13. Sebanyak 69 % responden berpendapat bahwa $\pm 75\%$ pengurus mempunyai kemampuan yang kuat dalam melaksanakan tugasnya demi tercapainya tujuan kegiatan LKMD khususnya dalam program pembangunan fasilitas pelayanan dasar perkotaan artinya bahwa sebagian besar pengurus mempunyai kemauan yang kuat dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan kegiatan LKMD.
14. Sebanyak 80 % responden berpendapat bahwa $\pm 75\%$ rencana kerja yang dibuat LKMD mempunyai arah program kerja yang tepat untuk program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan dan peningkatan

kesejahteraan warga. Artinya pada sebagian besar kegiatan yang dilakukan dalam rencana kerja LKMD memiliki arah yang jelas dan tepat.

15. Sebanyak 68 % responden berpendapat bahwa $\pm 75\%$ rencana kerja yang dibuat LKMD mempunyai jadwal yang tepat khususnya program kerja pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan artinya pada sebagian besar kegiatan yang dilakukan dalam rencana kerja LKMD dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
16. Sebanyak 63 % responden berpendapat bahwa $\pm 75\%$ kegiatan dalam rencana kerja pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan sering dilakukan evaluasi oleh pengurus LKMD secara bersama-sama dengan warga di kelurahan/desa dalam musyawarah desa artinya pada sebagian besar kegiatan/hasil pembangunan dalam rencana kerja LKMD dievaluasi pengurus LKMD bersama-sama dengan warga.
17. Sebanyak 63 % responden berpendapat bahwa $\pm 75\%$ pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitas pelayanan dasar perkotaan dilakukan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat artinya bahwa sebagian besar kegiatan LKMD melibatkan peran serta sebagian besar masyarakat secara aktif dalam pembangunan.
18. Sebanyak 68 % responden berpendapat bahwa $\pm 75\%$ hasil pembangunan fasilitas pelayanan dasar perkotaan yang dilaksanakan LKMD telah memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat artinya bahwa sebagian besar kegiatan LKMD mampu memenuhi kebutuhan sebagian besar warga masyarakat.

Dari penilaian responden terhadap masing-masing pertanyaan akuntabilitas kinerja LKMD (Lampiran D) tersebut kemudian ditentukan interval kelas dari setiap jawaban untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja LKMD menurut persepsi masyarakat di Kota Karanganyar sebagai berikut:

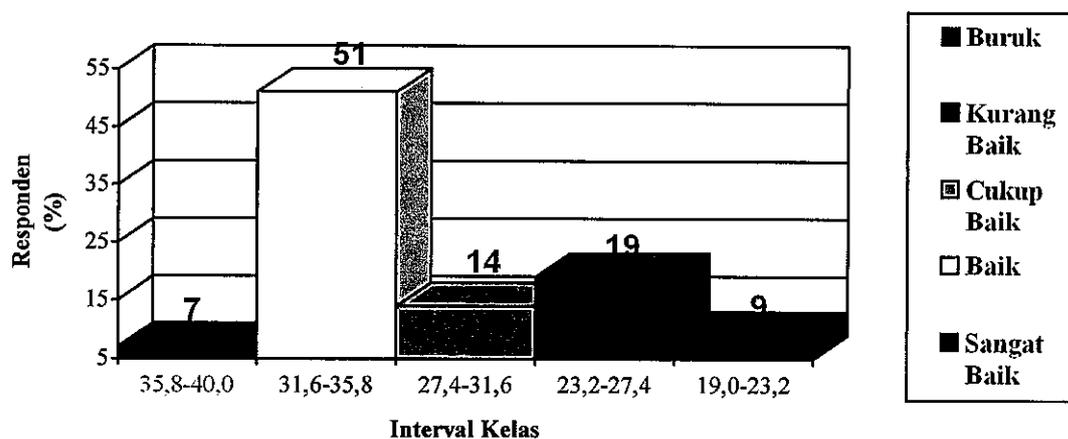
TABEL IV.4.

TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA LKMD DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DI KOTA KARANGANYAR

Interval Kelas	Kategori Jawaban	Responden (%)
35,8 - 40,0	- Sangat baik	7
31,6 - 35,8	- Baik	51
27,4 - 31,6	- Cukup baik	14
23,2 - 27,4	- Kurang baik	19
19,0 - 23,2	- Buruk	9

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Grafik IV.3. Tingkat Akuntabilitas Kinerja LKMD Dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Menurut Persepsi Masyarakat Di Kota Karanganyar



Sumber : Hasil Analisis, 2003

Berdasarkan Tabel IV.4 dan Grafik IV.3 tersebut maka secara umum akuntabilitas LKMD terhadap pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar telah berjalan dengan baik. Artinya kemampuan kerja organisasi LKMD yang menyangkut tentang seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari sisi internal organisasi seperti pencapaian target tetapi juga dari sisi eksternal seperti nilai-nilai dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain bahwa organisasi LKMD mampu meningkatkan pembangunan prasarana dasar perkotaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan bahwa 51 % masyarakat menyatakan bahwa akuntabilitas LKMD terhadap pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar sudah berjalan dengan baik.

4.2.2. Analisis Kinerja LKMD Kota Karanganyar

Dalam menentukan nilai persepsi masyarakat untuk kinerja LKMD secara keseluruhan ditingkat Kota Karanganyar, diperoleh dengan menjumlahkan seluruh jawaban pertanyaan dalam kuesioner yang terdiri atas 18 item pertanyaan, yang meliputi penilaian kinerja LKMD terhadap responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas maka diperoleh total jawaban terhadap keseluruhan indikator yang dikaji. Melalui perlakuan yang sama maka kinerja LKMD di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dapat diperoleh sebagai berikut:

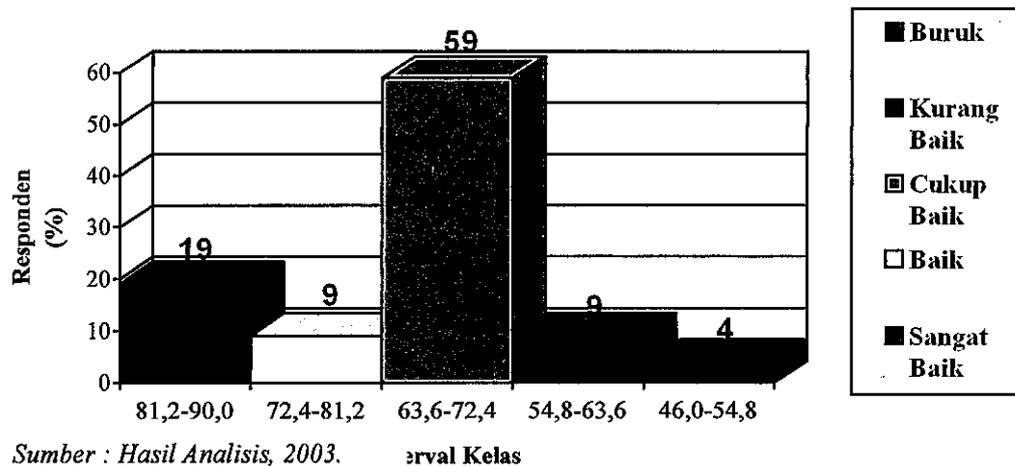
TABEL IV.5.

**TINGKAT KINERJA LKMD DI WILAYAH KOTA KARANGANYAR
SECARA KESELURUHAN
TERHADAP RESPONSIVITAS, RESPONSIBILITAS DAN
AKUNTABILITAS DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR
PERKOTAAN MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT
DI KOTA KARANGANYAR**

Interval Kelas	Kategori Jawaban	Responden (%)
81,2 – 90,0	- Sangat baik	19
72,4 - 81,2	- Baik	9
63,6 - 72,4	- Cukup baik	59
54,8 - 63,6	- Kurang baik	9
46,0 - 54,8	- Buruk	4

Sumber : Hasil Analisis, 2003.

Grafik IV.4. Tingkat Kinerja LKMD Di Wilayah Kota Karanganyar Secara Keseluruhan Terhadap Responsivitas, Responsibilitas Dan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Menurut Persepsi Masyarakat Di Kota Karanganyar



Sumber : Hasil Analisis, 2003.

Interval Kelas

Berdasarkan analisis persepsi masyarakat untuk kinerja LKMD secara keseluruhan ditingkat Kota Karanganyar terhadap responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas yang diperoleh melalui jawaban responden yaitu masyarakat di obyek penelitian secara keseluruhan menyatakan bahwa 59 % berpendapat bahwa kinerja LKMD sebagai suatu organisasi sudah berjalan dengan baik. Artinya bahwa secara keseluruhan maka organisasi LKMD di Kota Karanganyar telah mampu menyerap dan mewujudkan pembangunan prasarana dasar perkotaan.

Secara keseluruhan untuk analisis kinerja LKMD di masing-masing kelurahan/desa dilihat dari jawaban rata-rata responden dari masing-masing kelurahan/desa seperti terlihat pada tabel IV.6. juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja LKMD di masing-masing kelurahan/desa adalah baik dengan skor jawaban rata-rata 3 sampai 4.

TABEL IV.6.

**JAWABAN RATA-RATA RESPONDEN TERHADAP KINERJA LKMD
DI MASING-MASING KELURAHAN/DESA DALAM WILAYAH
KOTA KARANGANYAR**

No	Kelurahan/Desa	Jawaban Rata-Rata			
		Responsivitas	Responsibilitas	Akuntabilitas	Kinerja
1	Karanganyar	3.18	3.35	3.37	3.30
2	Bejen	3.54	3.62	3.58	3.60
3	Cangkalan	4.04	4.13	4.13	4.10
4	Tegalgede	3.83	3.83	3.85	3.84
5	Jungke	3.62	3.30	3.55	3.51
6	Popongan	3.67	4.25	4.13	4
7	Jantiharjo	3.67	3.88	3.84	3.80
8	Lalung	3.63	4.05	3.95	3.87
9	Jati	3.67	3.17	3.79	3.61
10	Papahan	3.67	4.25	4.13	4
11	Ngijo	3.94	4.17	3.94	4

Sumber: Hasil Analisis, 2003.

Untuk mengelompokkan persamaan penilaian persepsi masyarakat terhadap 18 item pertanyaan kinerja LKMD digunakan analisis faktor, secara keseluruhan analisis faktor ini juga telah mereduksi indikator untuk penilaian kinerja LKMD dari 18 indikator menjadi 17 indikator (pertanyaan nomor 11 dikeluarkan), dengan demikian untuk kasus 18 indikator telah direduksi menjadi hanya terdiri dari 3 faktor, dengan 1 indikator terpaksa dikeluarkan dari ketiga faktor yaitu pada indikator tingkat pendidikan pengurus karena tidak berhubungan dengan indikator lainnya atau hubungannya lemah, proses analisis dan hasil pengelompokan faktor terdapat pada Lampiran G, untuk lebih jelasnya hasil pengelompokan faktor dapat dijelaskan secara terperinci pada tabel IV.7. sebagai berikut:

TABEL IV.7.

PENGELOMPOKAN FAKTOR

Faktor	Indikator
Faktor 1, menurut persepsi masyarakat terhadap penilaian kinerja LKMD merupakan kelompok faktor yang telah dilaksanakan dengan baik (persen kumulatif responden berpendapat baik yaitu skor nilai antara 3-4), dalam arti ke sepuluh indikator tersebut sudah dilaksanakan dengan baik tetapi masih dapat ditingkatkan pelaksanaannya oleh LKMD.	Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikelola oleh LKMD telah menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan
	Mekanisme LKMD menyusun rencana kerja pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan
	Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan LKMD melakukan koordinasi dengan instansi terkait
	Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan LKMD bekerjasama dengan PKK khususnya dalam pemeliharaan pembangunan dan pengelolaan persampahan/kebersihan
	LKMD memberikan penjelasan tentang program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan
	Pengurus LKMD mempunyai kemauan yang kuat dalam melaksanakan tugasnya demi tercapainya tujuan LKMD khususnya dalam program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan.

Faktor	Indikator
	<p>Program kerja yang dibuat oleh LKMD mempunyai jadwal yang tepat khususnya program kerja pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan</p> <p>Hasil pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan dilakukan evaluasi oleh LKMD bersama-sama dengan warga dalam musyawarah desa</p> <p>Kegiatan pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan yang dilaksanakan LKMD dilakukan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat</p> <p>Hasil pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan yang dilaksanakan oleh LKMD telah memenuhi kebutuhan seluruh warga</p>
<p>Faktor 2, menurut persepsi masyarakat terhadap penilaian kinerja LKMD merupakan kelompok faktor yang telah dilaksanakan dengan sangat baik (persen kumulatif responden berpendapat sangat baik yaitu skor nilai diatas 4), dalam arti ke empat indikator tersebut sudah sangat baik dilaksanakan oleh LKMD.</p>	<p>Pengurus LKMD tahu akan kebutuhan pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan</p> <p>LKMD mempunyai rencana kerja yang tersusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan dan disosialisasikan kepada warga</p> <p>LKMD mempunyai rencana kerja berdasarkan prioritas kebutuhan yang paling diperlukan oleh masyarakat berdasarkan musyawarah pada pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan</p> <p>Rencana kerja yang dibuat oleh LKMD mempunyai arah program kerja yang tepat untuk program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan demi peningkatan kesejahteraan warga</p>
<p>Faktor 3, menurut persepsi masyarakat terhadap penilaian kinerja LKMD merupakan kelompok faktor yang telah dilaksanakan dengan kurang baik (persen kumulatif responden berpendapat kurang baik yaitu skor kurang dari 3), dalam arti ke tiga indikator tersebut harus mendapat perhatian penuh dalam rangka peningkatan kinerja LKMD.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikelola oleh LKMD telah menampung kebutuhan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan bagi kepentingan masyarakat</p> <p>LKMD cukup tanggap dalam memberikan layanan atas usulan kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan</p> <p>Pengurus LKMD mempunyai pengalaman yang tepat dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus LKMD khususnya pengalaman dalam program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2003.

Dari tabel IV.7. dapat dilihat bahwa indikator yang dikaji untuk penilaian kinerja LKMD setelah rotasi dapat dikelompokkan menjadi satu faktor akibat

kesamaan ragam yang dimilikinya dalam hal ini kesamaan dalam memberikan penilaian terhadap masing-masing item pertanyaan sehingga akan memudahkan proses penamaannya.

Dari hasil analisis kinerja LKMD dan analisis pengelompokan faktor kinerja, secara keseluruhan kinerja LKMD di wilayah Kota Karanganyar dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan telah baik, hal ini ditunjukkan dengan persepsi masyarakat terhadap 14 dari 18 item pertanyaan kinerja LKMD pada aspek tersebut sudah baik dilaksanakan, namun kemampuan kerja tersebut perlu mendapat perhatian pada aspek sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikelola LKMD di wilayah Kota Karanganyar selama ini kurang menampung kebutuhan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan, hal ini juga ditunjukkan dengan persepsi masyarakat mengenai kondisi fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan di kelurahan/desa adalah kurang serta masih perlu ditambah kapasitasnya dan ditingkatkan pelayanannya. (Lampiran F pertanyaan pendukung no. 2 dan 3).
- Pengurus LKMD di wilayah Kota Karanganyar selama ini kurang tanggap dalam memberikan layanan atas usulan kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan, meskipun sudah mengetahui kebutuhan pembangunan melalui aspirasi masyarakat tetapi mendapat kesulitan dalam menanggapi atau memberikan layanan atas usulan pembangunan tersebut.
- Kurang pengalaman pengurus LKMD di wilayah Kota Karanganyar dalam program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan khususnya yang menyangkut masalah teknis pelaksanaan.

4.3. Analisis Hasil Pembangunan Fasilitas Pelayanan Prasarana Dasar Perkotaan di Kota Karanganyar dan Pendanaannya.

Penilaian hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar bertujuan untuk mengetahui keterkaitan kinerja LKMD dalam wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan dengan hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar selama ini (sampai tahun 2003). Karena peranan LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar banyak terlihat dalam pembangunan skala kelurahan/desa, maka hasil pembangunan untuk Kota Karanganyar dilakukan dengan menjumlahkan hasil observasi pada masing-masing kelurahan/desa. Dari hasil analisis nilai prosentase yaitu realisasi pembangunan dibandingkan dengan standar pelayanan prasarana dasar pemukiman Kota Karanganyar. Standar pelayanan tersebut didasarkan pada PJM prasarana dasar pemukiman Kota Karanganyar Tahun 1997-1998 (Renstra DPU dan LLAJ Kabupaten Karanganyar Tahun 2000), terlihat hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar sampai dengan tahun 2003 ini sudah terpenuhi atau tidak, untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada tabel IV.8 berikut ini.

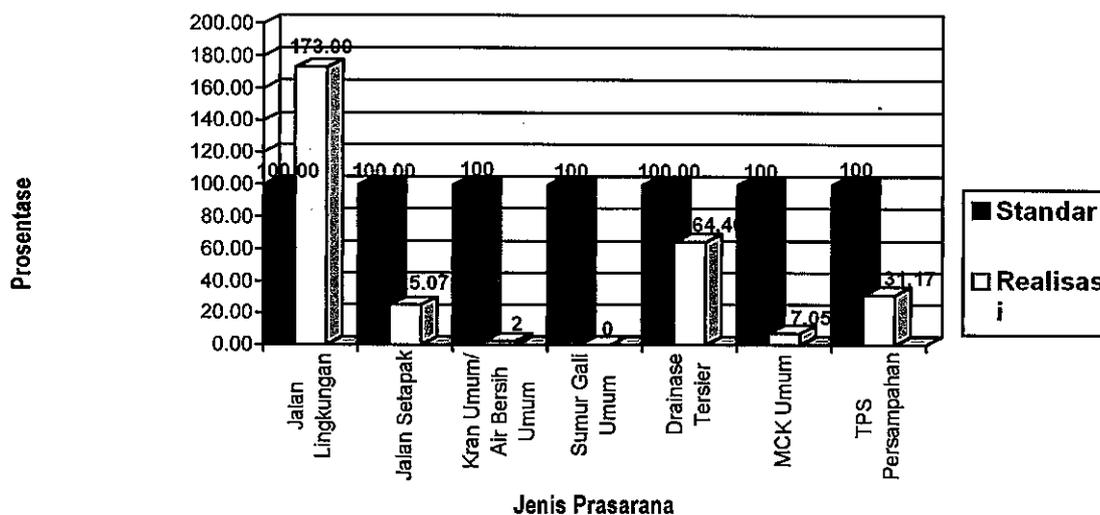
TABEL IV.8.

PENETAPAN SKORING STANDAR PEMBANGUNAN FASILITAS PELAYANAN PRASARANA DASAR PEMUKIMAN DI KOTA KARANGANYAR

No	Jenis Prasarana	Luas Pemukiman (Ha)	Standar	Realisasi	Prosentase (%)	Kriteria	Skor
		845,95					
1.	Jalan Lingkungan		42.297,50 M	73.437,36 M	173,00	> 100 %	2
2.	Jalan Setapak		126.892,50 M	32.653,00 M	25,07	< 100%	1
3.	Kran Umum/ Air Bersih Umum		84 Unit	1 Unit	2,00	< 100%	1
4.	Sumur Gali Umum		84 Unit	- -	-	-	-
5.	Drainase Tersier		253.785,00 M	163.653,00 M	64,40	< 100%	1
6.	MCK Umum		169 Unit	12 Unit	7,05	< 100%	1
7.	TPS Persampahan		169 Unit	53 Unit	31,17	< 100%	1

Sumber : Hasil Analisis, 2003

Grafik IV.5. Perbandingan Prosentase Standar Pembangunan Fasilitas Pelayanan Prasarana Dasar Pemukiman dan Realisasinya di Kota Karanganyar



Sumber : Hasil Analisis, 2003

Berdasarkan tabel IV.8. dan Grafik IV.5. tersebut di atas maka standar pelayanan pemukiman Kota Karanganyar yang dapat dicapai hanya pada jalan lingkungan dengan skor 2 atau lebih dari 100%, sedangkan fasilitas lain yaitu jalan setapak, kran umum/air bersih umum, sumur gali umum, drainase tersier, MCK umum dan TPS persampahan sampai tahun 2003 ini belum terpenuhi. Dilihat dari target program PJM prasarana pemukiman Kota Karanganyar sampai tahun akhir 2005, maka pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan untuk Kota Karanganyar dari 7 sasaran kegiatan baru 1 sasaran kegiatan yang terpenuhi atau $\pm 14\%$ yang terpenuhi sampai tahun 2003 ini.

Menurut persepsi masyarakat terhadap fasilitas prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar secara keseluruhan (Lampiran F pertanyaan pendukung

nomor 1, 2 dan 3) bahwa untuk jenis prasarana sumur gali umum dan MCK umum tidak perlu diadakan di tiap-tiap lingkungan kelurahan/desa, selama ini kedua jenis prasarana tersebut hanya diadakan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat-tempat umum yaitu pasar dan terminal, sedangkan untuk kran umum perlu diadakan sebagai cadangan air untuk pemadam kebakaran (Hydran).

Dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar diperlukan pendanaan, pendanaan tersebut dapat berasal dari swadaya masyarakat atau dari Pemerintah Daerah. Sebagai gambaran pendanaan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

a. Sumber Dana Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat Kota Karanganyar yang dikoordinir oleh LKMD selama ini meliputi: (1) dalam bentuk swadaya murni yang berupa pungutan resmi kepada masyarakat yang disepakati bersama yang dituangkan dalam APPKD, serta (2) swadaya murni masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek yang direncanakan sendiri oleh masyarakat setempat. Jumlah dana swadaya murni masyarakat masing-masing kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Karanganyar dapat dilihat pada Tabel IV.9.

Dari dana swadaya tersebut (grafik IV.6) menunjukkan prosentase penggunaan dana sebagian besar untuk membangun sarana/prasarana perhubungan. Jadi organisasi LKMD di wilayah Kota Karanganyar mempunyai

komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kebutuhan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar.

TABEL IV.9.

SWADAYA MURNI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI LINGKUP KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2000, 2001, DAN 2002

1. TAHUN ANGGARAN 2000

(dalam ribuan rupiah)

No	Kecamatan	Sarana/Prasarana						Jumlah Swadaya Murni Desa	
		Produksi		Perhubungan		Sosial/lain-lain		Jml proyek	Jml Dana
		Jml proyek	Jml Dana	Jml proyek	Jml Dana	Jml proyek	Jml Dana		
1.	Karanganyar	6	24.268	16	442.695	13	117.328	35	584.291
2.	Jaten	1	3.000	115	778.109	40	201.403	156	982.512
3.	Tasikmadu	7	7.600	17	237.104	5	70.346	29	315.050
Jumlah								220	1.881.853

2. TAHUN ANGGARAN 2001

(dalam ribuan rupiah)

No	Kecamatan	Sarana/Prasarana						Jumlah Swadaya Murni Desa	
		Produksi		Perhubungan		Sosial/lain-lain		Jml proyek	Jml Dana
		Jml proyek	Jml Dana	Jml proyek	Jml Dana	Jml proyek	Jml Dana		
1.	Karanganyar	3	5.025	5	145.525	20	51.700	28	202.250
2.	Jaten	2	1.200	3	99.125	21	37.575	26	137.900
3.	Tasikmadu	7	21.600	6	127.300	16	167.229	29	316.129
Jumlah								83	656.279

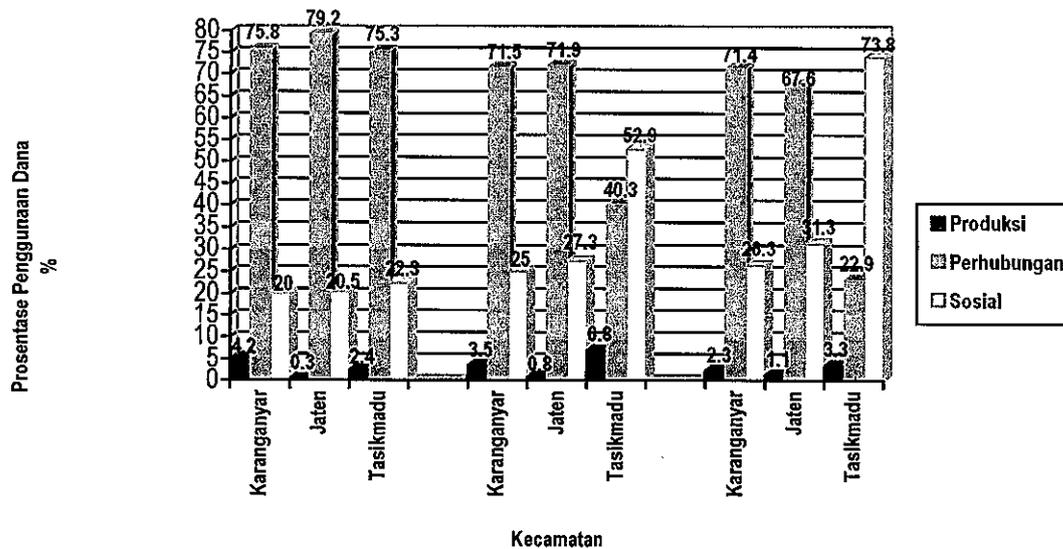
3. TAHUN ANGGARAN 2002

(dalam ribuan rupiah)

No	Kecamatan	Sarana/Prasarana						Jumlah Swadaya Murni Desa	
		Produksi		Perhubungan		Sosial/lain-lain		Jml proyek	Jml Dana
		Jml proyek	Jml Dana	Jml proyek	Jml Dana	Jml proyek	Jml Dana		
1.	Karanganyar	8	21.535	44	665.887	33	245.663	85	933.085
2.	Jaten	8	4.609	15	294.379	16	137.445	38	435.433
3.	Tasikmadu	11	42.600	16	299.100	57	965.785	84	1.307.485
Jumlah								207	2.676.003

Sumber: Bappeda Kabupaten Karanganyar, 2003.

Grafik IV.6. Prosentase Penggunaan Dana Swadaya Murni Masyarakat Dalam Pembangunan di Lingkup Kecamatan dalam Wilayah Kota Karanganyar pada tahun 2000, 2001, 2002



Sumber : Hasil Analisis, 2003

b. Sumber Dana Pemerintah

Sedangkan pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar yang dibayai dengan dana dari anggaran pemerintah dapat dilihat pada Tabel IV.10.

TABEL IV.10.

**DAFTAR PROYEK-PROYEK YANG TERKAIT DENGAN
PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN
DALAM LINGKUP KECAMATAN
DI WILAYAH KOTA KARANGANYAR**

1. TAHUN ANGGARAN 2000 (dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Proyek	Lokasi	Jumlah Dana	Sumber Dana
1.	Pemeliharaan Jalan Kota	Kecamatan Karanganyar	350.097	DAU
2.	Bantuan Pengaspalan dan Betonisasi Jalan Desa	Kecamatan Karanganyar Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Jaten	20.588,3 20.588,3 20.588,3	DAU DAU DAU
3.	Pembangunan Jalan Lingkungan Tegalsari	Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar	50.000	DAU
4.	Bantuan Pembinaan Kecamatan	Kecamatan Karanganyar Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Jaten	10.000 10.000 10.000	DAK DAK DAK
5.	Perbaikan Perumahan dan Pemukiman Perkotaan	Kelurahan Cangakan dan Jungke, Kecamatan Karanganyar	200.000	DAK

2. TAHUN ANGGARAN 2001 (dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Proyek	Lokasi	Jumlah Dana	Sumber Dana
1.	Bantuan Pengaspalan dan Betonisasi Jalan dan Jembatan Desa	Kecamatan Karanganyar Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Jaten	73.529,5 73.529,5 73.529,5	DAU DAU DAU
2.	Peningkatan Jalan Kebon Agung Gedong (1,7 km X 3 m)	Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Karanganyar	85.099 85.099	DAU DAU
3.	Pembangunan Lantai, Saluran dan Rehab. Jembatan Tunggul (25 m X 7 m)	Kecamatan Karanganyar	231.366	DAU
4.	Pembangunan Jalan Kadipiro Kelurahan Bejen (3 m X 355 m)	Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar	53.601	DAU
5.	Pengaspalan Jalan Lingkungan dan Saluran Perumahan Ngijo (800 m X 4 m) dan (Sal. 800 m)	Kecamatan Tasikmadu	242.689	DAU
6.	Pembangunan Jalan Lingkungan & Saluran Tegalwinangun, Tegalgede (0,51 Km X 3 m)	Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar	79.172	DAU
7.	Pembangunan Saluran Lingkungan Kampung Tegalsari, Bejen (500 m)	Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar	55.559	DAU

No.	Nama Proyek	Lokasi	Jumlah Dana	Sumber Dana
8.	Pembangunan Jalan Lingkungan Tegalarum Kelurahan Cangakan Jalan Aspal (4 m X 375 m)	Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar	79.213	DAU
9.	Pembangunan Jalan, Saluran Bibis, Tegalan dan Penutupan Saluran Jetis (Saluran 330 m, Tegalan 500 m)	Kecamatan Karanganyar	277.450	DAU
10.	Pembangunan Jalan dan Penutupan Saluran Ngalon, Pandeyan Tasikmadu	Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu	298.790	DAU

3. TAHUN ANGGARAN 2002

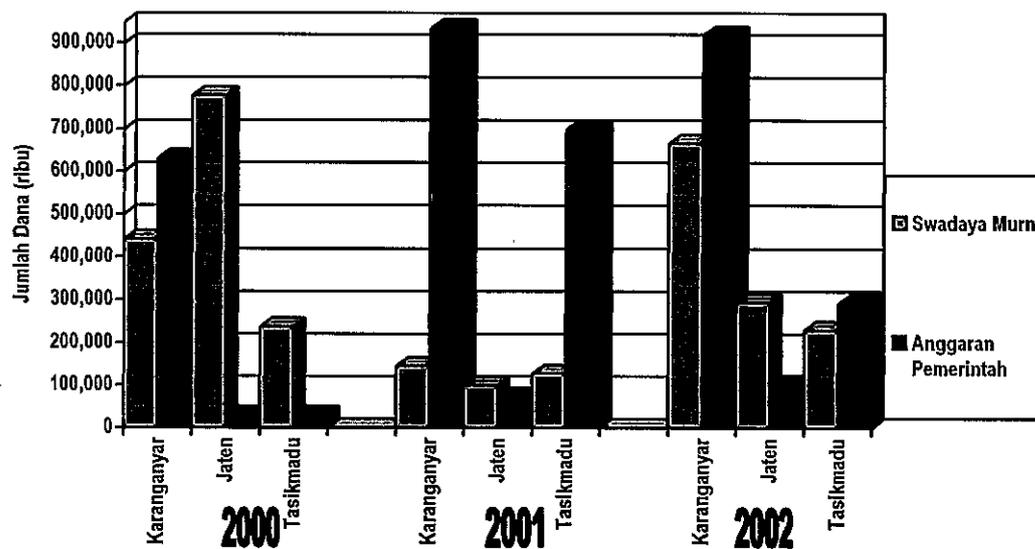
(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Proyek	Lokasi	Jumlah Dana	Sumber Dana
1.	Peningkatan Jalan Masuk ke Perumahan RSS (1,25 km X 3 m)	Kelurahan Popongan, Kecamatan Karanganyar	156.250	DAU
2.	Peningkatan Jalan Tegalasri – Perum Wahyu Utomo (1 km X 3 m)	Kelurahan Tegalasri, Kecamatan Karanganyar	110.000	DAU
3.	Pembangunan Jalan dan Saluran Lingkungan Kadipiro Bejen Karanganyar	Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Karanganyar	100.000	DAU
4.	Pembangunan Saluran dan Jalan Lingkungan Tegalwinangun Karanganyar	Kelurahan Tegalwinangun, Kecamatan Karanganyar	150.000	DAU
5.	Pembangunan Saluran dan Jalan Lingkungan Mekarsari, Popongan, Karanganyar	Kelurahan Popongan, Kecamatan Karanganyar Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Karanganyar	150.000	DAU
6.	Pembangunan Saluran Lingkungan Tegalwinangun	Kelurahan Tegalwinangun, Kecamatan Karanganyar	150.000	DAU
7.	Bantuan Pengaspalan dan Betonisasi Jalan dan Jembatan Desa	Kecamatan Karanganyar Kecamatan Tasikmadu Kecamatan Jaten	102.941,2 102.941,2 102.941,2	DAU
8.	Pembangunan Saluran Lingkungan Ngijo (Lanjutan)	Kecamatan Tasikmadu	190.000	DAU

Sumber : Bappeda Kabupaten Karanganyar, 2002

Dari kedua sumber dana tersebut (tabel IV.9 dengan tabel IV.10) terlihat bahwa jumlah anggaran pemerintah jauh lebih besar dari pada jumlah swadaya murni yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang terkait dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan terutama untuk pembiayaan pembangunan di pusat kota yang sebagian besar wilayahnya terdapat di Kecamatan Karanganyar seperti terlihat pada grafik IV.7. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah untuk membangun dan menata Kota Karanganyar sebaik-baiknya karena merupakan cermin wajah Ibu Kota Kabupaten.

Grafik IV.7. Perbandingan Jumlah Dana Swadaya Murni dan Anggaran Pemerintah Dalam Pembangunan Prasarana di Lingkup Kecamatan dalam Wilayah Kota Karanganyar pada Tahun 2000, 2001, 2002



Sumber : Hasil Analisis, 2003

Dengan melihat jumlah dana swadaya murni masyarakat Kota Karanganyar dimana sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana/prasarana perhubungan yang terkait dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan serta perbandingan pembiayaan pembangunan secara swadaya dengan anggaran pemerintah tersebut memang belum cukup untuk dapat mengukur kemampuan kerja atau kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar tetapi dapat dijadikan gambaran kinerja LKMD di tingkat Kota Karanganyar selama ini.

Sebagai gambaran hasil observasi kondisi prasarana dasar perkotaan di masing-masing kelurahan/desa dalam wilayah Kota Karanganyar dapat dilihat pada Lampiran H, gambar 1 – 11.

4.4. Analisis Deskriptif Hubungan antara Implementasi Tugas dan Fungsi LKMD, Kinerja LKMD terhadap Hasil Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Didukung Potensi di Wilayah Kota Karanganyar.

Kinerja LKMD dikaitkan dengan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar ditinjau dari responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitasnya adalah cukup baik, dalam arti aturan-aturan yang tercantum dalam Keppres RI Nomor 28 tahun 1980, Kepmendagri Nomor 27 tahun 1984, Keppres Nomor 49 tahun 2001 dan Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 11 tahun 2000 tentang LKMD, serta Permendagri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) yang terkait dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan tidak seluruhnya diterapkan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan prasarana dasar perkotaan, karena masih perlu ditingkatkan dalam aspek responsivitas yaitu kurang tanggapnya pengurus LKMD dalam memberikan layanan atas usulan kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan karena kurang pengalamannya pengurus LKMD dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan sehingga kegiatan pembangunan yang dikelola oleh LKMD kurang menampung kebutuhan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan bagi kepentingan masyarakat, hal tersebut membawa dampak kepada hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan sampai dengan tahun 2003 yang terpenuhi hanya 14 % dari standar pelayanan.

Penilaian kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar, menurut Siagian (1998), merupakan organisasi berkinerja tinggi, karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Mempunyai arah yang jelas yaitu ikut membantu mengatasi masalah kebutuhan prasarana dasar perkotaan dengan mengalokasikan dana swadaya yang persentasenya lebih besar untuk pembangunan prasarana perhubungan.
- Mempunyai komitmen kuat pada perencanaan strategis, hal ini ditunjukkan dengan prioritas pembangunan yaitu jalan lingkungan, dimana prasarana tersebut merupakan prasarana yang penting dalam menunjang perekonomian masyarakat.
- Berorientasi pada tujuan yaitu pembangunan prasarana dasar perkotaan untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat.

- Tumbuhnya produktivitas pengurus LKMD ditunjukkan dengan setiap tahun melaksanakan musyawarah pembangunan kelurahan/desa untuk menyusun program kerja, dan efektivitas organisasi yang ditunjukkan oleh (Keban, 1995) pencapaian tujuan dan mekanisme pencapaian tujuan serta dalam memanfaatkan sumber daya dalam hal ini sebagai penggerak swadaya gotong royong masyarakat.

Menurut Taliziduhu Ndraha (1987) pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar dengan melibatkan organisasi LKMD berhasil dengan baik hal ini dapat ditunjukkan dengan indikator:

- Adanya keterlibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunannya.
- Adanya kemampuan masyarakat berkembang mandiri, hal ini ditunjukkan dengan kekuatan swadaya masyarakat yang dikoordinir oleh LKMD sebagian besar dipergunakan untuk pembangunan prasarana perhubungan.

Kinerja LKMD di Kota Karanganyar selama ini tidak terlepas dari pengaruh yang berasal dari internal maupun eksternal LKMD, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar adalah:

- Dukungan instansi seperti Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA dan Instansi dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sangat diperlukan sesuai dengan masing-masing fungsi yang diembannya.

- Kualitas pengurus LKMD; menurut persepsi masyarakat, LKMD di Kota Karanganyar telah didukung oleh kualitas pengurus LKMD yang mempunyai tingkat pendidikan yang mampu menunjang tugasnya sebagai pengurus LKMD. Sebagai suatu organisasi masyarakat menurut Karyono (2000) dengan memiliki kualitas pendidikan pengurus LKMD yang baik seharusnya LKMD merupakan saluran aspirasi masyarakat desa yang efektif sebagai penentu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mampu meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- Dukungan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, karena sebagai mitra pemerintah seharusnya LKMD diberi ruang gerak yang lebih luas dalam ikut membantu penyelesaian masalah kebutuhan pembangunan prasarana dasar perkotaan.
- Dukungan yang cukup penting adalah kemauan Bupati Karanganyar untuk memberdayakan LKMD sesuai fungsi dan tugasnya LKMD. Tanpa adanya kewenangan yang diberikan bupati serta dukungan kebijakan, pendanaan, dan lain sebagainya maka LKMD tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan ini mempengaruhi kinerja yang dihasilkan.

Keseluruhan proses analisis deskriptif kualitatif tersebut di atas pada dasarnya dapat dirangkum kedalam analisis SWOT secara lebih jelas sebagai berikut (Tabel IV.11):

TABEL IV.11.

**MATRIKS SWOT KINERJA LKMD DALAM
PEMBANGUNAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN
DI KOTA KARANGANYAR**

Potensi (Strength)	Permasalahan (Weakness)	Peluang (Opportunity)	Tantangan/ Ancaman (Threat)
<p>1. Tugas dan fungsi LKMD/LPMD yang didukung Perda Kab. Karanganyar No. 11 Th. 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Keurahan</p> <p>2. Kualitas pendidikan pengurus yang mampu menunjang tugasnya sebagai pengurus</p> <p>3. Komitmen yang kuat dalam mencapai arah dan tujuan organisasi yang terkait dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan.</p>	<p>1. Pengalaman pengurus dalam program pembangunan prasarana dasar perkotaan terutama dalam melayani usulan kegiatan dan kebutuhan pembangunan</p>	<p>1. Permendagri No. 9 Th. 1982 dan UU No 22 Th 1999 dan Petunjuk Teknis mengenai Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa tentang upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas daerah serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.</p> <p>2. Wilayah kerja LKMD yang berada di Ibu Kota Kabupaten dimana kegiatan pembangunannya sebagian besar dibiayai dari dana pemerintah, membuka peluang LKMD hanya sebagai penyerap aspirasi/usulan masyarakat saja.</p> <p>3. Kemampuan swadaya masyarakat di Kota Karanganyar.</p>	<p>1. Birokrasi dalam Pemerintahan yang terikat aturan-aturan, misalnya LKMD hanya dilibatkan pada proses perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan saja, padahal sebagai pembawa aspirasi juga berkeinginan untuk terus memantau sampai pada pelaksanaan dan pengendaliannya. Jadi secara kelembagaan LKMD kurang difungsikan meskipun ada aturan-aturan yang mendukungnya.</p>

Sumber: Hasil Analisis. 2003.

Adapun strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja LKMD di Kota Karanganyar secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan analisis SWOT diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Dalam perencanaan pembangunan:

- LKMD supaya lebih memanfaatkan potensi yang ada yaitu dukungan Perda Kabupaten Karanganyar No. 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan pembangunan dengan menampung aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan fasilitas prasarana dasar pemukiman di lingkungan Kota Karanganyar.
- LKMD supaya memanfaatkan kualitas pendidikan pengurus yang mampu menunjang tugasnya sebagai pengurus dan komitmen pengurus yang kuat dalam mencapai arah dan tujuan organisasi sebagai modal untuk mengatasi kelemahan dalam aspek responsivitas yaitu kurang tanggapnya pengurus LKMD dalam memberikan layanan atas usulan kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan karena kurang pengalamannya pengurus LKMD dalam program pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar, hal ini dapat dilakukan antara lain dengan melaksanakan koordinasi bersama instansi yang terkait dengan program pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar.
- Memanfaatkan peluang-peluang yang ada yaitu dukungan Permendagri No.9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Petunjuk Teknis mengenai Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yang mengatur mengenai

mekanisme perencanaan pembangunan di daerah yang melibatkan LKMD dalam Musyawarah Pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Dengan keterlibatan aktif LKMD dalam perencanaan pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar seperti melibatkan dalam Rakorbang di Tingkat Kabupaten akan dapat diperoleh suatu arahan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang lebih terarah untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kondisi kesehatan, sosial dan perekonomian masyarakat di Kota Karanganyar. Dengan melibatkan LKMD dalam perencanaan pembangunan juga akan dapat memperkirakan hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan sehingga dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang akan dihadapi. Keterlibatan aktif LKMD dalam perencanaan pembangunan memudahkan pemerintah daerah dalam mengenali kebutuhan fasilitas pelayanan pemukiman dasar Kota Karanganyar sesuai dengan daftar skala prioritas yang betul-betul dibutuhkan masyarakat.

Wilayah kerja LKMD yang berada di Ibu Kota Kabupaten dimana kegiatan pembangunan banyak didukung pembiayaan dari anggaran pemerintah menjadikan LKMD hanya memfokuskan kegiatan pada proses perencanaan pembangunan prasarana dasar perkotaan dengan jalan menjadikan musyawarah LKMD sebagai tempat untuk :

- Menampung aspirasi masyarakat yang terkait dengan pembangunan prasarana dasar perkotaan.
- Menghimpun permasalahan serta sumber daya pembangunan yang dapat digunakan dengan swadaya masyarakat di setiap lingkungan RT/RW dengan dibantu Kader Pembangunan Desa (KPD).

- Menentukan prioritas kegiatan dan lokasi garapan dari setiap kelurahan/desa/lingkungan/RW/RT menurut kebutuhan program pembangunan warga setempat.
- Menentukan urutan jadwal kerja kegiatan pembangunan,
- Mempersiapkan pengorganisasian kelompok-kelompok kerja kegiatan dan wilayah menurut kebutuhan pembangunan.
- Menentukan cara-cara pemantauan penilaian dan pelaporan.

b. Dalam pelaksanaan pembangunan:

- LKMD supaya lebih memanfaatkan potensi yang ada yaitu dukungan Perda Kabupaten Karanganyar No. 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat untuk memadukannya dengan berbagai kegiatan pemerintah ataupun swadaya gotong royong masyarakat.
- Menggali kemampuan swadaya masyarakat kota untuk ikut berpartisipasi mengatasi kebutuhan masalah pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar.
- Memanfaatkan dana dan tenaga supaya berdaya guna dan berhasil guna untuk pembangunan prasarana dasar perkotaan Kota Karanganyar baik yang berasal dari Pemerintah maupun dari swadaya masyarakat itu sendiri.

c. Dalam pengendalian pembangunan:

Melakukan penelitian hasil pembangunan baik program kegiatan yang berasal dari organisasi LKMD maupun program kegiatan pemerintah.

Berdasarkan persepsi masyarakat berpendapat bahwa model evaluasi untuk pengendalian pembangunan ini sudah berjalan pada kelurahan/desa yang menjadi obyek penelitian hanya untuk kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya dan kegiatan yang menggunakan dana bantuan pembangunan kelurahan/desa, meskipun bila ditinjau dari kualitas pendidikan pengurus yang mampu menunjang tugasnya sebagai pengurus, mereka seharusnya mampu melaksanakan tugas-tugas pengendalian program pembangunan pemerintah, namun secara kelembagaan LKMD tidak difungsikan meskipun ada peraturan-peraturan yang mendukungnya.

Berdasarkan uraian diatas kinerja LKMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat ditingkatkan apabila semua tugas dan fungsi yang diamanatkan dapat dilaksanakan dengan baik. LKMD bukan hanya untuk sebagian masyarakat tetapi untuk seluruh masyarakat kelurahan/desa. LKMD tetap akan dapat menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dengan selalu melibatkan mereka baik dalam perencanaan dan pelaksanaan menggerakkan swadaya masyarakat serta pengendalian pembangunan. Keterlibatan LKMD secara nyata di dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Implementasi tugas dan fungsi LKMD di Kota Karanganyar yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tercantum dalam Keppres RI Nomor 28 tahun 1980, Kepmendagri Nomor 27 tahun 1984, Keppres Nomor 49 tahun 2001 dan Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 11 tahun 2000 tentang LKMD, serta Permendagri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) tidak seluruhnya diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar, hal ini dipengaruhi oleh mekanisme pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar yang dominan *top down* selama ini.

Berdasarkan hasil penilaian persepsi masyarakat tentang kinerja LKMD di wilayah Kota Karanganyar secara keseluruhan teradap responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitasnya serta hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Kinerja LKMD terhadap responsivitas yaitu kemampuan kerja untuk mengenali kebutuhan masyarakat, penyusunan rencana kerja dan penampungan wadah aspirasi masyarakat menurut penilaian 52 % masyarakat berpendapat cukup baik, hanya perlu ditingkatkan kemampuan kerjanya dalam aspek kurang menampung kebutuhan fasilitas pelayanan

prasarana dasar perkotaan bagi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan LKMD dan kurang tanggapnya pengurus dalam layanan atas usulan kegiatan dan kebutuhan.

- Kinerja LKMD terhadap responsibilitas yaitu kemampuan kerja dalam menjalankan mekanisme pelaksanaan program kerja, membina kerja sama antar lembaga dari sebagai sarana komunikasi menurut penilaian 51 % masyarakat berpendapat baik dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh LKMD sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, baik implisit maupun eksplisit.
- Kinerja LKMD terhadap akuntabilitas yaitu yang menyangkut tentang seberapa besar kebijakan dari kegiatan LKMD dapat dipertanggungjawabkan secara internal yang meliputi kualitas pengurus, adanya arah program yang jelas, berorientasi pada pencapaian tujuan dan dalam mekanisme pencapaian tujuan, serta pertanggungjawaban secara eksternal yang meliputi keterpenuhinya kebutuhan masyarakat dan keterlibatan masyarakat, menurut penilaian 51 % masyarakat berpendapat baik, hanya perlu ditingkatkan kemampuan kerjanya dalam aspek pengalaman pengurus dalam program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan.
- Hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar sampai dengan tahun 2003 hanya jenis prasarana jalan lingkungan yang telah memenuhi standar pelayanan prasarana dasar pemukiman Kota Karanganyar, sedangkan jenis prasarana jalan setapak, kran umum/ air

bersih umum, sumur gali umum, drainase tersier, MCK umum, dan TPS persampahan belum memenuhi standar.

Kinerja LKMD di Kota Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikaitkan dengan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar ditinjau dari responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitasnya menurut penilaian 59 % masyarakat di wilayah studi berpendapat cukup baik, tetapi masih memerlukan perhatian dalam rangka meningkatkan kinerja LKMD khususnya kinerja terhadap responsivitasnya yaitu kurang tanggapnya pengurus LKMD dalam memberikan layanan atas usulan kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan disebabkan kurang pengalamannya pengurus LKMD dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan sehingga kegiatan pembangunan yang dikelola oleh LKMD selama ini kurang menampung kebutuhan fasilitas pelayanan prasarana dasar perkotaan bagi kepentingan masyarakat dalam arti kinerja LKMD selama ini belum dapat membantu menyelesaikan masalah kebutuhan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil pembangunan prasarana dasar perkotaan sampai dengan tahun 2003 ini dari 7 sasaran program pemenuhan kebutuhan fasilitas prasarana dasar yang tercantum dalam PJM Prasarana Dasar Pemukiman Kota Karanganyar sampai dengan tahun 2005, hanya 1 sasaran program yang terpenuhi yaitu pemenuhan prasarana jalan lingkungan, atau dengan kata lain yang terpenuhi baru 14 %.

5.2. Rekomendasi

5.2.1. Rekomendasi untuk LKMD

- LKMD di wilayah Kota Karanganyar dapat memanfaatkan potensi dan peluang yang ada supaya dapat membantu mengatasi masalah kebutuhan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar.

5.2.2. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

- Agar kebutuhan pembangunan prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar pada tahun 2005 dapat segera dipenuhi, Pemerintah Kabupaten Karanganyar direkomendasikan untuk dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi LKMD atau pemberdayaan LKMD untuk dapat menyuarakan dan mewujudkan kebutuhan masyarakat di bidang prasarana dasar perkotaan di Kota Karanganyar dalam Forum Rapat Koordinasi Pembangunan Kabupaten, khususnya kepada LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar.
- Memberikan fasilitas guna terbentuknya Forum Musyawarah LKMD yang berada di wilayah Kota Karanganyar, agar tercapai keterpaduan pembangunan prasarana dasar perkotaan antar kelurahan/desa.
- Berdasarkan observasi hasil pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan di Kota Karanganyar sampai dengan tahun 2003 ini, untuk jenis prasarana Kran Umum/Air Bersih Umum, Sumur Gali Umum dan MCK Umum hampir seluruh kelurahan/desa di wilayah Kota Karanganyar tidak ada realisasi pembangunannya, kecuali pada kelurahan/desa yang mempunyai tempat-tempat umum misalnya pasar dan terminal. Maka direkomendasikan Pemerintah Daerah melakukan revisi PJM Program

Pembangunan Prasarana Dasar Perkotaan Kota Karanganyar untuk program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.2.3. Untuk Studi Lanjut

Berdasarkan pada kesimpulan studi seperti yang telah disebutkan diatas, maka perlu dilakukan studi lanjutan yang diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis kinerja LKMD dalam pembangunan prasarana dasar perkotaan di tiap-tiap kelurahan/desa dalam wilayah Kota Karanganyar dihubungkan dengan potensi sumberdaya yang ada tiap-tiap kelurahan/desa dalam wilayah Kota Karanganyar, sehingga dapat ditentukan upaya pemenuhan kebutuhan fasilitas pemukiman dasar perkotaan bagi masyarakat di Kota Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, M. Marriam S, 1985, *Organisasi, Manajemen*, Karunia, Jakarta.
- Asy'ari, Sapari Iman Drs, 1993, *Sosiologi Kota dan Desa*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Bintoro, 1978, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1978.
- Bryant dan White, 1998, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Conyers, Diana, 1984, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Daldjoeni, N, 1997, *Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota dan Ekologi Sosial)*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Eathon, Joseph W, 1986, *Pembangunan Lembaga dalam Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi*, UI Press, Jakarta.
- Eko Budihardjo, 1997, *Tata Ruang Perkotaan*, Alumni, Bandung.
- George Poulus, Basil dan Tannembaun, 1969, *A Study of Organizational Effectiveness*, American Review, New York.
- Gibson, dkk., 1996, (alih bahasa, Djarkasih), *Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Ginanjart Kartasasmita, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Hamidijoyo, Sastro S, 1977, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Unpad, Bandung.
- Lenvine, H Charles dkk, 1972, *Effective Management Social Psychological Approach*.
- Love J. Arnold, 1991, *Internal Evaluation*, Sage Publications, Newbury Park CA.
- Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.

- Ngurah Agung, I Gusti, 1992, *Metode Penelitian Sosial, Pengertian dan Pemakaian Praktis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Karyono, Faisal, 1985, *Dinamika Pembangunan Pedesaan*, Yayasan Obor Gramedia, Jakarta.
- Rukmana DW, Nana, Ir., Dr. Florian Steinberg, Ir. Robert Van der Hoff, Mei, 1993, *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1998, *Manajemen Strategik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (ed), 1989, *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Soegijoko, Budhi Tjahjati dan BS Kusbiantoro (ed), 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Grasindo, Jakarta.
- Soesilo, Nining I, 2000, *Reformasi Pembangunan dengan Langkah-langkah Manajemen Strategik*. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Steers, Richard M, 1985, *Efektivitas Organisasi*, terjemahan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Suharyanto, Hadriyanus, 1992, *Komunikasi dan partisipasi dalam organisasi*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Suharyanto, Handriyanus, 1992, *Motivasi, Komunikasi, dan Partisipasi dalam Organisasi*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Thoha Mitfah, 1998, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Rajawali, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993, *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Uphoff, Norman, 1986, *Local Institution Development*, Kumarian Press, Cornell University.
- Y. Slamet, 1993, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Buku Data/Laporan

Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2000. BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Karanganyar Dalam Angka 1999, Mantri Statistik Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Tasikmadu Dalam Angka 1999, Mantri Statistik Kecamatan Tasikmasu Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Jaten Dalam Angka 1999, Mantri Statistik Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2000, Gubernur Jawa Tengah.

Petunjuk Teknis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa. Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa, Depdagri, 1996.

Pekerjaan Pembangunan Review Program Jangka Menengah (PJM) Prasarana Dasar Permukiman Kota Karanganyar. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganya, Tahun Anggaran 1997 – 1998.

Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT), Sub Project Digest (SDP) Kota Karanganyar Tahun 1994/1995 – 1997/1998. Final Report, Pemerintah Daerah Tingkat II Karanganyar,

Rencana Detail Teknis Ruang Kota Kota Karanganyar, Tahun 1994/1995 – 2004/2005, BWK V, Bappeda Kabupaten Karanganyar.

Artikel/Makalah

Keban, Yemias T, “*Indikator Kinerja Pemerintah Daerah; Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*”, Dalam Seminar Sehari Kinerja Organisasi Publik, Kebijakan, Penerapannya, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1995.

Moeljarto, Tjokrowinoto, *Politik pembangunan : Sebuah analisis, konsep, arah, dan strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989.

_____, *Efisiensi administrasi pembangunan*, Makalah pada Seminar Efisien Administrasi, Fisipol UGM, Yogyakarta, 20-22 Maret, 1993.

Waluyo, Purwanto, *Reformasi Kinerja Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah*, Majalah Ilmiah Gema Stikubank, Edisi 32 No. V Desember 2000.

Zaeni, *Strategi Pengukuran Kinerja Sektor Publik Dengan Rerangka Balanced Scorecard*, Majalah Ilmiah Gema Stikubank, Edisi 32 No. V Desember 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D).

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 22 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Karanganyar. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan.

Skripsi / Tesis

Hendrian, 2000, *Proses Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus : Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Palembang)*, Magister Teknik Pembangunan Kota, UNDIP Semarang.

Mardiono, 2001, *Pengaruh Kemampuan Aparat LKMD Terhadap Peningkatan Kinerja LKMD (Studi Atas Kinerja LKMD di Kota Salatiga)*, Program Pascasarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Mulyo, Sunaryo, 2001, *Kinerja Dinas Perumahan Kotamadya Dati II Surakarta, Dalam Peremajaan Kawasan Kumuh (Studi Kasus Peremajaan Perumahan Kumuh di Kelurahan Mojosongo Surakarta)*, Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP Semarang.

Nur Aini, Sinta, 1998, *Partisipasi Masyarakat Kota Dalam Pembangunan Melalui Lembaga-lembaga Formal (Studi Kasus : Kotamadia Semarang) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, UNDIP Semarang.*